SMALL BUSINESS - GROWTH
ADLN - Perpustakaan Unair

T E S I S

POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAHAN, MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (KPEL)

(Studi Kasus di desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo)

TS 28.06

Oleh :

NURARENI WIDI ASTUTI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

T E S I S

POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAHAN, MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (KPEL)

(Studi Kasus di desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

NURARENI WIDI ASTUTI

090310661 - L

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAHAN, MASYARAKAT DAN SWASTA DALAMIMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (KPEL)

(Studi Kasus di desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo)

T E S I S

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

NURARENI WIDI ASTUTI
090310661 - L

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 26 Desember 2005

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 Desember 2005

Oleh

Pembimbing Ketua

Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D
NIP 131836623

Pembimbing II

Drs. Haryadi, MSi
NIP 131653466

Mengetahui
KPS

Prof. DR. Laurentius Dyson, Drs, MA
NIP 130937724

Telah diuji pada

Tanggal 26 Desember 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Priyatmoko, MA

Anggota : 1. Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D

2. Drs. Haryadi, MSi

3. Drs. Gitadi Tegas, MSi

4. Sulikah Asmorowati, S.Sos, MDevSt

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia Nya, serta diiringi rasa syukur yang teramat dalam, akhirnya tesis ini bisa diselesaikan. Selanjutnya disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya, dalam kesempatan berikut perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Propinsi Jawa Timur c.q. Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Kepala Bappeprop Jawa Timur atas kesempatan, fasilitas dan beasiswa Program Magister Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal di Universitas Airlangga Surabaya yang diberikan kepada kami.
2. Bapak Drs. Kacung Marijan, MA dan Bapak Drs. Haryadi, Msi yang telah meluangkan waktu dan perhatian selama proses pembimbingan, para dosen penguji, pengelola, pengajar dan seluruh staf Program Magister Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak, fasilitator program KPEL.
4. Yang terkasih, tersayang dan tercinta Bapak dan Mama, kakak-kakak, adik, keponakan dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan *support*, harapan dan doa yang tiada hentinya.
5. Teman-teman Angkatan I Program Magister Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal Universitas Airlangga Surabaya atas *spirit* dan bantuannya.
6. Seluruh "kakak" dan sahabat-sahabat di Nias 138 atas hiburan, dorongan dan pelajaran hidup yang diberikan selama ini. *It will be an unforgettable things for me.* Juga seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sesuai amal ibadah Bapak/Ibu/Saudara. Walaupun karya ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan penulis semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Penulis

RINGKASAN

Pola Partnership Antara Pemerintah, Masyarakat Dan Swasta Dalam Implementasi Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang pola *partnership* antara pemerintah, masyarakat dan swasta di dalam implementasi program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di Desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo.

Partnership sebagai bagian dari tuntutan global merupakan gagasan baru di dalam pengelolaan pembangunan. Peran pemerintah pun ditinjau ulang yaitu dari yang semula menjadi regulator beralih menjadi fasilitator yang berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan investasi sarana pendukung dunia usaha. Pemerintah diumpamakan sebagai *enzyme of growth* sedangkan masyarakat dan *private sector* sebagai *engine of growth.* Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi areal, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Program KPEL merupakan program pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages* (PARUL) yang bertumpu pada pengembangan kemitraan (pemerintah, swasta, masyarakat) permintaan pasar dan pengembangan klaster aktivitas ekonomi. Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo seperti potensi perekonomian dan pertanian Kabupaten Sidoarjo serta bervariasinya produk unggulan Jawa Timur, maka Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai lokasi *pilot project* KPEL. Dari indikator *partnership* yang dikarakteristikan dengan kemauan untuk berbagi peran dan tujuan, saling percaya dan keinginan untuk bernegosiasi, maka kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta tidak melibatkan ketiga komponen tersebut secara maksimal. Dengan demikian konsep kemitraan KPEL yang diharapkan mampu merekonstruksi ulang peran pemerintah, masyarakat dan swasta serta merajut kembali tali kebersamaan dalam pembangunan ekonomi lokal di Desa Segoro Tambak khususnya dan Kabupaten Sidoarjo serta Propinsi Jawa Timur umumnya, belum dilaksanakan secara optimal.

SUMMARY

The Pattern of Partnership Amongst Government, Society and Private in the Implementation of Economics Local Development Partnership Program (Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal/KPEL)

This thesis aims to explain about the pattern of partnership amongst government, society and private sector in implementation of economic local development partnership program in Segoro Tambak Village, Sidoarjo.

Partnership as a part of globalization is a new paradigm in development management. Within this paradigm, the government's needs to be redefined from those of regulator to facilitator. In this way, government's act to make the good function of government and support investment. The government climate was supposed to be an enzyme of growth and the civil and the private sector act as an engine of growth. More specifically, the public has a function to make a good politics and laws climate, private sector makes the job opportunity and revenue and society act in politic and economics area. KPEL program was a society economics development using an empowerment concept and PARUL (Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages) approach. This program based on partnership among public, society and private, market oriented and economics cluster development.

Based on Sidoarjo resources such as economy resources and agriculture, Sidoarjo was pointed out as a pilot project of this program. As partnership indicator showed are trust, negotiating, interest sharing, the partnership in KPEL program was not covered the three actors optimally. So the partnership in this program can not redefine the act among public, society and private in Segoro Tambak Village.

ABSTRACT

Partnership As A Discourse In Implementation Of Economic Local Development Partnership Program (KPEL)

The good governance paradigm assumed that new pattern of interaction amongst government and society has begun developed. The public as an enzyme of growth, the society and the private as the engine of growth.

The steps of this partnership research in Segoro Tambak Village are; the first step by compiled the explanations from many sources such as interview result, regional development document, news from newspaper, books, internet, KPEL report, the development journals, literatures etc.

The second was done the data's reduction and abstraction with summary and statement about partnership in Segoro Tambak Village. Based on the sources the writer make the summary about partnership in Segoro Tambak, statement about partnership mechanism in Segoro Tambak.

After this step, the data validity was assumed by some theory. The theory was used in this steps are, theory about partnership, theory about clustering and local economics perspective. By this theory, the writer was try to applied with the fact about implementation of partnership in Segoro Tambak Village. The combination between fact and theory was result of this step.

From these steps above the writer conclude that the partnership in Segoro Tambak only a discourse like another similar program. Based on the paradigm, the partnership mechanism in Segoro Tambak Village wasn't doing well. Government, society and private can't be a good partner, because the government's interest dominated this program. This condition cause the impact of this program can't imply for the society especially for their business sustainability.

Related with the partnership indicators, the process of trust, negotiate and interest sharing amongst government, society and private was not optimal. It's indicated when the pointed out process of the KPEL program was doing from central government (Bappenas) to the local government (Sidoarjo District) without compare with another district in East Java Province. It's imply that there was an interest dominating in this mechanism. The main motives of this program was come from the central government not from local government, private or society.The partnership in Segoro Tambak Village can not push the business sustainability for the society in Segoro Tambak.

Keywords : Partnership, interest dominating, society business sustainability.

DAFTAR ISI

		Hal
Sampul Depan		i
Sampul Dalam		ii
Prasyarat Gelar		iii
Persetujuan		iv
Penetapan Panitia		v
Ucapan Terima Kasih		vi
Ringkasan		vii
Summary		viii
Abstract		ix
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR GAMBAR		xiv
BAB I.	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	11
1.3.	Tujuan Penelitian	11
1.3.1.	Tujuan Umum	11
1.3.2.	Tujuan Khusus	12
1.4.	Manfaat Penelitian	12
BAB II.	**TINJAUAN PUSTAKA**	
2.1.	Perspektif Baru tentang Pengembangan Ekonomi Lokal	13
2.1.1	Externalities	13
2.1.2	Learning	15
2.1.3	Governance	17
2.2.	Klaster dan Pengembangan Ekonomi Lokal	19
2.2.1	Klaster Usaha	19
2.2.2	Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal	21
2.3.	Implementasi Model KPEL di Jawa Timur	23
BAB III.	**KERANGKA KONSEPTUAL**	
3.1.	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan	31
3.2.	Model Klaster	36
3.3.	Partnership	38

BAB IV. MATERI DAN METODE PENELITIAN
4.1. Jenis Penelitian 48
4.2. Definisi Operasional Konsep 48
4.3. Teknik Pengumpulan Data 51
4.4. Subyek Penelitian 56
4.5. Jenis Data 59
4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 60
4.7. Teknik Analisis Data 61

BAB V. KLASTER PERIKANAN LAUT DAN TAMBAK DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN DESA SEGORO TAMBAK
5.1. Profil Ekonomi Kabupaten Sidoarjo 63
5.2. Profil Pertanian Kabupaten Sidoarjo 68
5.3. Profil Ekonomi dan Pertanian Desa Segoro Tambak..... 71
5.4. Gambaran Desa Segoro Tambak 73
5.5. Gambaran Umum Masyarakat Desa Segoro Tambak 74
5.6. Karakteristik Usaha 75
5.7. Permasalahan Klaster 77

BAB VI. TEMUAN DATA
6.1. Hasil Wawancara Dengan Pemerintah 81
6.1.1. Pemerintah Pusat 81
6.1.2. Pemerintah Propinsi 82
6.1.3. Pemerintah Kabupaten 84
6.2. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat 86
6,3 Hasil Wawancara Dengan Swasta 92
6,4 Hasil Wawancara Dengan KSU/PSU 94

BAB VII. POLA KEMITRAAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KPEL
7.1. Latar Belakang Pola Kemitraan 96
7.2. Inisiatif Munculnya Kemitraan 98
7.3. Pihak yang Terlibat dan Dilibatkan Dalam Kemitraan 101
7.4. Waktu Pelaksanaan Kemitraan 102
7.5. Pola Kemitraan Dalam Implementasi Program KPEL di Desa Segoro Tambak 104
7.6. Kemitraan dan Perkembangan Usaha 115
7.7. Kesimpulan 118

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Kesimpulan 120
8.2. Implikasi Hasil Penelitian 121
8.3. Rekomendasi 123

Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. : Tabel Komoditas /Klaster Menurut Prioritas/Ranking..... 25

Tabel 3.1. : Tabel Tingkat Tanggungjawab Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan 33

Tabel 5.1. : Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 - 2001 64

Tabel 5.2. : Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 1993 Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 - 2001 65

Tabel 5.3. : Tabel Industri Besar, Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Menurut Jenisnya Tahun 2004 66

Tabel 5.4 : Tabel Luas Tambak dan Produksi Ikan Menurut jenis Per Kecamatan Tahun 2004 68

Tabel 5.5 : Tabel Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian dan Sektor Industri bagi PDRB Kabupaten Sdioarjo Tahun 1997 - 2004 70

Tabel 5.6 : Tabel Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2004 70

Tabel 5.7 : Tabel Data PBRB Desa Segoro Tambak 71

Tabel 5.8 : Tabel Data Hasil Pertanian Desa Segoro Tambak..... 72

Tabel 5.9 : Tabel Data Perikanan Desa Segoro Tambak..... 73

Tabel 7.1. : Tabel Indikator Kemitraan Dalam Implementasi KPEL..... 111

Tabel 7.2. : Tabel Hasil Pelaksanaan Kemitraan Dalam Implementasi KPEL Berdasarkan Indikator Kemitraan di Desa Segoro Tambak 113

Tabel 7.3. : Tabel Kondisi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan KPEL di Desa Segoro Tambak 114

DAFTAR GAMBAR

Halaman

ambar 4.1. : Hubungan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta di dalam Implementasi KPEL..... 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam implementasi program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Tesis ini mengambil klaster bandeng dan udang yang berlokasi di Desa Segoro Tambak sebagai studi kasus. Sejauh ini penelitian serupa telah dilakukan. Studi tersebut meneliti tentang implementasi model KPEL di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jawa Timur dengan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Airlangga (Unair) pada tahun 2003.

Dalam studi yang dilaksanakan oleh Bappeprop yang bekerjasama dengan LPM Unair ini dihasilkan prioritas klaster berdasarkan pada penilaian-penilaian atas variabel-variabel yang telah dianalisis. Variabel-variabel tersebut terdiri dari variabel kebutuhan impor, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, harga dan peluang diversifikasi produk yang menghasilkan beberapa model kemitraan bagi masing-masing klaster yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta dengan memperhatikan kelebihan, kekurangan dan permasalahan dari masing-masing klaster, disusun model kemitraan bagi masing-masing klaster tersebut. Namun demikian dalam studi ini tidak secara khusus membahas sejauhmana kemitraan itu sendiri yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam implementasi program KPEL di Jawa Timur.

Dari hasil laporan akhir tersebut juga direkomendasikan beberapa hal, pertama perlunya dibentuk sebuah forum kemitraan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kedua perlu adanya lokakarya yang untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, ketiga perlu dilakukannya penyusunan profil UKM yang akurat disebabkan hingga saat ini belum ada data tentang UKM yang cukup komprehensif dan akurat. Selain itu direkomendasikan juga perlunya fasilitasi pelaksanaan implementasi KPEL bagi klaster komoditas yang sudah terpetakan pada tahun 2004.

Penelitian ini membahas pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta melalui pelibatan seluruh *stakeholders* yang ada di wilayah tersebut sebagai mitra yang saling membantu serta mempercepat pengembangan ekonomi lokal. Penelitian dilaksanakan di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lokasi *pilot project* KPEL yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai daerah replikan KPEL. Di samping itu sebagai bentuk aplikasi program KPEL di Kabupaten Sidoarjo juga telah dibentuk forum kemitraan. Setelah melalui agenda sosialisasi dan identifikasi klaster, akhirnya disepakati bahwa klaster bandeng dan udang yang berlokasi di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai klaster terpilih aplikasi program KPEL.

Pada saat krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 dan memporakporandakan perekonomian Indonesia, peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) justru terasa sangat signifikan. Beberapa hal yang mendasari, pertama sektor UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mencapai angka 4 % hingga dua tahun terakhir yaitu dalam kurun waktu 2002 – 2004 (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan *Japan International Cooperation Agency*,2004). Yang kedua UMKM juga terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2003 UMKM juga telah mampu menyumbang lebih dari 63% di luar minyak dan gas bumi. Ketiga, dalam hal penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 12,2 persen atau 4,1 persen pertahunnya. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam Langkah Sukses Pelaku UKM yang disusun oleh Tim Kerja – Kerjasama Ekonomi Indonesia – Jepang (2004), jumlah pekerja di sektor UMKM tercatat hampir 80 juta orang, dengan 70,3 juta di antaranya bekerja di sektor usaha kecil dan sisanya di sektor usaha menengah dan meningkat menjadi sekitar 70,4 juta pekerja pada tahun 2004.

Kondisi tersebut juga telah direspon oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk *policy* (kebijakan) pembangunan yang menekankan pemberdayaan UMKM. Kebijakan di tingkat pusat sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004 (Republik Indonesia, 2000), salah satunya memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan latihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha. Selain itu, dalam rangka memperkuat ekonomi

nasional juga dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta antara usaha besar, kecil dan menengah yang dikenal dengan konsep bapak angkat. Dalam konsep tersebut (*Kompas, 2004*) BUMN dan usaha besar menjadi bapak angkat bagi usaha kecil dan menengah. Walaupun konsep ini sudah lama diinisiasi namun hasil pelaksanaan kemitraan yang ada masih jauh dari harapan. Penyebabnya adalah masih banyak bidang usaha bapak angkat yang berbeda atau tidak berkaitan antara hulu-hilir atau hilir-hulu dengan bidang usaha dari usaha kecil yang menjadi anak angkatnya.

Sementara itu di tingkat regional kebijakan tentang UKMK dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 melalui program pembangunan industri kecil dan menengah, program penciptaan iklim usaha dan program peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan integrasi *database* (data dasar) Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM). Upaya lain yang dilakukan antara lain bantuan sarana dan prasarana pendukung industri rumah tangga, kecil dan menengah, inventarisasi dan penyempurnaan regulasi, birokrasi, retribusi, upaya penegakan hukum dan pelindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat serta pemberian insentif untuk mengembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung PKM. Dari sisi permodalan pemerintah melakukan upaya-upaya seperti pemberian bantuan LKM serta lembaga keuangan sekunder untuk

mendukung usaha mikro di tingkat lokal, memfasilitasi perluasan modal ventura, dukungan sistem insentif bagi investor asing yang melakukan penyertaan modal pada usaha modal ventura dan pengembangan industri sewa beli. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) UKM pemerintah melakukannya melalui penyelenggaraan pelatihan bagi PKM untuk penguatan kelembagaan, pemberian fasilitas dalam pengembangan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat untuk mendukung pengembangan koperasi dan PKM serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan.

Sesuai dengan Renstrada Kabupaten Sidoarjo (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002), beberapa kebijakan di dalam memberdayakan UKM yang telah dilakukan Pemerintah Daerah yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UKM, peningkatan kualitas layanan aparatur serta meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing koperasi dan UKM melalui peningkatan kemampuan permodalan, penguasaan teknologi tepat guna, penguasaan informasi pasar dan peningkatan kemitraan usaha dengan koperasi, kemitraan UKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan pihak lainnya.

Dengan adanya tuntutan *good governance* serta kondisi dunia yang semakin mengglobal, program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah harus lebih mengedepankan peran masyarakat dan swasta. Dalam konsep inilah mulai berkembang apa yang disebut sebagai *new pattern of interaction between government and society* yang terdapat gagasan *partnership* dalam pengelolaan pembangunan mulai berkembang. Dalam konsep ini pemerintah berfungsi

menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi areal ekonomi dan politik.

Hingga saat ini beberapa pola kemitraan yang ada, terutama di Jawa Timur lebih mengedepankan peran pemerintah dan belum mengoptimalkan peran masyarakat dan swasta. Pada contoh-contoh berikut kemitraan yang terjadi hanya antara dua elemen saja, misalnya antara pemerintah dan masyarakat atau antara pemerintah dan swasta. Di Kabupaten Lamongan, pola kemitraan yang terjadi yaitu antara pemerintah dan swasta melalui kegiatan *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS). Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan pangkalan terpadu yang melayani segala bentuk kebutuhan logistik perusahaan perminyakan dan gas bumi dalam satu atap. Demikian juga yang terdapat di Kabupaten Ngawi yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan pihak swasta dalam hal penyediaan lembaga keuangan mikro. Pola kemitraan di Kota Batu yaitu pola kemitraan antara Pemerintah Kota Batu dengan masyarakat melalui pengintensifan PUSKOMINDES (Pusat Komunikasi dan Informasi Desa) yang berisi komunitas petani, pengusaha kecil dan LSM. Tugas mereka yaitu mempromosikan produk potensial daerah serta aktif menjalin kemitraan usaha dengan pihak swasta (pengusaha). Sementara pola kemitraan yang sudah melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta terdapat di Kabupaten Pamekasan melalui fasilitasi pembentukan sistem tata niaga garam oleh pemerintah daerah setempat dengan membentuk asosiasi petani garam. Melalui asosiasi ini penjualan dan kerjasama dengan pembeli diatur, sehingga harga garam terdongkrak dan

berhasil dilakukan kerjasama dengan PT Garam. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun pola kemitraan yang ada sudah melibatkan komponen pemerintah, masyarakat dan swasta, namun dominasi peran pemerintah dalam pola kemitraan tersebut masih terlihat. Sementara peran masyarakat dan swasta masih sangat minim dalam pola kemitraan tersebut. Padahal kemitraan seyogyanya terjadi secara alamiah yang didasarkan pada prinsip sukarela, saling memerlukan dan saling menguntungkan.

Beberapa tantangan dan prospek yang dihadapi kemitraan itu antara lain (*Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000*) proses dan dampak globalisasi serta tantangan pemerintah untuk mendukung terbentuknya partai yang cukup *accountable* dan *responsible* karena pemerintah memainkan peran yang cukup penting dalam proses kemitraan tersebut. Dengan kata lain pemerintah dituntut berperan dan bekerja lebih efektif dalam proses kemitraan. Tantangan lainnya adalah operasionalisasi kemitraan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) merupakan program pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pemberdayaan seluruh komponen masyarakat serta menggunakan pendekatan *Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages* (PARUL) yang bertumpu pada pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, permintaan pasar serta pengembangan klaster aktivitas ekonomi (Universitas Airlangga, 2003). Program ini sebenarnya merupakan modifikasi dan penyempurnaan program-program sebelumnya, seperti *Business Development Services*

(BDS)-*Provider* yang dilaksanakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jakarta serta program-program lainnya. KPEL juga merupakan salah satu upaya tindak lanjut dari program sebelumnya yang menggunakan pendekatan keterkaitan antar wilayah utamanya wilayah perdesaan sebagai lokasi suplai bagi pasar atau pusat produksi dan wilayah perkotaan sebagai pusat distribusi. Pendekatan keterkaitan antar wilayah ini merupakan model pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pengembangan kelembagaan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat serta mobilisasi sumber daya lokal dan pengembangan jaringan kerja.

Berdasarkan materi Pelatihan Pendampingan *Provincial Supporting Unit* (PSU)/*Kabupaten Supporting Unit* (KSU) Wilayah Replikasi II Program KPEL (2003), pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses penjalinan kepentingan antara sektor pemerintah, swasta, produsen dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)nya dalam sebuah komunitas dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) merupakan suatu program pembangunan di daerah yang bertumpu pada pengembangan lintas sektor melalui suatu klaster komoditas yang menjadi prioritas unggulan. Program ini menitikberatkan pada pengembangan klaster ekonomi terpilih sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada baik untuk mendukung industri hulu maupun sampai industri hilirnya. Klaster komoditas ini diusahakan dalam aktivitas masyarakat lokal yang dalam kegiatannya biasa disebut sebagai kompetensi

ekonomi lokal yang dilaksanakan secara lintas sektoral. Klaster komoditas yang dipilih tersebut berpotensi dalam mengisi peluang di pasaran ekspor, mengembangkan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut (Bappenas, 2003).

Untuk menguji implementasinya, sejak tahun 1999 melalui kerjasama dengan UNDP dan BAPPENAS telah dilaksanakan kegiatan *pilot project* di 3 (tiga) propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya. Pada tahun 2000 diperluas lagi ke 3 (tiga) propinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Jambi dan Lampung. Hasil evaluasi terhadap *pilot project* tersebut menunjukkan hasil yang berarti bagi pengembangan ekonomi lokal bagi daerah yang bersangkutan sehingga pada tahun 2002 Bappenas mereplikasikan ke 18 Kabupaten di 6 Propinsi dan 14 Kabupaten di 7 Propinsi pada tahun 2003 (Bappenas, 2003).

Dalam rangka aplikasi program KPEL di Kabupaten Sidoarjo (Laporan Program KPEL Kabupaten Sidoarjo, 2004) dibentuk Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo yang beranggotakan berbagai *stakeholders,* yaitu dinas/instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan swasta yang berfungsi memberikan alternatif solusi terhadap semua persoalan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan klaster. Dalam agenda sosialisasi dan identifikasi klaster, di dalam forum tersebut akhirnya terpilih klaster komoditas potensial yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sebelum menentukan pemilihan lokasi melalui studi dasar (*based line survey)* yang dilaksanakan oleh *Kabupaten Supporting Unit* (KSU) dan *Provincial Supporting Unit* (PSU), dilaksanakan terlebih dahulu identifikasi klaster komoditi potensial yang dihadiri oleh para *stakeholders* kunci. Berbagai

klaster komoditas unggulan ditampilkan antara lain tas, koper, sayuran, tempe, tahu dan bandeng.

Berdasarkan data dan kriteria yang ada seperti kontribusi bagi PDRB dan peningkatan ekonomi warga akhirnya forum sepakat untuk memilih klaster bandeng dan udang yang kemudian namanya disepakati berubah menjadi klaster perikanan laut dan tambak yang berlokasi di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Keputusan tersebut diambil tanpa mengabaikan klaster komoditas yang sama di kecamatan lain, seperti Kecamatan Waru, Buduran, Candi, Porong, Tanggulangin dan Jabon. Studi yang dilaksanakan oleh *Kabupaten Supporting Unit* (KSU) dan *Provincial Supporting Unit* (PSU) yang dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2003 ini, bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial para pelaku ekonomi yaitu petani tambak/kelompok produsen berikut lingkungannya. Hal tersebut di maksudkan agar diketahui dengan pasti jenis *treatment* apa yang dibutuhkan mereka. Dampak yang dirasakan dari program KPEL di Kabupaten Sidoarjo ini antara lain peningkatan produktivitas dan pendapatan, perbaikan standar hidup para nelayan, dan peningkatan kemampuan SDM masyarakat Sementara beberapa kendala yang masih dihadapi yaitu minimnya informasi pasar, rendahnya partisipasi masyarakat, munculnya potensi konflik, adanya dampak lingkungan dan tingginya ketergantungan para petani pada tengkulak.

Dengan berdasarkan konteks *neo institutional economy* yang menekankan pada peran institusi sebagai mediator dan menyediakan aktor dalam mentransformasi kepentingan-kepentingan individu ke dalam aturan-aturan

sosial, maka studi yang dilakukan ini sangat berkaitan dengan hal tersebut. Pertimbangan mendasar adalah studi tentang KPEL ini dilakukan melalui pendekatan pola kemitraan yang memberikan peran dan peluang bagi institusi untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai fasilitator bagi segenap pelaku-pelaku ekonomi di tingkat lokal. Karena itu diperlukan peningkatan kapasitas tiga pilar pelaku pengembangan ekonomi lokal yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diajukan pada tesis ini adalah "Bagaimanakah pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam implementasi program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)?". Secara khusus studi ini membahas lebih rinci tentang "Siapakah yang lebih berkepentingan dari pola kemitraan tersebut?" serta "Apakah kemitraan tersebut mampu memicu pertumbuhan usaha di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?"

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta pada klaster perikanan laut dan tambak dalam implementasi program KPEL di Desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2. Tujuan khusus

1. Adanya alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Propinsi Jawa Timur melalui Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
2. Adanya konsep pengembangan ekonomi lokal yang bisa digunakan untuk menentukan arah, rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui suatu forum kemitraan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Adanya analisis tentang konsep KPEL sebagai alternatif kebijakan pembangunan regional.
2. Diperolehnya kontribusi yang bermanfaat berupa referensi mengenai KPEL bagi pembangunan ekonomi regional masyarakat Jawa Timur sehingga pelaksanaan KPEL di Jawa Timur menjadi *best practices* penerapan pendekatan KPEL bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan didiskusikan secara khusus tentang beberapa literatur dan hasil studi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama pembahasan tentang perspektif baru pengembangan ekonomi lokal. Kedua, konsep klaster dan pengembangan ekonomi lokal dan akan diakhiri dengan pembahasan hasil studi tentang implementasi model KPEL di Jawa Timur.

2.1. Perspektif Baru tentang Pengembangan Ekonomi Lokal

Sebagaimana yang dikemukakan oleh A.H.J. (Bert) Helmsing dalam *Externalities, Learning and Governance New Perspectives on Local Economic Development* (2001), terdapat tiga faktor yang memicu munculnya *overlapping* pengertian tentang perspektif pengembangan ekonomi lokal. Tiga hal tersebut yaitu *externalities*, *learning* dan *governance*. Pada beberapa dekade terakhir, baik *inter firm* maupun *extra firm organization* mampu memberikan inovasi yang cukup berarti. Terobosan tersebut yaitu adanya isu-isu baru di bidang ekonomi pemerintahan baik di tingkat industri maupun teritori.

2.1.1. Externalities

Sebagaimana yang disampaikan oleh Krugman (dikutip dari Helmsing, 2001), seorang ekonom yang cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan atas penghargaan tentang ekonomi lokal, eksternalitas sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi geografis. Krugman berpendapat bahwa dengan adanya aktivitas aglomerasi ekonomi dan kecenderungan mengelompokkan diri dalam bentuk klaster, berpotensi mampu membesarkan pasar dan aktivitas mereka. Krugman juga melihat adanya proses lain yang terjadi di dalam aglomerasi yang terjadi pada tingkat lokal. Dengan mendasarkan diri pada konsep klasik Marshall (dikutip dari Helmsing, 2001) tentang tipe ekonomi eksternal, Krugman berpendapat bahwa aglomerasi merupakan suatu hal yang cukup menarik bagi para pekerja. Karena dengan *spezialized skills* yang mereka miliki maka perusahaan-perusahaan yang ada bisa merekrut mereka. Sumber kedua dari ekonomi eksternal yaitu adanya ahli di bidang input dan pelayanan. Masukan para ahli dapat memperbesar skala usaha di dalam klaster usaha yang ada. Sumber ketiga yaitu adanya pengetahuan dan arus informasi. Adanya usaha-usaha yang terkonsentrasi menyediakan pertukaran pengetahuan dan arus informasi.

Dalam salah satu studi awalnya, Krugman menekankan pentingnya efek dari ukuran pasar sebagai masukan bagi *geographical consentration*. Pada pertengahan 1980an muncul beberapa literatur dalam kelompok industri daerah baru (*New Industrial District*). Karena konsep yang asli telah diformulasikan oleh Marshall, dalam literatur ini mereka menjelaskan keberhasilan klaster perusahaan dari daerah berkembang di wilayah pinggiran pada negara berkembang seperti di Brasil (Schmizt, 1995a,1999b), Mexico (Rabelotti, 1995,1999), Peru (Visser, 1996,1999),

dan India (Cawthorne, 1995; Das, 1998; Knorringa, 1996, 1999; Nadvi, 1996). Beberapa faktor yang mendasari keberhasilan tersebut yaitu:

a. Teknologi baru yang diperkenalkan lebih besar dibandingkan fleksibilitas produksi, antara lain mesin pengontrol komputer dan teknologi informasi yang selalu mengikuti kebutuhan perusahaan serta *trend* yang ada. Teknologi ini ditujukan untuk menghidupkan spesifikasi rancangan dan konfigurasi mesin agar lebih akurat.

b. Pengelompokan (*clustering)* lembaga usaha memungkinkan untuk difasilitasi melalui pembagian kerja yang berasal dari berbagai komponen dan berbagai bagian sehingga setiap lembaga usaha mampu menjadi *supplier* ahli bagi lembaga usaha lainnya.

c. Pengelompokan lembaga usaha bisa mendapatkan keuntungan tambahan melalui kerjasama internal antar lembaga usaha dan melalui *joint action.* Yang paling penting menurut Schimtz (dikutip dari Helmsing, 2001) yaitu adanya fakta bahwa ijin sebuah klaster adalah untuk mengorganisasi diri mereka sendiri dan menyediakan adanya *critical service.* Schmizt juga berpendapat bahwa usaha-usaha tersebut tidak bisa jika hanya mengandalkan investasi yang diperoleh dari sumber ekonomis eksternal mereka saja tetapi juga dari klaster yang ada tersebut.

2.1.2. Learning

Pada awal 1980an, Nelson dan Winter dalam *Externalities, Learning and Governance* (dikutip dari Helmsing, 2001), telah memformulasi

perspektif evolusi mereka tentang perubahan ekonomi. *Collective learning* pun menjadi sebuah panduan konsep yang baru dengan *entry poit* analisis yang bervariasi. Beberapa di antaranya berawal dari perspektif tentang lembaga usaha itu sendiri, sementara yang lainnya berasal dari literatur yang bersumber dari sistem inovasi nasional dan pengembangan dari makna pembelajaran daerah (*learning region)* dan adanya *innovative milieu*. Konsep *learning by doing* (Helmsing, 2001) merupakan sentral bagi proses pemeliharaan dan pembaharuan kompetensi. Dalam pandangan ini, kompetisi produk pasar hanya dipandang sebagai sebuah *superficial expression* dari sebuah kompetisi yang melebihi kompetensi itu sendiri.

Lebih lanjut Lawson dan Lorenz dalam Helmsing (2001) menggabungkan tiga ide sentral yang berasal dari pembelajaran organisasi. Yang pertama bahwa pembelajaran tergantung pada *sharing* pengetahuan, kedua bahwa sebuah pengetahuan yang baru tergantung pada proses perpaduan keanekaragaman pengetahuan dan ketiga perusahaan dimungkinkan akan mengalami kesulitan untuk membuat penggunaan pengetahuan baru tersebut lebih efektif karena adanya resistensi rutinitas dan prosedur atas pengetahuan yang telah digunakan. Ringkasnya, kehadiran *local collective learning* meningkatkan usaha yang berkapasitas lokal untuk dipelajari dan diadaptasi menjadi sebuah inovasi. Sementara itu Maskell dan Malmberg (dikutip dari Helmsing, 2001) yang menempatkan pembelajaran lokal dalam konteks pasar globalisasi

berpendapat bahwa globalisasi telah menghancurkan kemampuan lokal yang berbasis pada faktor-faktor produksi lokal yang telah ada sebelumnya.

2.1.3. Governance

Sebuah lembaga usaha tidak hanya tergantung pada kapasitas usaha mereka sendiri saja tetapi juga pada lembaga usaha lain dan peran institusi sebagai penyedia input dan jasa serta sebagai sumber pembelajaran dan inovasi. Untuk meminimalkan dan mengatasi berbagai permasalahan seperti simpang siurnya informasi, *moral hazard* dan lain-lain, dibutuhkan peran pemerintah sebagai *critical issue* (Helmsing, 2001).

Lebih lanjut Helmsing (2001) juga mengungkapkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan lembaga usaha tanpa disadari telah mengalami perubahan yang cepat dimana hubungan tersebut telah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara dengan logika dan skala yang berbeda-beda. Konsep yang baru tersebut yaitu jaringan inti (Hakanson, 1992;Thompson et.al, 1991), rantai komoditas (Dicken, 1998), sistem produksi (Scott and Storper, 1992), klaster (Porter, 1990; Schmitz, 1995a) dan sistem usaha (Whitley, 1992). Selain itu pemerintahan setempat secara umum dan pemerintahan daerah secara khusus juga telah memasuki dan *concern* dalam hal pengembangan ekonomi. Usaha kecil dan menengah bagaimana pun seringkali harus mendapatkan keuntungan dari sumber-sumber eksternal dan bergantung pada penyedia jasa layanan usaha dalam

rangka memperoleh pasar dan informasi produk, peralatan, keahlian dan teknologi.

Dalam studinya tentang daerah industri di Brasil dan Eropa, Schmitz (dikutip dari Helmsing, 2001), mengidentifikasi pentingnya kerjasama bagi pelayanan umum, menekankan barang-barang publik dan berkarakter non pasar. Schmitz memformulasikan kembali konsepnya tentang efisiensi kolektif dengan membuat perbedaan antara kerjasama horizontal dan vertikal dan antara kerjasama bilateral dan multilateral dalam kolaborasi di dalam kelompok usaha.

Beberapa *trends* yang dikontribusikan dalam pemerintahan ekonomi lokal yaitu pertama, pada beberapa negara hal tersebut telah direalisasikan bahwa untuk menciptakan inovasi nasional dan membuat sebuah *support system* menjadi lebih *responsive*, mereka harus menggabungkan diri. Kedua, adanya peraturan pemerintah yang telah menimbulkan beberapa alasan. Peraturan itu sendiri merupakan proses yang kompleks dan terkait juga beberapa faktor di dalamnya. Meskipun beberapa *support system* telah diorganisisir secara nasional atas alasan efisiensi dan skalanya serta tidak mampu menggabungkan diri secara penuh, namun implementasi tetap mengambil tempat di tingkat lokal. Jaringan harus diorganisir secara lokal dan memfasilitasi efek eksternal dari pengambilan keputusan ekonomi menjadi lebih menginternalisasi serta melindungi eksternalitas yang negatif dan memaksimalkan yang positif. Para pemain lokal

merupakan tempat terbaik untuk memperkirakan situasi mereka dan mempelajari serta membandingkannya dengan pengalaman yang lain.

2.2. Klaster dan Pengembangan Ekonomi Lokal

2.2.1. Klaster Usaha

Klaster usaha merupakan fenomena umum yang ada di sejumlah negara. Beberapa literatur yang terdapat pada distrik industri di Italia menggambarkan beberapa klaster usaha (antara lain klaster kulit, tekstil dan keramik), mampu mencapai tingkat pertumbuhan pasar dan *leadership* yang cukup tinggi (Wisnu Gardjito, 2005). Sementara itu sesuai Materi Pelatihan Pendamping PSU/KSU KPEL (2003), pengembangan klaster adalah salah satu strategi kunci di dalam mengembangkan ekonomi lokal. Dengan memfokuskan diri kepada klaster diharapkan mampu memaksimalkan hubungan antar *stakeholders* lokal dan membuat dukungan pemerintah daerah menjadi fokus.

Seperti disampaikan oleh Kacung Marijan (2002) juga bahwa sebuah klaster usaha memiliki tingkat *competitiveness* yang cukup tinggi. Pada saat daerah berusaha (dan berhasil) mengaktualisasikan potensi tersebut dari klaster-klaster industri yang terdapat di wilayahnya, hal tersebut bukan saja menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalamnya. Sehingga pada akhirnya daerah juga yang akan memperoleh keuntungan, misalnya dari sektor pajak dan retribusi serta terserapnya tenaga-tenaga kerja trampil di daerah.

Efek yang ditimbulkan dari klastering di negara berkembang di antaranya (Rabelloti, 1997), adanya kenaikan biaya proses produksi di perusahaan serta munculnya beberapa pola hubungan antara usaha besar dan usaha kecil, adanya keterkaitan antara pedagang dan produsen, munculnya jaringan horizontal antar usaha-usaha yang sama. Singkatnya berdasarkan data empiris dapat disimpulkan bahwa klaster usaha yang terdapat di negara berkembang menunjukkan adanya jaringan yang cukup luas. Satu pelajaran penting yang dipetik dari data tersebut yaitu adanya perbedaan jaringan yang cukup dalam, perbedaan kualitas dan intensitas diharapkan mampu meng*generate* munculnya *collective efficiency* yang terdapat dalam klaster.

Secara lebih rinci, konsep lain tentang *collective efficiency* tersebut dikemukakan oleh Hubert Schmitz (dikutip dari Kacung Marijan, 2002). Di dalam pandangan Schmitz efisiensi kolektif akibat adanya penghematan eksternal cenderung bersifat pasif, karena lebih didasarkan pada keuntungan-keuntungan akibat lokasi yang sama. Di samping itu di lokasi yang sama itu pula perusahaan-perusahaan tersebut lebih mudah memperoleh tenaga kerja trampil dan memudahkan hubungan antara *supplier* dan *buyers*. Menurut Schmitz, keuntungan-keuntungan tersebut juga akan lebih dinamis apabila dilakukan tindakan-tindakan bersama *(joint action)*, khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

2.2.2. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi yang berbasis lokal (Edward J.Blakely, 1989) tidak hanya merupakan retorika tetapi seharusnya merepresentasikan peningkatan yang cukup signifikan bagi aktor-aktor yang tergabung dengan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi. Hal ini merupakan proses yang cukup esensial karena pemerintah dan atau kelompok yang berbasis komunitas mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Selanjutnya mereka memasuki pola kemitraan baru dengan sektor swasta atau aktor lainnya menciptakan lapangan kerja baru serta menstimulir aktivitas ekonomi dalam wilayah pengembangan ekonomi.

Secara rinci Blakely (1989) mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi lokal berorientasi pada proses, termasuk institusi-institusi baru, pengembangan industri-industri alternatif, peningkatan kapasitas keberadaan tenaga kerja dalam memproduksi produk-produk mereka, identifikasi pasar baru, transfer ilmu pengetahuan serta pembentukan usaha baru. Sesuai esensinya, pemerintahan lokal dengan didukung partisipasi komunitas yang ada serta dengan menggunakan sumberdaya yang berbasis institusi diharapkan mampu menampung potensi dan keutamaan sumberdaya yang ada untuk merancang dan mengembangkan ekonomi lokal mereka. Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang ada menyadari bahwa tindakan yang diambil oleh sektor swasta berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil oleh sektor swasta. Dalam komunitas besar maupun kecil diperlukan adanya pengertian

sehingga antara pemerintah lokal, kelompok institusi dan sektor swasta menjadi partner yang sangat esensial dalam proses pengembangan ekonomi lokal.

Tujuan dari pengembangan ekonomi lokal ini secara lebih rinci disampaikan oleh Blakely (1989) sebagai berikut, pertama menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Pendapat ini didasari oleh munculnya *trust* dalam perencanaan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja dengan memanfaatkan komunitas yang ada. Kedua, menghargai adanya stabilitas ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi hanya akan berhasil apabila komunitas yang ada memiliki pendekatan yang cukup spesifik dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha mereka seperti tanah, tenaga kerja, infrastruktur dan sebagainya. Ketiga, membangun keberagaman yang berdasarkan pada ekonomi dan pengembangan yang ada. Tidak ada satu komunitas pun dengan pekerja tunggal atau sekelompok pekerja yang luput dari fluktuasi tenaga kerja. Oleh karena itu dibutuhkan adanya *a broad base* dalam rangka mempersiapkan keberlanjutan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Business development (Blakely, 1989) juga merupakan komponen penting di dalam ekonomi lokal. Terdapat sedikitnya beberapa teknik di dalam *business development* ini yang tergantung dari strategi pengembangan usaha lokal. Beberapa di antaranya yaitu *one stop center,* sistem pemasaran, pusat inkubasi UKM, program penelitian dan pengembangan, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Suatu strategi

pengembangan usaha bisa mempunyai satu atau lebih beberapa dimensi dasar berikut, pertama untuk memperbaiki sebuah bisnis baru, untuk mengadakan suatu usaha baru dengan memasukannya ke dalam suatu lahan usaha. Kedua untuk mengembangkan dan memperluas usaha yang ada dan dalam rangka meningkatkan inovasi dan kewirausahaan diantara kelompok.

Seperti disampaikan Henry Sandee dan Sandra C Van Hulsen (Sandee, 2000), bahwa dengan membandingkan peran BDS dan kerangka pengembangan *cluster* terdapat perbedaan antara proses produksi yang digerakan produsen (*producer driven process)* dengan proses yang digerakan oleh pembeli (*buyer driven process).* Perbedaan tersebut sangat berguna untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah UKM tersebut berkembang. Dari studi kasus tersebut dapat pula disimpulkan bahwa antara swasta dan publik tidak terjadi konflik dalam proses pengembangan usaha kecil menengah namun yang terjadi justru mereka berusaha untuk saling mendekatkan diri untuk mencapai keuntungan bersama.

2.3. Implementasi Model KPEL di Jawa Timur

Berdasarkan laporan akhir implementasi model Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di Jawa Timur yang merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Airlangga Surabaya (Bappeprop Jawa Timur, 2003), komoditas unggulan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Mojokerto merupakan komoditas yang masuk dalam trend yang sedang berlangsung. Komoditas tersebut merupakan trend yang sedang berjalan karena masyarakat merasa bahwa komoditas/klaster tersebut tidak mengalami goncangan ketika krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Komoditas unggulan tersebut antara lain sektor jasa, sektor industri rumah tangga seperti krupuk udang, krupuk ikan, krupuk rambak, alat rumah tangga dari aluminium, bordir kain, tikar lipat dan kerajinan tas (enceng gondok).

Peluang komoditas unggulan tersebut adalah tersedianya bahan baku, tenaga trampil, permintaan produk yang cukup baik dan tersedianya peluang untuk meningkatkan produksi. Sedangkan ancaman yang dihadapi antara lain adanya pesaing yang membuat merk udang dengan bahan baku ikan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap iklim usaha yang kondusif, rendahnya kemampuan UKM dalam mengakses modal dengan lembaga keuangan formal serta belum adanya kemitraan/jejaring yang kuat dengan pihak lain (Bappeprop, 2003). Dalam kajian model KPEL di Jawa Timur tersebut dilakukan prioritas klaster berdasarkan penilaian-penilaian atas variabel-variabel yang telah dianalisis yaitu variabel kebutuhan impor oleh daerah/negara lain, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, harga dan peluang diversifikasi produk. Dari variabel-variabel tersebut selanjutnya dibuat *scoring* dengan *score* tertinggi merupakan klaster prioritas utama dan seterusnya seperti pada tabel berikut .

TABEL 2.1.
KOMODITAS /KLASTER MENURUT PRIORITAS/RANKING

NO	Kriteria	Komoditas/Cluster							
		Udang	Ikan	Alat Rumah Tangga (aluminium)	Rambak	Bordir Kain	Tikar Lipat	Kerajinan Tas	Ojek
1	Permintaan pasar	5.25	11	6.5	6.25	5.25	5.75	5	4.5
2	Potensi untuk tumbuh di ata rata-rata	5.33	6.33	5	6.67	6.33	7	5	6
3	Keterlibatan usaha kecil	6.2	6.6	5.2	6.2	6.4	6.4	5.2	5.8
4	Kapasitas sektor swasta untuk berpartisipasi	7	7.5	7.5	7	7	7	7	7.5
5	Dampak berganda terhadap perekonomian	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Dukungan untuk berhasil	7	8	8	8	8	7	6	7
7	**Total score**	**38.78**	**47.43**	**40.2**	**42.12**	**40.98**	**41.15**	**36.2**	**38.8**
8	**Prioritas/ranking**	**7**	**1**	**5**	**2**	**4**	**3**	**8**	**6**

Sumber : Laporan Akhir Implementasi Model KPEL di Jawa Timur, Kerjasama Bappperop Jatim dan LPM Unair, 2003

Dari hasil analisis dan pembahasan serta dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing klaster tersebut, studi yang dilaksanakan oleh Bappeprop dan LPM Unair (Bappeprop, 2003) ini kemudian disusun suatu model kemitraan bagi klaster-klaster UKM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing klaster tersebut.

Beberapa alat ukur yang digunakan dalam mengukur keberhasilan kemitraan tersebut antara lain:

1. Pencapaian kemandirian daerah

Pelaksanaan KPEL di Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto belum dapat dikatakan mandiri karena belum tercipta suatu kemitraan yang bertujuan membangun komitmen bersama untuk mengembangkan ekonomi lokal antara pemerintah kabupaten setempat, pihak swasta dan masyarakat.

2. *Learning organization*

   Belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan baik di Kabupaten Sidoarjo maupun Mojokerto.

3. Pengembangan kapasitas kelembagaan

   Di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dilaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaaan dengan munculnya beberapa klaster komoditas. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto belum menunjukkan indikator tersebut.

4. Akuntabilitas publik dan perluasan akses informasi yang belum dilaksanakan di kedua kabupaten.

Berdasarkan hasil lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Cendana Surabaya pada tanggal 8 Juli 2004 juga telah terbangun komitmen bersama antara pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat (UMKM) dengan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pemerintah siap untuk memfasilitasi pihak UKM agar dapat mengakses kredit dan akses informasi dengan mudah.
2. Pemerintah siap untuk memfasilitasi peningkatan kualitas produksi UKM
3. Perbankan/BUMN siap untuk mengucurkan dana kepada UKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. UMKM sendiri bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BUMN.

Berdasarkan laporan akhir tersebut direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Perlunya dibentuk suatu forum kemitraan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur, karena hingga saat ini di Jawa Timur forum tersebut baru terdapat di dua kabupaten saja yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto.
2. Untuk mempercepat pelaksanaan implementasi KPEL perlu adanya lokakarya dalam *scope* Jawa Timur yang bertujuan membangun suatu komitmen bersama antara Bapepperop Jawa Timur (pemerintah), swasta (dunia usaha) se Jawa Timur, masyarakat (UMKM) dan lembaga-lembaga pendukung lainnya (BUMN, perguruan tinggi, LSM).
3. Perlu dilakukannya penyusunan profil UKM yang akurat, karena hingga saat ini belum ada data tentang UKM yang cukup komprehensif dan relevan.
4. Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan implementasi KPEL bagi klaster komodtas yang sudah terpetakan pada tahun 2004.

Apabila pada penelitian sebelumnya klaster udang mendapatkan *score* yang terendah, dalam penelitian ini klaster udang dan bandeng justru dijadikan obyek penelitian. Beberapa hal yang mendasari hal tersebut, pertama klaster-klaster komoditas yang disusun pada penelitian sebelumnya merupakan trend yang sedang berjalan dengan asumsi bahwa komoditas-komoditas tersebut tidak mengalami goncangan ketika krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia.

Alasan kedua, penelitian ini lebih difokuskan pada pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam implementasi program KPEL. Sedangkan pada penelitian sebelumnya difokuskan pada pembentukan model-model kemitraan klaster UKM yang dihasilkan berdasarkan hasil identifikasi variable-variabel yang telah dianalisis. Dengan demikian proses *scoring* yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya tidak berpengaruh pada penelitian ini karena hasil penelitian yang dihasilkan juga berbeda. Ketiga, lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya mengambil klaster-klaster komoditas yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada satu lokasi saja yaitu Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

2.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Di dalam perspektif baru tentang pengembangan ekonomi lokal terdapat tiga faktor yang memicu munculnya tumpang tindih (*overlapping)* tentang perspektif pengembangan ekonomi lokal yaitu *externalities, learning* dan *governance.*

b. Konsep klaster usaha merupakan fenomena umum yang ada di sejumlah negara dan mampu memaksimalkan hubungan antar *stakeholders* lokal. Karena dengan melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konsep awal dari program KPEL, seluruh *stakeholders* juga mampu berpartisipasi dalam

perencanaan pemerintah, formulasi kebijakan, penyampaian dan pembuatan keputusan. Sehingga pelibatan seluruh *stakeholders* yang ada di wilayah tersebut sebagai mitra yang saling membantu dapat membantu mempercepat pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian pada saat daerah tersebut berusaha (dan berhasil) mengaktualisasikan potensi tersebut, keuntungan tidak hanya didapatkan perusahaan yang terdapat di dalamnya saja, namun pada akhirnya daerah juga akan memperoleh keuntungan dari pajak dan retribusi perusahaan tersebut.

c. Menurut Blakely (1989), pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja, menghargai stabilitas lokal dan membangun keberagaman ekonomi. Dengan demikian munculnya klaster komoditas yang telah disepakati, diharapkan mampu mendorong forum kemitraan KPEL untuk menstimulasikan kegiatan ekonomi sebagai suatu alat untuk menciptakan kesempatan peningkatan pendapatan.

d. Hasil studi implementasi model KPEL di Jawa Timur menunjukkan bahwa pada studi tersebut dilakukan *scoring* yang didasarkan pada penilaian atas variabel-variabel yang telah dianalisis. Selanjutnya setelah proses tersebut selesai, disusun suatu model kemitraan bagi klaster-klaster UKM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing klaster tersebut. Sementara pada penelitian ini akan difokuskan pada pola kemitraan yang terjalin di antara pemerintah, masyarakat dan pihak

swasta di dalam implementasi program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL

Apabila pada pembahasan terdahulu telah dilakukan tinjauan pustaka mengenai perspektif baru pengembangan ekonomi lokal, klaster dan pengembangan ekonomi lokal serta implementasi model KPEL di Jawa Timur, maka dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut tentang kerangka pemikiran teoritik dari konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan (*policy implementation),* konsep tentang klaster dan konsep tentang *partnership* (kemitraan).

3.1.Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan (Said Zainal Abidin, 2004) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Pada tahap ini bermacam alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sejauhmana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut. Banyak kebijakan yang dipandang para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat. Sementara sebaliknya ada juga kebijakan yang sebenarnya tidak begitu bermutu apabila dilihat dari substansinya, namun dapat diterima oleh masyarakat karena dianggap mampu menampung aspirasi masyarakatnya. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat dua faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu mutu dari kebijakan itu sendiri dan dukungan pada strategi yang dirumuskan.

Menurut Said Zainal Abidin (2004), banyak kebijakan yang akhirnya menjadi aturan yang mati hanya karena dalam proses perumusannya tidak melibatkan masyarakat dan hanya menampung aspirasi kelompok penguasa tertentu saja. Kondisi ini bisa memicu timbulnya perlawanan oleh masyarakat kepada pihak perumus kebijakan. Dengan demikian semakin transparan proses perumusan kebijakan, maka akan semakin banyak aspirasi yang dapat ditampung.

Langkah berikutnya yang dilakukan setelah proses perumusan kebijakan yaitu proses pelaksanaan kebijakan (*policy implementation).* Menurut Soenarko (1998), sebuah implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dan dipertimbangkan sejak tahap perumusan dan proses penetapannya. Namun demikian perlu diperhatikan pula bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sebuah kebijakan baru ada artinya apabila kebijakan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang panjang karena penerapan kebijakan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mempunyai sifat selalu berkembang.

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut digambarkan pembentukan sikap dan perilaku rakyat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah :

TABEL 3.1
TINGKAT TANGGUNGJAWAB PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Metode	Kegiatan	Ketaatan Pada Kebijakan	Tingkat Kesadaran Partisipasi
Persuasive	Membentuk *mutual understanding*	Dengan kesadaran	Tinggi
Purchasing	*Bargaining*	Karena terpenuhi kepentingannya	Sedang
Coercive	Dengan *pressure/power*	Karena ancaman (sanksi)	Rendah

Sumber: Soenarko, H, SD, Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, 1998

Sejalan dengan uraian tersebut, maka kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijaksanaan haruslah yang *appropriate* dan baik, sehingga menimbulkan peran serta masyarakat (*citizen partnership)* dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi yang merupakan *creative participation.*

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan program haruslah dilaksanakan dalam waktu yang tepat. Keberhasilan tersebut juga perlu dijaga sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Michall C. Muscheno (dikutip dari Soenarko, 1998) biasa menyebutnya sebagai *implementation lag,* yaitu waktu yang berlangsung antara *policy adoption* dan *actual program implementation.* Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan karena tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut harus tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public interest).*

Sebuah pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kegagalan antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut (Soenarko, 1998):

1. Teori yang menjadi dasar kebijakan tersebut tidak tepat, sehingga perlu dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
3. Sarana tersebut mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat
4. Isi kebijakan bersifat *ambiguous.*
5. Ketidakpastian faktor intern maupun ekstern
6. Kurang memperhatikan masalah teknis
7. Adanya kekurangan sumber daya (SDM, keuangan, waktu)

Melihat berbagai penyebab kegagalan tersebut jelas bahwa dalam pembentukan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Selain itu dapat diketahui pula bahwa penyebab kegagalan suatu kebijakan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana (*policy impelementer)* atau administrator saja, tetapi juga disebabkan tidak sempurnanya pembentukan kebijakannya (*policy formation).*

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah selain perlu diperhatikan faktor-faktor penyebab kegagalan sebuah kebijakan, juga faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Soenarko, 1998) seperti:

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat

2. Isi dan tujuan kebijakan harus dapat di mengerti secara jelas untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
3. Pelaksana harus mempunyai cukup informasi terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan melalui diferensiasi kegiatan baik secara horizontal maupun vertikal.
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional (*decentralization)*
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban (*deconcentration)*

Sedangkan seperti yang disampaikan Merille S. Grindlle (1980) terdapat tiga hal pokok dalam pelaksanan kebijakan yaitu memerinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai, membentuk program-program kegiatan dan mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. Dengan demikian isi dari suatu kebijakan pemerintah bersifat menentukan dalam pelaksanaan. Apakah pelaksana-pelaksana kebijakan banyak atau sedikit, apakah kewenangan yang diberikan pelaksana terbatas atau tidak akan banyak tergantung pada isi (*content)* kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu benar-benar merupakan faktor yang menentukan pelaksana. Banyaknya kegiatan politik yaitu proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan lanjutan baik kebijakan strategis maupun kebijakan operasional tergantung pada isi kebijakan pokok tersebut. Selain itu dengan isi kebijakan yang luas maka kebijakan tersebut akan meliputi keadaan dan kondisi yang luas pula, baik menurut sisi geografis, sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu sebenarnya pelaksanaan kebijakan (*policy implementation)* dalam kegiatan

pengambilan keputusan (*policy making)* merupakan kegiatan yang luas dan kompleks yang tidak sekedar menerapkan ketentuan-ketentuan, cara-cara dan sarana yang dicantumkan dalam program yang akan dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu perlu diperhatikan pula kemungkinan konflik yang timbul, proses pengambilan keputusan dan apa yang bisa diperoleh masyarakat (*factual dan ethical outcomes*). Untuk mengatasi masalah tersebut tergantung pada strategi, sumber-sumber atau sarana-sarana serta kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaksana. Di sinilah diperlukan adanya *discretion* yang merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan kebijakan.

3.2. Model Klaster

Sesuai dengan Materi Pelatihan Pendamping PSU/KSU (2003), definisi sebuah klaster adalah kumpulan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada kedekatan geografis yang meliputi kegiatan antar komunitas dan antar sektor, kesatuan sektor industri yang meliputi kegiatan antar daerah dan antar komoditas, serta kesatuan komoditas yang meliputi kegiatan antar daerah. Sementara itu definisi klaster di dalam KPEL (Materi Pelatihan PSU/KSU, 2003) mencakup semua rantai kegiatan ekonomi dari pra produksi sampai pasca produksi, semua unit usaha dan semua *stakeholders* yang terlibat, yang ditentukan berdasarkan kedekatan geografis, kesatuan sektor usaha atau kesatuan komoditas.

Sementara itu menurut Roberta Rabelloti (1997) konsentrasi kegiatan usaha yang disebutnya dengan *industrial district (*sentra industri), diartikan sebagai

sebuah entitas sosio teritori dengan *space* yang didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang telah terbentuk oleh sebuah *relationship* antar berbagai aktor ekonomi. Lebih lanjut kondisi geografis sebuah sentra industri diperkirakan selalu menjadi satu dengan sektor yang telah terspesialisasi, sehingga klaster usaha yang ada di wilayah tersebut dimiliki oleh industri yang telah ada. Sementara bagi Marshall (dikutip dari Kacung Marijan, 2002), sentra-sentra industri tersebut bisa berkembang secara baik karena perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya yang sebagian besar merupakan UKM, memperoleh keuntungan karena adanya kesamaan lokasi. Dari kesamaan lokasi itu pula dimungkinkan tersedianya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus (*labour pool)* serta pertukaran informasi dan gagasan.

Adanya sektor yang terspesialisasi dan kondisi geografis yang terpusat dari usaha kecil dan menengah (Rabelloti, 1997), merupakan sebuah fenomena yang umum pada negara berkembang. Dalam wilayah yang lebih luas kasus-kasus tersebut terdapat di negara Argentina, Brazil, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Pakistan, Peru, Tanzania, South Korea dan Zimbabwe dengan sektor-sektor yang terspesialisasi seperti tekstil, baju, alas kaki, kulit, furnitur, alat-alat elektronik dan produk-produk logam.

Secara lebih rinci, Altenburg (dikutip dari Kacung Marijan,2002) membuat usulan-usulan menarik dengan memilah-milah klaster industri tersebut ke dalam tiga kelompok. Pertama, apa yang dia sebut sebagai *survival clusters of micro and small scale enterprises*. Kelompok klaster yang demikian ditandai oleh adanya kualitas produksi yang rendah dan berorientasi lokal. Corak

pengelolaannya bersifat informal dengan derajat spesialisasi dan kerjasama antar perusahaan dalam wilayah klaster juga rendah. Kedua, yaitu *more advanced and differentiated mass producers*. Pada kelompok ini produk-produk yang dihasilkan dipasarkan di pasar domestik sebagai bagian dari upaya memenuhi barang-barang substitusi impor. Kelompok klaster yang demikian relatif lebih siap di dalam menghadapi kompetisi pasar internasional. Dan yang ketiga yaitu *clusters of transnational corporation.* Kelompok ini banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan orientasi pasar baik domestik maupun internasional, serta di dalamnya terdapat *linkages* dengan UKM.

3.3. Partnership

Isu kepemerintahan yang baik (*good governance)* saat ini merupakan isu sentral yang merupakan bagian dari suatu kecenderungan global. Isu tersebut ditandai dengan liberalisasi perdagangan, sistem politik yang demokratis, pemberdayaan ekonomi. Selain itu isu *good governance* juga merupakan desakan badan-badan pembiayaan internasional terhadap negara-negara berkembang dan miskin.

Pada konsep *good governance* inilah pemerintah berfungsi menjadi *agent of change* dan *agent of development.* Dengan adanya paradigma baru tersebut, maka peran pemerintah menjadi berkurang dan lebih mengedepankan fungsi *civil society* (masyarakat) dan *private* (swasta). Peran pemerintah ditinjau ulang, yaitu dari yang semula menjadi regulator beralih menjadi fasilitator yang

berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan investasi sarana pendukung dunia usaha. Pemerintah diumpamakan sebagai *enzyme of growth* sedangkan masyarakat dan *private sector* sebagai *engine of growth.* Berdasarkan beberapa pemikiran tentang *good governance*, yang disebut sebagai *new pattern of interaction between government and society* mulailah berkembang sebuah gagasan kemitraan (*partnership)* dalam pengelolaan. Dalam hal ini institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi areal, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Crawford (2002) kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kerjasama yang dikarakteristikan dengan adanya:

1. Kemauan untuk berbagi peran dan tujuan,
2. Saling percaya
3. Keinginan untuk bernegosiasi.

Sedangkan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kemitraan adalah faktor *mutual trust* (rasa percaya), *mutual support* (dukungan), *joint decision making* (pengambilan keputusan bersama), *resiprocal accountability* (akuntabilitas) dan *financial transparency and long term commitment* (transparansi keuangan dan komitmen).

Sebuah kemitraan yang murni (Crawford, 2002), berdasarkan pada dimensi-dimensi berikut :

1. Tujuan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar berbagai konstituen.
2. Kepercayaan atas kedaulatan dan hak dari aktor-aktor di tingkat nasional dalam menentukan pilihan kebijakan mereka sendiri.
3. Kewajaran dan hubungan yang bermakna dan dikarakteristikan dengan adanya *depth and quality.*
4. Waktu dan komitmen yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sebuah kemitraan yang kuat.

Globalisasi dianggap sebagai sebuah tantangan sekaligus prospek dalam proses kemitraan *(Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000)*. Di era global ini dirasa perlu untuk mempromosikan adanya kemitraan dengan melihat beberapa konsekuensi yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut. Konsekuensinya antara lain adanya teknologi informasi, revolusi komputerisasi dan adanya hambatan perdagangan. Hal-hal tersebut sesuai rekomendasi hasil refleksi 1999 *World Conference on Governance* (2000) dapat diatasi dengan melakukan kerjasama antara berbagai *stakeholders.* Baik di tingkat lokal maupun internasional, antara pemerintah dan non pemerintah perlu bekerjasama untuk mencapai sebuah *meaningful partnership*. Saat mempromosikan sebuah *global partnership* ini diperlukan kerjasama antara organisasi internasional, konferensi dunia dan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mempromosikan hal tersebut. Tantangan berikutnya, karena dalam kemitraan tersebut negara memainkan peran yang cukup penting, yaitu mempromosikan *partnership* antara berbagai aktor yang ada di masyarakat

termasuk di dalamnya LSM, maka pada akhirnya pemerintah juga berperan dalam menciptakan partai yang cukup *accountable* dan *responsible*. Dengan kata lain pemerintah dituntut untuk berperan dan bekerja lebih efektif pada proses kemitraan.

The Partnership for Governance Reform in Indonesia (Crawford dan Yulius P.Hermawan, 2002) merupakan salah satu bentuk pola kemitraan yang ada di Indonesia. Institusi ini terbentuk atas inisiatif tiga lembaga donor yaitu *United Nations Development Program* (UNDP), *the World Bank* dan *Asia Development Bank* (ADB) dan merupakan hasil kerjasama penuh dengan Pemerintah Indonesia. Struktur pengambilan keputusan yang terdapat dalam institusi ini terdiri dari tiga bagian yaitu *the governing board, executive board* dan *policy commitee. The governing board* beranggotakan pihak Indonesia dan pihak internasional dengan rasio 2 (dua) : 1 (satu). Pihak Indonesia terdiri dari pemerintahan, parlemen, sektor swasta dan *civil society.* Sementara itu pemerintah dan non pemerintah memiliki komposisi yang sama. Walaupun *voting* dimungkinkan untuk dilakukan, namun pengambilan keputusan tetap berdasarkan konsensus bersama. Dengan demikian voting dilakukan hanya apabila benar-benar diperlukan saja. *Executive board* bertanggungjawab atas proses *guiding* atas strategi implementasi rencana kerja dari kemitraan itu. Sedangkan komposisi *policy committee* merupakan representasi dari tiga lembaga multilateral penggagas *The Partnership for Governance Reform in Indonesia* (UNDP, the World Bank dan ADB) dan Bappenas, ditambah dua perwakilan dari *the Partnership Executive Office.*

Beberapa pola kemitraan yang dijalankan di Propinsi Jawa Timur (JPIP, 2004) antara lain, pertama kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pihak swasta dalam kegiatan Lamongan *Integrated Shorebase* (LIS). Proyek ini merupakan proyek pengembangan pangkalan terpadu yang melayani segala bentuk kebutuhan logistik perusahaan perminyakan dan gas bumi dalam satu atap. Model kemitraan yang dibangun adalah pemerintah daerah setempat menyediakan lahan seluas 100 hektar dan swasta menyediakan modal dan manajemennya. Kedua, kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan pihak swasta dalam hal penyediaan lembaga keuangan mikro seperti koperasi, kelompok usaha kecil, PKK, perusahaan daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bentuknya berupa fasilitas kredit yang didanai APBD dengan skema penyaluran yang mudah dan berbunga rendah. Ketiga, kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan masyarakat yaitu dengan memfasilitasi pembentukan sistem tata niaga garam dengan membentuk asosiasi petani garam. Melalui asosiasi ini penjualan dan kerjasama dengan pembeli diatur, sehingga harga garam terdongkrak dan berhasil melakukan kerjasama dengan PT Garam. Keempat, kemitraan antara Pemerintah Kota Batu dengan masyarakat melalui pengintensifan PUSKOMINDES (Pusat Komunikasi dan Informasi Desa) yang berisi komunitas petani, pengusaha kecil dan LSM. Tugas mereka yaitu mempromosikan produk potensial daerah serta aktif menjalin kemitraan usaha dengan pihak swasta (pengusaha). Kelima, kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan pihak swasta dengan mendirikan Sarana Jombang

Ventura yang berfungsi menghimpun dana dari berbagai pihak dan menyalurkannya berupa bantuan usaha bagi masyarakat kecil. Keenam, kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan pihak swasta dengan mendirikan Pusat Usaha Ekonomi Menengah (PUEM) yang memberikan modal usaha bagi keluarga yang mempunyai kegiatan usaha. Untuk memudahkan mekanisme dan keberlanjutan program ini, pinjaman modal bagi usaha keluarga ini harus tergabung dalam kelompok-kelompok di tiap desa/kelurahan.

Dengan mengambil pelajaran dari pola kemitraan dan *regional development planning* di Jepang (Seiko Kitajima, 1998), sebuah kemitraan dapat bekerja dengan efektif dan mampu memecahkan potensi konflik politik yang mungkin timbul, apabila pemerintah yang mempunyai kekuatan dalam memodifikasi peraturan berperan sebagai mediator dalam hal permodalan dan organisasi sipil. Kemitraan dalam kasus di Jepang berperan dalam memfasilitasi penetrasi modal dengan melakukan *commodifyng* lahan dan melukiskan ekonomi wilayah kepada suatu lingkup moneter baik secara global maupun nasional. Dalam hal ini kemitraan menunjukkan beberapa atribut dari teori tentang *mass integrative apparatus*, sebuah mekanisme untuk mengangkat adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat serta jalan bagi mereka dalam proses akumulasi modal dan dominasi politik yang terjadi.

Kemitraan menawarkan beberapa implikasi pertanyaan bagi negara. Dengan mendasarkan diri pada *class nature* dari sebuah negara, negara memiliki legitimasi tersendiri yang kemudian diekspresikan ke berbagai usulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan intervensi

pemerintah berasal dari pertentangan struktural yang ada dalam negara itu sendiri. Sebuah karakter potensial yang berlawanan dari kemitraan itu di tujukan bagi keberlanjutan hubungan kelas dan pada waktu yang bersamaan bisa memuaskan permintaan masyarakat.

Berdasarkan hasil refleksi W*orld Conference of Governance 1999* (Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000), kemitraan dioperasionalkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance.* Hal tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh institusi-institusi baik yang ada di tingkat lokal, regional maupun internasional. Beberapa konsep kemitraan dioperasionalkan secara vertikal (antara institusi lokal dan pemerintah pusat) dan secara horisontal (kemitraan antar institusi lokal atau antara pemerintah dan masyarakat yang banyak difokuskan pada konferensi ini).

Dalam refleksi hasil konferensi tersebut (2000) terdapat beberapa ilustrasi tentang kemitraan oleh aktor dan tingkatan yang berbeda-beda. Dari ilustrasi tersebut disimpulkan beberapa alasan sebagai berikut; Pertama, menurut Ali Farazmand (dikutip dari Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000), kemitraan layak untuk dipromosikan karena di dalamnya terkandung unsur-unsur kreativitas, inovasi, sinergitas dan kemampuan yang kuat (*strong ability)* di dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu terdapat juga unsur partisipasi dan *responsibility,* peningkatan interdepensi dan interkoneksi antara orang, *nation-states,* budaya, pemerintahan dan LSM. Kedua, tujuan dari promosi tentang kemitraan tersebut adalah pemberdayaan

yang terjadi tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Seperti yang disampaikan Guido Bertucci (dikutip dari Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000), sebuah kemitraan yang murni dan *meaningful* mampu meningkatkan partisipasi dan proses demokrasi. Ketiga, adanya sinergi yang bernilai merupakan *heart of partnership* baik yang ada di tingkat lokal, nasional maupun global. Keempat, negara memainkan peran penting pada kemitraan antara berbagai aktor yang ada di dalam *civil society,* termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta. Kelima, pemerintah di dalam proses kemitraan ini tidak hanya berinisiatif dengan para *stakeholders* yang ada di dalam masyarakat saja, tetapi juga perlu memelihara kemitraan tersebut. Keenam, United Nations Department of Economic and Social Affairs yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penyusunan sebuah kemitraan. Selain itu mereka juga merekomendasikan adanya kemitraan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Ketujuh, sebuah kemitraan sebaiknya berkelanjutan dengan mengakomodir kapasitas yang ada di berbagai tingkatan. Dengan demikian diperlukan sebuah *capacity building* dalam menciptakan sebuah kemitraan yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa arus utama dari konferensi tersebut adalah sebuah kemitraan yang efektif dan *meaningful* antara berbagai *stakeholders* yaitu pemerintah lokal dan nasional, dunia usaha dan masyarakat akan mendukung ke arah terbentuknya *good governance.*

Sebuah kemitraan juga sebaiknya (*Eastern Regional Organization for Public Administration, 2000*): Pertama dibangun atas dasar *trust, confidence,*

transparansi dan keterbukaan. Kedua, mengakomodir berbagai kepentingan dari berbagai *stakeholders* dan ketiga kemitraan dijalankan secara vertikal maupun horisontal yang bertujuan untuk mengoptimalkan energi dan kreativitas dari berbagai mitra kerjasama.

3.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut. Semakin transparan proses perumusan kebijakan akan semakin banyak aspirasi yang dapat ditampung. Proses berikutnya yaitu implementasi kebijakan *(policy implementation)* yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan dalam waktu yang tepat.

b. Definisi klaster (Bappenas, 2003) yaitu adanya kumpulan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kedekatan geografis yang meliputi kegiatan antar komunitas dan sektor. Kesatuan sektor industri yang meliputi kegiatan antar daerah dan komoditas, serta kesatuan komoditas yang meliputi kegiatan antar daerah. Definisi lain menurut Rabelloti (1997) menyebutkan konsentrasi kegiatan usaha yang disebutnya dengan *industrial district (*sentra industri) yaitu sebuah entitas sosio teritori dengan *space* yang didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang telah terbentuk oleh sebuah *relationship* antar berbagai aktor ekonomi.

c. Berdasarkan beberapa pemikiran tentang *good governance*, yang disebut sebagai *new pattern of interaction between government and society* mulailah

berkembang sebuah gagasan kemitraan (*partnership)* dalam pengelolaan pembangunan. Menurut Crawford (2002) kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kerjasama yang dikarakteristikan dengan adanya kemauan untuk berbagi peran dan tujuan, saling percaya, keinginan untuk bernegosiasi. Sedangkan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kemitraan yaitu faktor *mutual trust* (rasa percaya), *mutual support* (dukungan), *joint decision making* (pengambilan keputusan bersama), *resiprocal accountability* (akuntabilitas) dan *financial transparency and long term commitment* (transparansi keuangan dan komitmen).

BAB IV

MATERI DAN METODE PENELITIAN

4.1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) yang merupakan konsep yang berusaha mengintegrasikan berbagai potensi sumberdaya dan aktivitas yang dimiliki oleh segenap *stakeholders* pada suatu wilayah dan mengembangkan jaringan kerja untuk pengembangan ekonomi wilayah tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam pengembangan ekonomi lokal ini tidak terbatas pada kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil saja, tetapi kemitraan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Kemitraan ini ditujukan agar terjadi sinergi kerja yang serasi, sehingga semua *stakeholders* maupun pemerintah ikut aktif dalam forum kemitraan yang dibentuk sebagai bentuk representasi sumber daya lokal.

4.2. Definisi Operasional Konsep

Sesuai dengan Materi Pelatihan Pendamping PSU/KSU Wilayah Replikasi II Program KPEL (Bappenas, 2003), kemitraan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kemitraan antara:

a. Pemerintah yang terdiri dari lembaga negara, departemen, dinas-dinas.

b. Masyarakat yang terdiri dari kelompok UKM (dalam hal ini UKM klaster terpilih yaitu klaster udang dan tambak termasuk para petani dan nelayan).

c. Swasta yang terdiri dari kelompok pengusaha.

Kemitraan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu sebuah kerjasama yang dikarakteristikan dengan adanya kemauan untuk berbagi peran dan tujuan, dilandasi rasa saling percaya (*trust)* dan keinginan untuk bernegosiasi (*negotiate)*.

Konteks pelaksanaan kebijakan (*policy implementation)* pada penelitian ini yaitu apabila kebijakan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka program KPEL bisa dikatakan berhasil dan mencapai tujuan yang diharapkan apabila program tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Apabila program tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka bisa dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan.

Definisi Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) pada penelitian ini yaitu program pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pemberdayaan seluruh komponen masyarakat serta menggunakan pendekatan *Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages* (PARUL) yang bertumpu pada pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, permintaan pasar serta pengembangan klaster aktivitas ekonomi.

Pada implementasi program KPEL, juga terdapat beberapa institusi yang berfungsi untuk men*support* kegiatan KPEL. Institusi tersebut terdiri dari

Pada implementasi program KPEL, juga terdapat beberapa institusi yang berfungsi untuk men*support* kegiatan KPEL. Institusi tersebut terdiri dari perguruan tinggi, BUMN, BUMD, asosiasi usaha dan kelompok profesi. Selengkapnya hubungan antara ketiga pihak dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 4.1.
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA DI DALAM IMPLEMENTASI KPEL

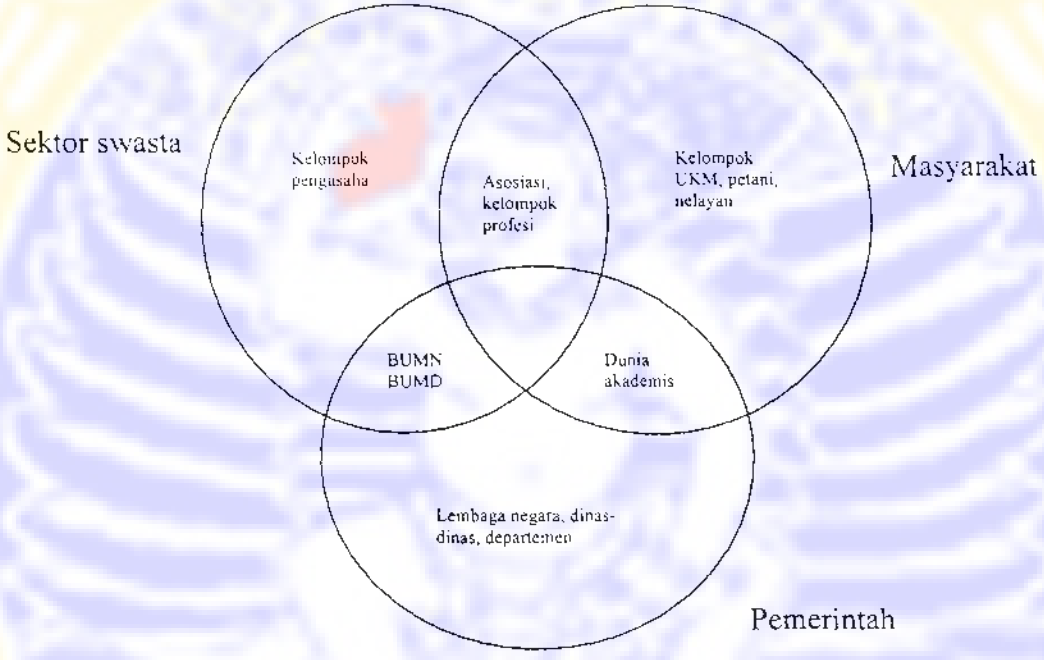

Dalam program KPEL ini terdapat fungsi pendampingan atau fasilitasi sebagai piranti pendukung perkembangan kegiatan atau program KPEL (Bappenas, 2003). Penyeleksian fasilitator (PSU dan KSU) atau biasa disebut juga dengan kader Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ini merupakan bagian dari 13 (tiga belas) langkah metodologi KPEL. Ketiga belas langkah tersebut merupakan pendekatan dari program KPEL ini. Tujuan dari proses penyeleksian

dan pemilihan ini yaitu untuk memilih perintis untuk dijadikan kader PEL yang memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk memfasilitasi pengenalan KPEL di daerah. Fasilitator yang terdapat di daerah terbagi menjadi dua yaitu fasilitator di tingkat propinsi (*Provincial Supporting Unit*/PSU) dan tingkat kabupaten (*Kabupaten Supporting Unit*/KSU). Seorang fasilitator sebaiknya memiliki kompetensi yang memadai, memiliki jaringan kerja yang luas dan komitmen serta integritas pribadi yang dapat diterima berbagai kalangan (*stakeholders).* Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut (Bappenas, 2003), karena seorang PSU/KSU mempunyai tugas membantu proses pengembangan klaster komoditas dalam pengembangan ekonomi lokal melalui program KPEL, memfasilitasi kemitraan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan bertindak sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi lokal.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Observasi

   Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan pada aktivitas pertemuan rutin para pelaku UKMK dalam Forum Kemitraan dan Forum Reboan. Dalam forum tersebit dipertemukan berbagai *stakeholder* baik dari pelaku UKM itu sendiri, pemerintah maupun pihak swasta. Forum tersebut juga merupakan sarana dalam menampung aspirasi, harapan, permasalahan serta solusi yang dipecahkan bersama oleh para *stakeholder*

yang hadir. Yang diamati lebih jauh oleh peneliti yaitu bagaimanakah partisipasi aktif para *stakeholders* dalam forum tersebut, apakah mereka berpartisipasi aktif, atau hanya sebagai pendengar saja, ataukah forum tersebut hanya sekedar sarana legitimasi kebijakan pemerintah saja.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Alasan yang mendasari yaitu karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji tentang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam implementasi program KPEL. Dengan demikian wawancara yang dilakukan akan melibatkan unsur-unsur pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten), masyarakat yang diwakili oleh para petani tambak, pengusaha yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik KADINDA Jawa Timur maupun KADIN Kabupaten Sidoarjo.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan :

1. Kepala Bappenas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah. Pertimbangan yang mendasar yaitu bahwa program KPEL merupakan kebijakan Pemerintah Pusat (Bappenas) yang berada di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial serta Direktur Kerjasama Pembangunan dan Sektoral Daerah.

2. Kasubdit Kelembagaan Kerjasama Pembangunan, Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah.

   Alasan yang mendasari penetapan tersebut yaitu karena subdit kelembagaan kerjasama pembangunan merupakan subdit yang menangani langsung pelaksanaan program KPEL di Indonesia.

3. Kasubbbid Perdagangan dan Koperasi Bappeprop Jawa Timur

   Sebagai wakil Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam sosialisasi program KPEL yaitu Bappeprop Jawa Timur yang pada saat itu diwakili oleh Kasubbbid Perdagangan dan Koperasi Bappeprop Jawa Timur. Dengan demikian di sub bidang perdagangan dan koperasi ini diharapkan didapatkan informasi detail tentang KPEL, sejak proses awal (sosialisasi) program KPEL hingga proses penetapan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagai *pilot project*.

4. Kepala Bidang Ekonomi Bappekab Sidoarjo dan staf Bidang Ekonomi Bappekab Sidoarjo

   Sebagai lokasi *pilot project* program KPEL, Bappekab Sidoarjo memegang posisi penting dalam pelaksanaan KPEL ini. Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu merumuskan perencanaan dan mengkoordinasikan program pembangunan serta menyusun kebijakan pembangunan, Bappekab Sidoarjo seharusnya mengetahui secara detail pelaksanaan KPEL di Kabupaten Sidoarjo.

5. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dalam Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo, unsur-unsur pemerintah selain diwakili oleh Bappekab Sidoarjo, juga terdiri dari dinas/instansi lain antara lain Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, para petani tambak yang merupakan obyek program KPEL secara intensif sering berhubungan dan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan pertambakan banyak melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

6. Sekretaris Desa Segoro Tambak

   Untuk melihat dampak program KPEl terhadap pertumbuhan usaha masyarakat Desa Segoro Tambak, diperlukan data-data tentang potensi desa, kondisi sosial ekonomi desa dan pendapatan desa. Mengingat data-data tersebut ada di Balai Desa Segoro Tambak, maka maka Sekretaris Desa Segoro Tambak merupakan nara sumber yang cukup penting.

7. Ketua Kelompok Klaster Tambak

   Masyarakat sebagai salah satu elemen kemitraan dalam penelitian ini diwakili oleh Ketua Kelompok Klaster Tambak sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani. Dengan melihat karakter masyarakat setempat dan permasalahan yang dihadapi para petani, maka dari ketua kelompok klaster ini didapatkan informasi detail tentang pelaksanaan program KPEL di Desa Segoro Tambak.

8. Kelompok Pengusaha (Ketua KADINDA Jawa Timur dan Ketua KADIN Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan konsep pola kemitraan pada konsep KPEL, konsep kemitraan yang dimaksud yaitu antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Peran swasta yang diwakili oleh kelompok pengusaha direpresentasikan melalui KADIN, dengan pertimbangan bahwa kelompok pengusaha yang tergabung dalam forum kemitraan baik yang ada di tingkat kabupaten maupun propinsi berasal dari unsur KADIN. Dengan demikian, dari unsur tersebut digali lebih dalam tentang keterlibatan swasta dalam program KPEL ini.

9. Provincial Supporting Unit/PSU KPEL dan Kabupaten Supporting Unit/KSU KPEL.

   Sebagai fasilitator program KPEL, baik KSU maupun PSU mempunyai peran penting selama pelaksanaan KPEL. Karena mereka berfungsi sebagai pendamping yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi yaitu memfasilitasi pembentukan dan pemantapan, menyediakan bantuan teknis bagi forum kemitraan, membantu forum kemitraan mendiseminasikan kegiatan dan memonitor berbagai kegiatan yang dilakukan oleh forum kemitraan. Berdasarkan uraian tersebut, maka baik dari PSU maupun KSU dapat diperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan KPEL.

3. Teknik dokumentasi

   Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan bagi subyek penelitian yaitu catatan, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan KPEL di Kabupaten Sidoarjo. Dokumen tersebut

antara lain informasi tentang tinjauan wilayah klaster yang terdiri dari informasi geografis dan fisik, situasi infrastruktur, produk unggulan Kabupaten Sidoarjo dan sebagainya.

4.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah yang terdiri dari :
   a. Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas serta Kasubdit Kelembagaan Kerjasama Pembangunan Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah.
   b. Pemerintah Propinsi yang diwakili oleh Kasubbbid Perdagangan dan Koperasi Bappeprop Jawa Timur.

      Karena Propinsi Jawa Timur adalah merupakan salah satu daerah replikan KPEL, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan KPEL. Hal ini disebabkan pada saat dilaksanakan sosialisasi nasional wilayah replikasi II program KPEL di Jakarta pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2003, Pemerintah Propinsi Jawa Timur diwakili oleh Bappeprop Jawa Timur. Dengan demikian sebagai sebuah institusi yang mempunyai kewenangan dan mengikuti program KPEL ini dari awal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan KPEL.
   c. Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Kasubbid Perdagangan dan Koperasi Bappekab Sidoarjo dan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Hal ini penting mengingat di Propinsi Jawa Timur daerah yang dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan KPEL yaitu Kabupaten Sidoarjo. Bappekab dipilih sebagai salah satu sumber informasi karena mempunyai peran penting dalam pelaksanaan KPEL di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappekab bertugas merumuskan perencanaan dan mengkoordinasikan program pembangunan serta menyusun kebijakan pembangunan. Sedangkan dengan Dinas Perikanan masyarakat lebih banyak terlibat dalam kegiatan pertambakan. Selain itu, Dinas Perikanan juga termasuk salah satu anggota dari Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo.

2. Masyarakat yang terdiri dari :

   a. Sekretaris Desa Segoro Tambak

      Peran Sekretaris Desa Segoro Tambak dianggap cukup signifikan karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan usaha di Desa Segoro Tambak sebelum dan sesudah program KPEL ada di Balai Desa Segoro Tambak.

   b. Ketua Kelompok Tani

      Salah satu indikator keberhasilan KPEL yaitu dengan melihat kemanfaatan program tersebut bagi kelompok pemanfaat program KPEL yaitu kelompok klaster tambak. Informasi yang akan digali dari kelompok ini antara lain, apakah mereka telah mendapatkan manfaat dari program KPEL tersebut, apakah program KPEL mampu membantu memecahkan masalah mereka selama ini, apakah input dan output yang

diperoleh sebelum dan sesudah mereka mengikuti program KPEL, apakah dengan mengikuti program KPEL ini mampu meningkatkan pendapatan dan produksi mereka.

c. Ketua Koperasi Tani

Akibat rendahnya komitmen dan dukungan perbankan terhadap UKM serta menghilangkan ketergantungan para UKM kepada tengkulak, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memfungsikan kembali kelompok tani atau mendirikan koperasi sebagai sarana simpan pinjam bagi para petani tambak. Informasi yang diharapkan dari sumber ini adalah sampai sejauhmana ketergantungan mereka kepada tengkulak dan bagaimanakah komitmen serta dukungan para UKM dan petani yang tergabung dalam klaster tambak ini dalam pendirian koperasi yang diharapkan mampu membantu permasalahan permodalan yang mereka hadapi. Apakah kontribusi yang telah diberikan program KPEL ini atas permasalahan mereka dan sebagainya.

3. Kelompok usaha (KADINDA Jawa Timur dan KADIN Kabupaten Sidoarjo)

Sebagai salah satu komponen dalam kemitraan, swasta mempunyai peranan penting dalam kelangsungan usaha pada pelaksanaan program KPEL di Desa Segoro Tambak. Sesuai dengan konsep awal dari KPEL bahwa kemitraan yang dibentuk adalah kemitraan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Agar kemitraan tersebut berjalan dinamis dan memberikan dampak bagi

pengembangan ekonomi lokal, maka pihak swasta yang diwakili oleh kelompok pengusaha merupakan sumber informasi yang cukup penting. Kelompok pengusaha yang akan dijadikan sumber informasi yaitu para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik yang ada di tingkat propinsi (KADINDA) maupun di tingkat Kabupaten Sidoarjo (KADIN Kabupaten Sidoarjo).

4. Provincial Supporting Unit (PSU) KPEL dan Kabupaten Supporting Unit (KSU) KPEL.

   PSU dan KSU dipilih sebagai salah satu sumber informasi karena peran mereka sebagai pendamping selama pelaksanaan KPEL. Fasilitator atau biasa juga disebut dengan kader PEL, bertindak sebagai piranti pendukung dengan melaksanakan fungsi keperantaraan *(intermediary)* antara komponen yang terlibat dalam program KPEL. Sehingga peran fasilitator mampu memberikan informasi yang cukup signifikan dalam pelaksanaan KPEL.

4.5 Jenis data

Jenis data yang dibutuhkan dalam usulan penelitian ini yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan, terutama data-data hasil observasi, wawancara dan data-data yang relevan dengan karakteristik dari kemitraan yang terdiri dari kemauan untuk berbagi peran dan tujuan, rasa saling percaya (*trust)* dan keinginan untuk bernegosiasi (*negotiate)*.
2. Data sekunder

   Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

a. Informasi tentang tinjauan wilayah klaster yang terdiri dari informasi geografis dan fisik, kebijakan pembangunan dan ekonomi, situasi infratruktur, kondisi sosial ekonomi dan sumber daya manusia dan kapasitas manajemen.
b. Informasi tentang permasalahan klaster dan implementasi KPEL.
c. Tinjauan ekonomi klaster yang terdiri dari aktivitas ekonomi, komoditas utama, pekerjaan utama dan penggunaan lahan.
d. Data tentang kontribusi UKM pada PDRB, profil ekspor, profil investasi, kebijakan tentang UKM, *stakeholders* dan institusi yang mendukung.
e. Berita tentang UKM dan pelaksanaan KPEL dari berbagai media baik cetak maupun elektronik.

4.6. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan selama dua semester yaitu pada bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2005. Pertimbangannya yaitu klaster tambak dan udang yang berlokasi di Desa Segoro Tambak ini merupakan klaster terpilih yang telah disepakati dari hasil forum kemitraan. Proses penentuan klaster terpilih tersebut sebelumnya diawali dengan pembentukan Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo yang beranggotakan berbagai *stakeholders* yaitu dinas instansi terkait, Perguruan Tinggi, LSM dan pihak swasta yang berfungsi memberikan alternatif solusi terhadap semua

permasalahan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan klaster. Setelah melalui agenda sosialisasi dan identifikasi serta tanpa mengabaikan klaster komoditas lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo, akhirnya forum sepakat memilih klaster bandeng dan udang yang kemudian namanya disepakati berubah menjadi klaster perikanan laut dan tambak yang berlokasi di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

4.7. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, data primer dan sekunder, gambar. Langkah berikutnya yaitu dengan mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti dimana proses dan pernyataan-pernyataan yang ada perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya yaitu menyusunnya ke dalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan yang dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisa data ini ialah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah melalui tahap ini mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah data sementara menjadi teori substantif.

BAB V
PERAN KLASTER PERIKANAN LAUT DAN TAMBAK DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada bab ini akan dibahas tentang peran klaster perikanan laut dan tambak dalam dinamika pembangunan sektor perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Dalam proses penetapan dan pemilihan klaster potensial pada forum *stakeholders* yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha (produsen, pedagang, eksportir), perguruan tinggi, LSM, lembaga pendukung lainnya seperti lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan serta media baik cetak dan elektronik, dipertimbangkan berbagai faktor-faktor seperti profil daerah, profil ekonomi, informasi calon klaster dan hasil evaluasi calon klaster (Bappenas, 2003). Beberapa variabel lain yang juga dipertimbangkan dalam proses identifikasi klaster potensial yaitu faktor permintaan pasar (volume dan nilai perdagangan keluar daerah, kebutuhan impor oleh daerah atau negara lain, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, peluang diversifikasi produk dan lain-lain), potensi untuk tumbuh di atas rata-rata (kontribusi pada PDRB, dukungan sumber daya, daya saing komoditas), keterlibatan usaha kecil (jumlah UKM yang terlibat, skala usaha, profil pendapatan, tingkat penguasaan teknologi), kapasitas sektor swasta untuk berpartisipasi dan dampak berganda yang besar terhadap perekonomian.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka data-data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu profil ekonomi Kabupaten Sidoarjo, profil pertanian Kabupaten Sidoarjo, profil ekonomi Desa Segoro Tambak, profil pertanian Desa

Segoro Tambak, gambaran desa lokasi KPEL, kelompok masyarakat desa lokasi KPEL, karakteristik usaha, permasalahan klaster.

5.1. Profil Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Ditinjau dari luas wilayah yang dimiliki (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002), Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Propinsi Jawa Timur yaitu seluas 71.424, 25 Hektar atau 714, 24 Km persegi. Luas wilayah tersebut terdiri dari kawasan permukiman seluas 184,30 km2, persawahan 271,80 km2, tegal/tanah kering 5,28 km2, kawasan hutan 10,38 km2, rawa/danau waduk 5,29 km2, tambak/kolam 156,61 km2, padang rumput 10,28 km2 serta lain-lain 70,30 km2 (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2004). Dari data luas penggunaan tanah tersebut terlihat adanya dominasi lahan yang digunakan untuk permukiman dan industri. Fenomena ini merupakan dampak dari arus urbanisasi dan konsekuensi logis Kabupaten Sidoarjo sebagai *hinterland* dan *buffer zone* Kota Surabaya. Implikasi dari hal tersebut, wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi kawasan tumbuh cepat (*rapid growth area)* dan perubahan penggunaan lahan yang cepat dari lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Berdasarkan data Rencana Strategis Kabupaten Sidoarjo 2002 dan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2004, kecenderungan kenaikan angka PDRB Kabupaten Sidoarjo terjadi sejak kurun waktu 1997 sampai dengan 2001 sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

TABEL 5.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 1997 – 2001

No	Sektor/Sub Sektor	1997		1998		1999		2000		2001	
		Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
1	Pertanian	285,157.87	4.93	804,529.15	8.43	827,023.68	7.98	864,274.82	6.42	969,237.94	7.20
2	Pertambangan dan Penggalian	335.85	0.01	499.12	0.01	598.64	0.01	629.64	-	741.27	0.01
3	Industri Pengolahan	3,198,948.80	55.33	4,488,756.03	47.01	5,186,883.99	50.04	5,647,488.17	41.95	6,525,148.33	48.87
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	166,899.85	2.89	186,803.47	1.96	214,625.59	2.07	241,899.59	1.80	300,012.14	2.23
5	Konstruksi	152,741.76	2.64	142,659.12	1.49	178,934.96	1.73	196,654.66	1.46	259,347.08	1.93
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,153,647.06	19.95	1,840,355.25	19.27	2,187,838.48	21.11	2,402,357.86	17.84	3,946,647.74	29.32
7	Angkutan dan Komunikasi	430,832.35	7.45	374,765.32	3.92	452,858.12	4.37	469,742.69	3.49	764,456.36	5.68
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	178,448.64	3.09	189,792.90	1.99	204,603.41	1.97	213,249.31	1.58	263,182.79	1.95
9	Jasa-jasa	214,602.18	3.71	260,062.01	2.72	295,171.41	2.85	329,649.57	2.45	433,923.88	3.22
	Jumlah	**5,781,614.36**		**8,288,222.37**		**9,548,538.28**		**10,365,946.31**		**13,462,697.53**	

Sumber : Renstra Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002
Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004, Badan Pusat Statistik dan Bappekab Sidoarjo, 2004

Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga kurun waktu 2002 sampai dengan tahun 2004 yaitu berturut-turut menunjukkan kenaikan angka yaitu sebesar 14.205.508,65 pada tahun 2002, 15.811.505,98 pada tahun 2003 dan 17.979.645,85 pada tahun 2004.

Sementara itu sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kabupaten Sidoarjo (2002) dan Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004 (2004), kecenderungan kenaikan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 1993 juga sudah mulai terlihat sejak kurun waktu 1998 seperti nampak dalam tabel berikut:

TABEL 5.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (ADHK)
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 1997 – 2001

No	Sektor/Sub Sektor	1997		1998		1999		2000		2001	
		Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
1	Pertanian	204,131.25	4.68	223,334.88	5.99	205,702.90	5.60	206,442.17	5.18	204,250.42	5.13
2	Pertambangan dan Penggalian	219.80	0.01	175.16	-	181.11	-	179.67	-	186.66	-
3	Industri Pengolahan	2,343,449.21	53.78	1,920,524.48	51.53	1,963,216.20	53.42	1,910,885.40	47.99	2,044,102.63	51.34
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	129,526.64	2.97	133,737.26	3.59	139,884.03	3.81	140,405.00	3.53	151,020.15	3.79
5	Konstruksi	904,656.91	2.84	109,700.90	2.94	120,205.09	3.27	112,127.06	2.82	125,649.82	3.16
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,153,647.06	20.76	736,228.68	19.76	759,870.11	20.68	762,741.72	19.16	829,131.53	20.82
7	Angkutan dan Komunikasi	329,205.86	7.56	235,537.31	6.32	235,786.40	6.42	238,266.28	5.98	294,679.73	7.40
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	142,700.95	3.27	133,523.23	3.58	129,143.91	3.51	129,268.40	3.25	135,476.60	3.40
9	Jasa-jasa	179,976.85	4.13	171,086.29	4.59	172,143.91	4.70	174,769.51	4.39	193,073.23	4.95
	Jumlah	**5,387,514.53**		**3,663,848.19**		**3,726,133.66**		**3,675,085.21**		**3,977,570.77**	

Sumber : Renstra Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002

Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga kurun waktu 2004 yaitu 4.138.142,67 pada tahun 2002, 4.315.713,88 pada tahun 2003 dan 4.545.460,75 pada tahun 2004. Peningkatan angka PDRB tersebut juga diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo yaitu dari 96.844.214.160 pada tahun 2003 menjadi 116.924.633.310 pada tahun 2004. Sementara itu masih berdasarkan Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan angka peningkatan yang signifikan yaitu 3,93 persen pada tahun 2002, 4,29 persen pada tahun 2003 dan 5,32 persen pada tahun 2004.

Berdasarkan data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004 (BPS dan Bappekab Sidoarjo, 2004), sebenarnya Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang cukup besar baik dari sisi skala usahanya maupun jumlah tenaga kerjanya untuk dikembangkan di sektor industri. Potensi tersebut terdiri dari potensi industri kecil, industri besar dan kerajinan rakyat dengan berbagai jenis industri seperti makanan, minuman, tekstil, kayu dan sebagainya sebagaimana nampak dalam tabel berikut :

TABEL 5.3
INDUSTRI BESAR, KECIL DAN KERAJINAN RAKYAT MENURUT JENISNYA
2004

No	Jenis industri	Industri Besar		Industri Kecil		Kerajinan Rakyat	
		Jumlah Industri Besar	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Industri Kecil	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Kerajinan Rakyat	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	36	8,492	597	14,045	5,928	25,156
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	34	5,914	425	11,624	2,050	8,335
3	Industri Kayu dan sejenisnya	47	6,107	87	4,545	340	1,076
4	Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan	18	1,966	46	1,012	72	267
5	Industri Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik	85	5,932	241	4,708	1,739	7,172
6	Industri Barang Galian Non Loham, Kecuali Minyak Bumi dan Batubara	-	-	-	-	-	-
7	Industri Logam Dasar	8	6,010	-	-	-	-
8	Industri Barang dari Logam	78	9,152	347	9,527	1,807	7,047
9	Industri Pengolahan Lainnya	90	8,179	252	6,011	196	735
	Jumlah Total	**396**	**51,752**	**1,995**	**51,472**	**12,132**	**49,788**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, BPS dan Bappekab Sidoarjo , 2004

Di antara jumlah industri kecil dan kerajinan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo tersebut, Kabupaten Sidoarjo ternyata memiliki produk unggulan perindustrian (di*download* dari situs www.sidoarjo.go.id, 2005) yang cukup variatif. Beberapa produk unggulan Kabupaten Sidoarjo antara lain :

a. Tas dan Koper yang berlokasi di Desa Kendensari Kecamatan Tanggulangin.
b. Sepatu yang berlokasi di Desa Kemasan Kecamatan Krian dan Desa Tebel dan Desa Seruni, Kecamatan Gedangan.
c. Sandal yang berlokasi di Desa Brebek, Desa Kepuh, Desa Wadungasri, Desa Waru, Desa Wedoro, Desa Tropodo yang semuanya berlokasi di Kecamatan Waru.
d. Kerajinan dompet yang berlokasi di Desa Kendensari Kecamatan Tanggulangin.
e. Kerajinan Perak yang berlokasi Desa Kedung Bendo Kecamatan Tanggulangin, Desa Wirobiting Kecamatan Prambon dan Desa Besuki.
f. Bordir yang berlokasi di Desa Kendesari, Desa Kludan, Desa Randegan, Desa Ketegan, Desa Boro, Desa Semambung Kecamatan Tanggulangin, Desa Kedung Pandan, Desa Kedung Rejo, Desa Tromposari Kecamatan Jabon, serta yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No 5 –7 Kabupaten Sidoarjo.
g. Kerajinan kerang yang berlokasi di Desa Trosobo Kecamatan Taman, Desa Tebel dan Desa Seruni Kecamatan Gedangan.
h. Udang dan olahannya yang berlokasi di Kecamatan Waru, Candi, Buduran, Sedati, Porong, Sidoarjo, Tanggulangin, Jabon.

i. Bandeng yang berlokasi di Kecamatan Sedati dan Sidoarjo.

j. Kupang yang berlokasi di Desa Balongdowo Kecamatan Candi.

Produk unggulan peternakan yang terdiri dari sapi yang menghasilkan susu sapi (berlokasi di Desa Tropodo Kecamatan Krian), budidaya jangkrik (berlokasi di Desa Kemasan Kecamatan Krian) dan telur itik (berlokasi di Desa Kemangsen dan Desa Sugihwaras Kecamatan Krian).

5.2. Profil Pertanian Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data-data hasil pertanian Kabupaten Sidoarjo (BPS dan Bappekab Sidoarjo, 2004), data luas tambak dan produksi ikan menurut jenisnya per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Jabon dan Kecamatan Sedati memiliki luas tambak yang terluas. Demikian pula untuk jenis produksi yang dihasilkan. Kedua kecamatan tersebut memiliki produksi tertinggi untuk jenis ikan bandeng, udang windu, udang putih, udang campur, tawes dan lain-lain, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

TABEL 5.4
LUAS TAMBAK DAN PRODUKSI IKAN MENURUT JENIS PER KECAMATAN
2004

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jenis Produk						
			Bandeng	Udang Windu	Udang Putih	Udang Campur	Tawes	Lain-lain	Jumlah
1	Sidoarjo	3,128	3,097,300	716,900	193,300	349,000	29,400	227,800	4,595,700
2	Buduran	1,731	1,707,300	401,400	107,200	193,500	16,300	126,300	2,552,000
3	Candi	1,032	1,025,900	229,400	64,100	115,700	9,800	75,600	1,520,500
4	Porong	496	487,600	114,500	30,400	55,100	4,500	36,000	728,100
5	Krembung	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tulangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanggulangin	497	487,500	114,900	30,800	55,500	4,700	36,200	729,900

8	Jabon	4,144	4,009,200	960,900	253,600	456,100	38,400	297,800	6,016,000
9	Krian	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Balongbendo	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Wonoayu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tarik	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Prambon	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Waru	402	396,400	89,600	24,900	44,900	3,800	29,300	588,900
16	Gedangan	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sedati	4,100	4,050,600	956,700	252,700	457,700	38,700	298,900	6,055,300
18	Sukodono	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Tahun 2004	15,530	15,244,100	3,854,300	957,000	1,727,500	145,600	1,127,900	22,786,400

Sunber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004, Badan Pusat Statistik dan Bappekab Sidoarjo, 2004

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sidoarjo dan melihat kecenderungan besarnya kontribusi sektor industri yang diberikan dibandingkan dengan sektor pertanian, maka terlihat bahwa pembangunan yang beorientasi industri lebih mendominasi dibandingkan pembangunan di sektor perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian. Hal tersebut terlihat dari kontribusi yang diberikan sektor pertanian yang lebih kecil dibandingkan sektor industri.

Walaupun besarnya angka PDRB cenderung berfluktuasi sejak kurun waktu 1997, namun sektor pertanian yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan sejak tahun 1997 hingga 2004 selalu memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan sektor industri. Hal tersebut berlawanan apabila melihat luas penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan industri dibandingkan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan perikanan dan pertanian. Fenomena tersebut semakin memperkuat pendapat bahwa pembangunan industri telah mendominasi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana nampak dalam tabel berikut :

TABEL 5.5
PERBANDINGAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI PADA PDRB KABUPATEN SIDOARJO 1997 – 2004

Tahun	Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi bagi PDRB	Sektor Pertanian	Kontribusi bagi PDRB
1997	3,198,940.80	55.32%	285,157.87	4.93%
1998	4,488,756.03	54.15%	804,529.15	9.70%
1999	5,186,883.99	54.32%	827,023.68	8.66%
2000	5,647,488.17	54.48%	864,274.82	8.33%
2001	6,525,148.33	47.82%	969,237.94	7.10%
2002	7,293,361.07	51.34%	1,004,458.08	7.07%
2003 *	7,953,158.16	50.29%	1,033,212.68	6.53%
2004 **	8,789,228.34	48.88%	1,105,781.72	6.15%

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004, BPS dan Bappekab Sidoarjo, 2004
Renstrada Kabupaten Sidoarjo 2004 – 2005, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002

TABEL 5.6
PENGGUNAAN TANAH MENURUT KECAMATAN (HA) 2004

No	Kecamatan	Industri Pengolahan	Pertanian		
			Pertanian Tanaman Kering	Sawah	Perikanan
1	Sidoarjo	46.15	-	683.93	3,088.22
2	Buduran	134.46	2.25	1,051.16	1,731.16
3	Candi	63.75	-	1,302.81	1,031.66
4	Porong	24.63	-	1,287.24	496.32
5	Krembung	14.21	7.71	1,847.52	-
6	Tulangan	12.12	0.85	1,979.26	-
7	Tanggulangin	36.43	-	1,522.05	498.96
8	Jabon	0.40	180.28	1,645.94	4,077.51
9	Krian	213.78	22.20	1,772.89	-
10	Balongbendo	49.25	-	1,933.84	-
11	Wonoayu	42.71	-	2,168.37	-

12	Tarik	171.17	-	2,077.69	-
13	Prambon	26.05	7.68	2,151.33	-
14	Taman	477.09	16.38	976.50	2.59
15	Waru	273.07	10.59	145.84	497.06
16	Gedangan	256.35	-	1,036.48	-
17	Sedati	27.58	14.35	850.00	4,206.89
18	Sukodono	32.56	-	1,901.85	-
	Jumlah total	**1,901.76**	**262.29**	**26,334.70**	**15,630.37**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004, BPS dan Bappekan Sidoarjo, 2004

5.3. Profil Ekonomi dan Pertanian Desa Segoro Tambak

Berdasarkan data isian perkembangan desa dan potensi desa (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, 2003 dan 2004) data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Desa Segoro Tambak tidak bisa menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Karena dari data PDRB tersebut, hanya memuat sektor pertanian dan sektor industri yang tidak ada angkanya, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 5.7
DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DESA SEGORO TAMBAK
TAHUN 2004

No	PDRB	Jumlah	PDRB Per Kapita	Jumlah	Kemiskinan	Jumlah
1	Tanaman Padi	-	1 Pertanian	-	1 Jumlah kepala keluarga	-
2	Tanaman jagung	-	2 Industri	-		
3	Tanaman kedelai	-			2 Jumlah keluarga prasejahtera	-
4	Tanaman lainnya	-				
					3 Jumlah keluarga sejahtera	-

Sumber : Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo, 2004

Demikian juga untuk data pertanian yang tidak hanya mengakomodir jenis dan produksi budidaya ikan laut, ikan payau serta data jenis ikan dan produksi

ikan. Sementara untuk data-data luas tanam, kepemilikan lahan, jenis komoditas buah-buahan yang dibudi dayakan, luas perkebunan, hasil produksi perkebunan, luas hutan, hasil hutan, jenis ternak, produksi ternak dan sebagainya tidak terakomodir, seperti nampak dalam tabel berikut :

DATA 5.8
DATA HASIL PERTANIAN DESA SEGORO TAMBAK
TAHUN 2004

No	Tanaman Pangan		Perkebunan			Kehutanan	
	Luas tanam menurut komoditas	Pemilikan Lahan Pertanian	Jenis komoditas buah-buahan	Luas dan hasil menurut jenis	Pemilikan tanah perkebunan	Luas hutan	Hasil hutan
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo, 2004

Sementara untuk data perikanan tahun 2004 hanya memuat luas tambak yaitu seluas 665.499 hektar. Untuk jenis ikan udang yang dihasilkan yaitu sebanyak 66,5 ton/tahun dan jenis ikan bandeng sebanyak 931 ton per tahun, seperti tabel berikut :

TABEL 5.9.
DATA PERIKANAN DESA SEGORO TAMBAK
TAHUN 2004

No	Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau	Jumlah (ha)	Jenis dan produksi budidaya ikan air tawar	Jumlah (ton/thn)	Jenis ikan dan produksi	Jumlah (ton/thn)
1	Karamba	-	1 Karamba	-	1 Tuna	-
2	Tambak	665.499	2 Empang/kolam	-	2 Udang	66.5
3	Jermal	-			3 Kerang	-
					4 Kepiting	-
					5 Bandeng	931
					6 Lain-lain	-

Sumber : Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo, 2004

5.4. Gambaran Desa Segoro Tambak

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan KPEL Kabupaten Sidoarjo (2004), Desa Segoro Tambak sebagai lokasi klaster unggulan hasil pilihan Forum Kemitraan Mina Delta Sidoarjo, merupakan salah satu desa dari 4 (empat) desa yang berada di wilayah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Desa Segoro Tambak terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 5 (lima) Rukun Tetangga (RT). Desa ini berjarak sekitar 8 (delapan) kilometer dari ibukota kecamatan, 22 (duapuluh dua) kilometer dengan ibukota kabupaten dan hampir 30 (tigapuluh) kilometer dengan ibukota propinsi.

Sebagai wadah bagi para petani tambak, selama ini para petani tambak menggunakan Kelompok Tani Mina Sentosa dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Desa Segoro Tambak berdekatan dengan sub terminal Sedati yang menghubungkan angkutan dalam kota dan terminal Bungurasih Surabaya.

Sementara itu akses lain yaitu berupa jalan lingkungan sepanjang 2,5 kilometer yang berada dalam kondisi yang tidak begitu bagus serta jalan desa sepanjang 0,5 kilometer yang langsung terhubung dengan jalan kabupaten sepanjang 2 (dua) kilometer.

5.5. Gambaran Umum Masyarakat Desa Segoro Tambak

Jumlah penduduk Desa Segoro Tambak (KSU, 2004) adalah 1.443 orang dengan komposisi penduduk terdiri dari 656 orang laki-laki dan 787 orang perempuan, dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah total rumah tangga Desa Segoro Tambak berjumlah 453 Kepala Keluarga (KK) dengan 203 KK yang berprofesi sebagai petani tambak. Selebihnya penduduk Desa Segoro Tambak berprofesi sebagai nelayan, pedagang hasil laut, hasil tambak dan pedagang sembako.

Mayoritas petani tambak didominasi oleh kelompok laki-laki dengan usia antara usia 15 sampai dengan 65 tahun. Data ini menunjukkan tingkat kematangan dan pengalaman mereka di bidang usaha tambak dan adanya proses regenerasi di kalangan para petani tambak di Sidoarjo (KSU, 2004).

Berdasarkan data yang diperoleh dari potensi Desa Segoro Tambak (BKBPMP, 2004), tingkat pendidikan di Desa Segoro Tambak didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD). Para petani tambak rata-rata memiliki pengalaman usaha cukup lama yaitu diatas sepuluh tahun dan menggarap pertanian tambak yang merupakan hasil turun temurun keluarganya.

Masyarakat petani tambak yang selama ini aktif dalam Kelompok Tani Tambak Mina Sentosa berjumlah 60 orang. Beberapa prestasi yang berhasil diraih kelompok tani dalam berbagai lomba Intensifikasi Tambak (Intam) diantaranya juara II lomba Intam tingkat kabupaten tahun 1998/1999, juara I lomba Intam tingkat kabupaten tahun 2000 serta juara II lomba Intam tingkat propinsi tahun 2001 (KSU, 2004).

5.6. Karakteristik Usaha

Rata-rata luas lahan usaha para petani tambak adalah 3 (tiga) hektar per pemilik tambak (petani) dengan sebagian besar status lahannya merupakan lahan milik sendiri (KSU, 2004). Sementara jumlah pemilik tambak (BPS dan Bappekab Sidoarjo 2004) yang ada di Desa Segoro Tambak berjumlah 130 petani tambak, dengan luas area tambak secara keseluruhan seluas 545,70 hektar. Sedangkan bagi para petani tambak yang tidak mempunyai lahan menyewa dengan sistem bagi hasil. Penggarapan lahan tambak yang dilakukan para petani menggunakan cara tradisional serta para petani tambak rata-rata menggunakan dua tenaga kerja dalam mengolah lahannya yang didominasi oleh tenaga kerja dari keluarganya sendiri. Kebanyakan tenaga kerja terpilih sudah menggeluti lahan tambak rata-rata lebih dari delapan tahun (KSU, 2004).

Pada pelaksanaan pengelolaan tambak untuk skala rumah tangga di Desa Segoro Tambak digunakan jasa pandega yang bertugas untuk melakukan semua pekerjaan yang menyangkut pertambakan. Berdasarkan data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004 (BPS dan Bappekab Sidoarjo 2004) jumlah

pandega yang ada di Desa Segoro Tambak berjumlah 130 pandega. Jenis pekerjaan yang ditangani pandega antara lain proses penyebaran benih, pembibitan, pemupukan, proses panen dengan upah yang diterima berkisar antara 20 persen hingga 50 persen dari hasil panen tambak. Apabila menggunakan skala industri, rata-rata upah yang digunakan untuk mengelola lahan tambak sekitar Rp 3.400.000,00 dengan perincian upah penanaman sebesar Rp 1.000.000,00, biaya pemeliharaan sebesar Rp 800.000,00, biaya panen sebesar Rp 900.000,00 dan biaya pasca panen sebesar Rp 700.000,00.

Usaha pertambakan yang dilaksanakan oleh para petani tambak termasuk skala menengah dengan omzet usaha yang dihasilkan berkisar antara 15 juta sampai dengan 50 juta per petani tambak. Produk yang dihasilkan para petani tersebut selanjutnya dipasarkan secara lokal maupun ekspor dengan negara tujuan ekspor di antaranya negara-negara di kawasan Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Rata-rata petani tambak dalam memasarkan produknya sudah mempunyai akses pasar dan jaringan sendiri, karena selain berprofesi sebagai petani, mereka juga berprofesi sebagai pedagang. Dengan demikian setelah mereka memanen hasil produksinya mereka langsung memasarkan sendiri produknya. Khusus bagi petani yang berorientasi ekspor, rantai pemasaran mereka berawal dari proses panen yang langsung dibawa ke *cold storage* yang dikirimkan ke pedagang besar untuk kemudian didistribusikan ke distributor.

5.7. Permasalahan Klaster

Permasalahan yang dihadapi para petani tambak tidak jauh berbeda dengan masalah umum yang dihadapi pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Sidoarjo secara umum (Pemerintah Kabupaten Sidaorjo, 2002). Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya produktivitas perikanan dan kelautan, kurangnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, belum dimilikinya sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan perikanan dan kelautan yang efektif dan efisien serta rendahnya teknik pengolahan produk perikanan.

Dari Laporan Pelaksanaan KPEL Kabupaten Sidoarjo (2004), beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para petani tambak yang tergabung dalam klaster perikanan laut dan tambak antara lain penurunan tingkat produksi udang akibat serangan virus, pendangkalan saluran akibat erosi, ketergantungan kepada tengkulak, permasalahan pengemasan dan higienitas.

Adanya stagnasi produksi udang yang disebabkan oleh serangan virus tersebut, hingga saat ini belum ditemukan obat dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Saat ini jenis penyakit udang yang paling ditakuti oleh petani yaitu penyakit redesis, yaitu penyakit yang menyerang jenis udang yang tidak memiliki tulang belakang sehingga tingkat resistensinya rendah. Upaya yang bisa dilakukan petani yaitu dengan mempertahankan kekebalan udang saja, walaupun dengan cara tersebut hanya mampu bertahan sampai paling lama satu setengah bulan.

Sementara seperti disampaikan oleh salah satu pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Jepara berupa proyek uji coba penanganan penyakit udang dengan biaya sebesar 55 (Lima Puluh Lima) juta Rupiah untuk satu tambak. Mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka proyek uji coba tersebut hanya dilakukan di satu lahan tambak saja. Apabila upaya tersebut berhasil, selanjutnya akan dikembangkan dan diaplikasikan ke petani tambak yang lain.

Kendala lain yang muncul yaitu adanya pendangkalan saluran sungai. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Sidoarjo umumnya dan kawasan Desa Segoro Tambak khususnya secara perlahan tumbuh menjadi daerah industri yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi tingkat pencemaran sungai. Padahal air sungai merupakan sumber utama pengairan tambak bagi para petani. Pencemaran tersebut ini sulit ditanggulangi oleh para petani tambak kecuali ada tindakan tegas dari aparat pemerintah setempat bagi perusahaan yang secara sengaja membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Namun hingga saat ini kendala tersebut belum dapat diatasi oleh pemerintah setempat. Dengan demikian program yang harus dibutuhkan oleh petani tambak yaitu normalisasi saluran sungai yang kebanyakan mengaliri tambak-tambak tersebut sebelum akhirnya bermuara ke laut.

Permasalahan berikutnya yaitu keinginan para petani tambak agar terbebas dari perasan tengkulak atau rentenir. Bentuk keterlibatan tengkulak sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak

misalnya pada saat pengadaan pupuk, bibit dan sebagainya. Selain berperan sebagai pemasok, para tengkulak tersebut juga kadang berperan sebagai pedagang yang siap membeli hasil panen petani. Apabila tengkulak tidak mampu membeli produk petani, maka petani langsung membawanya ke pedagang besar. Namun demikian tidak semua tengkulak memiliki akses ke petani. Apabila tengkulak tidak punya akses produksi ke petani, maka petani itu sendiri yang akan menentukan harga untuk kemudian dijual ke pedagang.

Dari sisi permodalan, walaupun para petani tambak selama ini merasa sangat dirugikan tengkulak akibat harga hasil panen yang diperoleh ditentukan tengkulak, namun demikian karena keterbatasan modal yang mereka miliki, mereka menjadi sangat tergantung kepada tengkulak. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang tepat tentang perbankan dan permodalan, antara lain melalui pelatihan tentang permodalan dari pemerintah yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Upaya yang telah dilakukan oleh para petani tambak yaitu munculnya kesepakatan dari mereka untuk mengumpulkan modal bersama untuk mengatasi ketergantungan mereka dengan memfungsikan kembali unit koperasi tani sebagai sarana simpan pinjam bagi para petani.

Sementara upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengatasi permodalan tersebut, yaitu dengan memberikan stimulan kepada petani tambak berupa bantuan bergulir melalui koperasi petani sebesar 15 (lima belas) juta Rupiah per petani yang bisa digunakan bagi pengembangan usaha para petani. Pengembangan usaha tersebut bisa berupa pengadaan benih, pembelian bibit

ikan dan sebagainya sesuai kebutuhan para petani. Selanjutnya petani akan mengembalikannya pada saat panen untuk kemudian digulirkan kepada petani lain yang membutuhkan.

Upaya lain yang dilakukan oleh KSU dalam memperkuat permodalan yaitu dengan berusaha mencari bantuan pendanaan ke Pusat Kelautan ITS melalui Program Kemitraan Bahari (PKB) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pendekatan secara kelembagaan juga dilakukan melalui Ketua Asosiasi *Business Development Services* (BDS) Indonesia, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) bahkan dengan Kadinda Jawa Timur.

BAB VI

TEMUAN DATA

Pada bab ini akan disajikan data-data temuan hasil penelitian dalam implementasi program KPEL di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Data-data tersebut meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kemitraan yaitu pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten), masyarakat (perwakilan petani tambak) dan swasta (KADINDA Jawa Timur dan KADIN Kabupaten Sidoarjo)

6.1. Hasil Wawancara Dengan Pemerintah

6.1.1. Pemerintah Pusat

Sesuai hasil penggalian data yang dilakukan dengan pemerintah Pusat (Kepala Bappenas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah), proses penetapan program KPEL di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada pendekatan yang digunakan KPEL yang dikenal dengan metodologi 13 (tiga belas) langkah KPEL. Langkah tersebut terbagi menjadi tiga yaitu tahap inisiasi, tahap implementasi dan fase kelembagaan. Penetapan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi *pilot project* program KPEL dilakukan langsung oleh Bappenas dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi perikanan yang cukup besar.

6.1.2. Pemerintah Propinsi

Sementara dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat di Bappeprop Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 2005, dikemukakan bahwa:

"Sebenarnya KPEL itu merupakan program Pemerintah Pusat yang dilemparkan kepada daerah dan hasilnya ternyata hanya Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sidoarjo saja yang memberikan respon positif atas program tersebut."

Dukungan yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam program KPEL ini berupa pengalokasian anggaran bagi dana pendampingan KPEL sebesar Rp 190 juta melalui APBD 2006 di Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Selama ini pendampingan tersebut dianggarkan di Bappeprop Jawa Timur. Sementara di instansi pendukung yang terlibat dengan pelaksanaan KPEL, tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan KPEL. Sementara seperti dikemukakan Kasubbid Perdagangan dan Koperasi, untuk menjamin keberhasilan KPEL diperlukan dukungan berbagai instansi terkait, sebagai berikut :

" Padahal untuk menjamin keberhasilan KPEL diperlukan integrasi dari berbagai dinas dan instansi terkait seperti Biro Perekonomian, Dinas Koperasi, PK dan M, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur."

Dukungan lain yang dilakukan Pemprop Jatim berupa pembentukan Tim Pokja KPEL yang bertugas melakukan pembinaan secara periodik kepada klaster KPEL, menjembatani klaster dengan

pasar, membentuk sekretariat dan melaporkan hasil pelaksanaan KPEL kepada Gubernur. Pokja KPEL ini beranggotakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KADINDA Jawa Timur, Ketua Lemlit Universitas Airlangga Surabaya, Ketua Lemlit Institut Sepuluh Nopember Surabaya, Direktur *Regional Economic Development Intittute* (REDI), dan Konsultan Pendamping Program KPEL. Namun demikian, forum tersebut sudah tidak berjalan lagi. Permasalahannya yaitu tidak adanya mitra usaha yang mau diajak bekerjasama terutama dalam hal penyediaan modal, seperti hasil wawancara sebagai berikut :

" Tapi sekarang POKJA KPEL ini sudah tidak berjalan. Problemnya karena kita kesulitan dalam mencari mitra usaha yang bersedia diajak bekerjasama dalam hal penyertaan modal."

Sesuai informasi yang didapatkan dari sumber tersebut, forum ini hanya aktif mengadakan pertemuan selama dua kali saja, dengan pertemuan pertama dihadiri seluruh *stakeholders.* Sementara untuk pertemuan kedua hanya dihadiri sebagian *stakeholders* saja dan tidak dihadiri oleh pihak swasta (KADINDA). Masih dikemukakan oleh pejabat tersebut, dengan mengambil embrio dari konsep KPEL, saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur justru membuat program baru yang disebut *Anti Poverty Program* (APP) yang lebih kuat baik dari sisi finansial maupun komitmen.

6.1.3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Demikian juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pejabat di Bappekab Sidoarjo, kegiatan KPEL yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dengan Desa Segoro Tambak sebagai lokasi KPEL saat ini vakum. Permasalahan yang mendasar sebagaimana dikemukakan oleh staf Bidang Ekonomi Bappekab Sidoarjo yaitu :

" Saat ini kegiatan KPEL di Sidoarjo vakum, karena pejabat yang menangani kegiatan KPEL ini sejak awal, sudah dipindahkan ke instansi lain. Dan hingga kepindahan beliau, tidak ada staf yang diserahi untuk melanjutkan tugas tersebut. Jadi hingga saat ini, tidak ada staf yang tahu secara detail perkembangan KPEL dari awal. Jadi sekarang kita kita hanya menunggu petunjuk lebih lanjut saja".

Selain itu, kevakuman program tersebut juga karena tidak adanya alokasi anggaran bagi kegiatan ini, seperti dikemukakan sebagai berikut :

" Sebetulnya kendala kami adalah tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan pendampingan KPEL ini. Karena dana-dana pembangunan saat itu lebih diprioritaskan bagi proses pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan bersamaan dengan program KPEL. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dananya di *drop* atau bahkan dihilangkan."

Sementara sebagaimana dikemukakan oleh salah satu pejabat dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo (sesuai hasil wawancara tanggal 7 Nopember 2005) yang hadir pada saat penentuan klaster bandeng dan udang ditetapkan, yang hadir saat itu yaitu Bappekab, Dinas Perikanan, KSU dan perwakilan petani tambak Desa Segoro Tambak.

Pada saat proses identifikasi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang tergabung dalam Forum Kemitraan Delta Mina dan dibantu oleh KSU, klaster yang diidentifikasi antara lain tempe, krupuk, tahu dan perikanan, sebagaimana hasil wawancara berikut :

" Pada saat proses identifikasi yang dilakukan oleh KSU dan Dinas-dinas yang tergabung dalam Forum Kemitraan seperti Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Bappekab, kandidat klaster yang diidentifikasi yaitu klaster-klaster unggulan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Klaster-klaster tersebut antara lain tempe, kerupuk, tahu dan perikanan. Pada saat klaster tambak dan udang ditetapkan sebagai klaster terpilih tidak muncul *complain* dari klaster-klaster yang lain *kok*..."

Masih berdasarkan informasi tersebut, pihak swasta hanya hadir di awal pembentukan Forum Kemitraan Mina Delta saja. Walaupun reaksi Kadin Kabupaten Sidoarjo saat itu menyatakan akan menyanggupi untuk membantu pelaksanaan KPEL, tetapi mereka tidak pernah hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan yang dilakukan oleh forum ini hanya sekitar dua hingga tiga kali saja, selebihnya mereka tidak pernah mengadakan pertemuan lagi.

Sementara yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam mengatasi permasalahan klaster seperti penanganan penyakit udang serta permasalahan permodalan yang dihadapi petani yaitu dengan mengadakan uji coba tambak dan memfasilitasi petani dengan memberikan bantuan kredit bergulir, seperti dikemukakan sebagai berikut :

" Hingga saat ini Dinas Perikanan telah melakukan upaya penanganan penyakit udang dengan mengadakan proyek uji coba penanganan

penyakit udang yang merupakan kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Lembaga Pengembangan Mutu Hasil Perikanan (LPMHP) Jepara. Apabila program ini berhasil maka selanjutnya akan diaplikasikan ke petani. Untuk mengatasi permodalan yang dihadapi petani, Dinas Perikanan memberikan bantuan berupa dana bergulir yang diperuntukkan bagi petani. Bantuan tersebut selanjutnya dapat dibayarkan pada saat petani panen, yang kemudian digulirkan lagi ke petani lain yang membutuhkan."

Upaya tersebut juga dilakukan Dinas Perikanan untuk mengatasi ketergantungan petani kepada tengkulak. Karena dengan membeli benih atau meminjam modal dari tengkulak, harga lebih ditentukan oleh tengkulak dengan harga tinggi. Dengan demikian petani akan dirugikan, karena keuntungan yang didapatkan petani menjadi kecil.

6.2. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak, desa tersebut dijadikan lokasi KPEL karena dianggap mampu terutama sisi kelembagaannya. Indikasi tersebut bisa dilihat dari adanya wadah bagi para petani yang direpresentasikan melalui kelompok tani dan koperasi tani, sebagaimana hasil wawancara berikut :

" Desa Segoro Tambak dijadikan *pilot project* program KPEl karena di sini ada kelompok tani dan koperasi tani sebagai simbol organisasi kelembagaannya. Dan setelah KSU melakukan survei (*based line survey*) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, maka klaster bandeng dan udang yang ada Desa Segoro Tambak ditetapkan sebagai klaster terpilih pelaksanaan program KPEL di Kabupaten Sidoarjo."

Pada saat pembentukan Forum Kemitraan Delta Mina, forum tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) dinas/instansi dan klaster terpilih hasil *based line*

survey yaitu klaster bandeng dan udang yang kemudian disepakati menjadi klaster perikanan laut dan tambak.

Penetapan Desa Segoro Tambak sebagai lokasi program KPEL dilakukan tanpa menunggu tanggapan dari masyarakat Desa Segoro Tambak atas penetapan tersebut. Kondisi tersebut diperkuat oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak (sesuai hasil wawancara tanggal 4 Desember 2005) yang mengatakan bahwa, "Tahu-tahu kami sudah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan diinformasikan bahwa di Desa Segoro Tambak akan dilaksanakan program KPEL."

Persepsi masyarakat yang muncul tentang program KPEL ini adalah program ini adalah program pemerintah yang tidak ada "juntrungannya" dan kontribusi yang dihasilkan hingga sekarang masih minim. Saat ini aktivitas yang dilakukan petani berjalan sesuai dengan kreativitas masing-masing petani, seperti hasil wawancara sebagai berikut :

" Saat ini program KPEL ini *gak* ada *juntrungannya* karena kontribusi yang dihasilkan sedikit dan sekarang petani melakukan aktivitasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing petani."

Forum Kemitraan Delta Mina yang melibatkan masyarakat saat itu hanya dilakukan sekitar dua kali saja dengan pertemuan awal dihadiri oleh seluruh *stakeholders* baik dari unsur pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten) maupun swasta. Sementara untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak dihadiri seluruh *stakeholders* apalagi pihak swasta.

Adanya forum yang vakum menurut masyarakat lebih disebabkan karena kesibukan KSU dan ketidaksinkronan program antara Dinas Perikanan dan Dinas Perindag Kabupaten Sidoarjo, seperti hasil wawancara berikut :

"Seharusnya untuk mengatasi kesulitan akses pasar yang dialami masyarakat, program-program Dinas Perikanan disinkronkan dengan Dinas Perindag, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi."

Adanya Forum Reboan yang ada di masyarakat sebetulnya sudah muncul jauh sebelum program KPEL ini dilaksanakan di Desa Segoro Tambak, karena sebetulnya tradisi "ngumpul" ini sudah membudaya di masyarakat seperti diungkapkan Ketua Kelompok Tani sebagai berikut :

" Forum Reboan itu *khan* sebetulnya memang terbentuk pada saat KPEL dilaksanakan di Desa Segoro Tambak saja. Namun tradisi *ngumpul* yang dilaksanakan masyarakat petani sudah berlangsung lama, jauh sebelum program KPEL ini dilaksanakan di sini. Minimal dalam setahun kami mengadakan acara *ngumpul-ngumpul* itu tiga kali atau sesuai kebutuhan, terutama apabila ada permasalahan yang cukup *urgent* dan dianggap perlu penanganan segera."

Sementara posisi Bappekab Sidoarjo yang seharusnya memegang peranan penting dalam program ini, tidak merespon dan tidak melakukan tindak lanjut apapun. Yang dilakukan yaitu dengan mengakomodir keinginan melalui fasilitasi pada saat pertemuan/rapat. Bahkan di kalangan masyarakat beredar persepsi bahwa seolah Bappekab cuci tangan dengan kondisi tersebut seolah dengan mengatakan bahwa, " Ini bukan program "saya" *kok..*"

Sebetulnya masyarakat bisa merasakan dampak positif yang diperoleh dari program KPEL ini yaitu meningkatnya inovasi dan motivasi masyarakat dalam melakukan aktivitas pertambakan. Namun sebenarnya masyarakat petani lebih

membutuhkan program yang lebih komprehensif. Program tersebut meliputi dorongan minat yang diikuti dengan pembinaan yang mampu meningkatkan produksi dan SDM masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan penguatan modal dan akses pasar, sesuai hasil wawancara berikut :

" KPEL sebetulnya diharapkan masyarakat memenuhi keinginan masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat tentang program yang komprehensif. Program tersebut meliputi dorongan minat yang diikuti dengan pembinaan yang aplikatif yang mampu meningkatkan proses produksi masyarakat dan meningkatkan SDM petani. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan penguatan modal dan kemudahan akses pasar. Namun program KPEL ini baru sebatas mampu meningkatkan dorongan minat masyarakat saja, dan tidak sampai tahap kemudahan akses pasar."

Menurut informasi yang diperoleh dari Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak, masalah pembinaan yang dialami masyarakat sebetulnya merupakan permasalahan dilematis. Karena masalah tersebut sebenarnya merupakan wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang dianggarkan melalui dana APBN. Namun pada saat masyarakat membutuhkan program tersebut, Dinas Perikanan tidak mampu menganggarkan melalui APBD karena kegiatan tersebut memang dianggarkan melalui APBN seperti yang diungkapkan masyarakat sebagai berikut :

" Sebetulnya petani sangat membutuhkan fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh para penyuluh. Kegiatan yang pernah dilakukan yaitu INBUDKAN (Intensifikasi Budidaya Ikan). Namun saat ini Dinas Perikanan mengalami permasalahan dilematis, karena kegiatan tersebut dianggarkan oleh APBN bukan oleh APBD."

Ketergantungan petani kepada tengkulak tidak hanya berbentuk modal, tetapi bisa juga pada saat pengadaan pupuk, bibit maupun benih. Tengkulak bisa

berperan sebagai pemasok, pedagang ataupun pembeli, sebagaimana dijelaskan Ketua Kelompok Tani berikut :

" Keterlibatan tengkulak tidak hanya pada saat petani membutuhkan modal saja. Tetapi juga pada saat pengadaan pupuk, benih dan bibit yang dibutuhkan petani. Jadi tengkulak juga bisa berperan sebagai pemasok bahan-bahan yang dibutuhkan petani tersebut, penjual atau pembeli."

Menurut masyarakat, peran tengkulak lebih bersifat *conditional*. Karena pada saat tertentu dia bisa membeli hasil panen petani (berperan sebagai pembeli) yang dilanjutkan oleh tengkulak ke pedagang besar. Pada saat tengkulak tidak mampu membeli, maka petani akan langsung membawa ke pedagang besar, tanpa melalui tengkulak.

Menyikapi keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan PILKADA, masyarakat lebih bersikap tidak mau tahu sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

" Kita *gak* mau tahu ada PILKADA atau tidak. Karena itu urusan politis. Yang lebih penting bagi kami, seharusnya bagaimana program ini bisa berjalan. Seharusnya pemerintah berpikir ke arah itu."

Walaupun pihak swasta mempunyai potensi yang cukup besar pada proses pemasaran, terutama pada proses pemasaran produk-produk ekspor, namun keterlibatan kelompok pengusaha menurut masyarakat dalam implementasi program KPEL ini sangat minim. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara berikut :

" Peran swasta dalam program KPEL ini hampir tidak ada. Padahal mereka sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar apabila mau bermitra dengan petani tambak. Karena produk-produk kami *khan* ada yang beorientasi ekspor. *Nah,* di situ sebetulnya mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut. Namun

kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan. Hingga saat ini petani sidah memiliki rantai pemasaran sendiri. Dengan demikian tanpa keterlibatan swasta pun dalam proses pemasaran produksi sebetulnya tidak masalah bagi petani."

Demikian juga peran perbankan dalam implementasi KPEL di Desa Segoro Tambak. Bagi masyarakat setempat, fungsi mediasi perbankan hampir tidak menyentuh petani. Padahal sebetulnya mereka sangat membutuhkan keberadaan mereka, terutama dalam hal penyertaan modal, sebagaimana hasil wawancara berikut :

" Sebetulnya melalui KPEL kami mengharapkan bisa menjawab kebutuhan petani atas modal. Namun hingga saat ini fungsi perbankan hampir tidak menyentuh kebutuhan petani. Seharusnya persyaratan pengajuan modal yang diberikan petani tidak disamakan dengan syarat pengajuan modal sebagaimana umumnya. Perlu ada pengecualian bagi petani, karena ada syarat-syarat tertentu dalam pengajuan modal yang tidak bisa dipenuhi petani. Peran perbankan selama KPEL hanya pada saat pelatihan saja, tetapi setelah itu tindak lanjutnya tidak ada sama sekali."

Menanggapi tentang kevakuman Forum Kemitraan Delta Mina, masyarakat menunjukkan sikap *wait and see.* Kalaupun program KPEL di Desa Segoro Tambak ini diaktifkan kembali, masyarakat menyatakan *welcome,* sebagaimana pernyataan berikut :

" Seandainya program KPEL ini dilaksanakan kembali di sini, kami *sih welcome* saja. Sekarang masyarakat lebih memilih untuk bersikap *wait and see* atas program KPEL ini. "

Sementara sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Segoro Tambak, sebetulnya mereka menginginkan ada kontribusi nyata dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga Desa Segoro Tambak tidak merasa dieksploitasi melalui berbagai program-program pemerintah yang

dilaksanakan dan melalui berbagai penelitian yang selalu dilaksanakan di desa tersebut, seperti hasil wawancara berikut ini :.

" Masyarakat itu *pinginnya* pemerintah jangan hanya janji-janji saja, tapi tidak ada bukti. *Kok* setiap ada penelitian dan implementasi program-program baru, Desa Segoro Tambak selalu dijadikan tujuan dan rujukan. Mungkin karena memang kami sering mendapatkan penghargaan dan juara di setiap perlombaan kelompok tani. Sementara kontribusi bantuan pemerintah tidak pernah ada. Jadi kami jangan selalu dijadikan obyek dan eksploitasi pemerintah saja."

Padahal sebetulnya harapan masyarakat Desa Segoro Tambak yaitu terbebasnya mereka dari tengkulak. Bantuan yang lebih mereka harapkan berupa bantuan modal, sebagaimana harapan berikut :

" Masyarakat itu sebenarnya saat ini lebih membutuhkan bantuan modal agar bisa terbebas dari tengkulak. Bagaimana mungkin memikirkan kebutuhan sehari-hari kalau hari ini panen besok untuk membayar hutang ke tengkulak?"

Sementara itu pada saat dikonfirmasi apakah bantuan modal yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo (sebagaimana hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo), masyarakat di Desa Segoro Tambak menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut, seperti diungkapkan Sekretaris Desa sebagai berikut, " Kami *gak* pernah menerima bantuan sebesar Rp 30 juta yang berbentuk modal bergulir yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada kami *kok*..."

6.3. Hasil Wawancara Dengan Swasta

Minimnya keterlibatan swasta dalam implementasi program KPEL, mengakibatkan minimnya pula data yang diperoleh dari hasil wawancara ini.

Dari respon pihak swasta yang tergabung dalam KADIN dan KADINDA Jawa Timur pada saat diundang dalam proses sosialisasi dan pada saat pembentukan Forum Kemitraan baik yang ada di tingkat propinsi maupun kabupaten, pada awalnya mereka menunjukkan respon positif seperti pernyataannya sebagai berikut :

" Kami mengapresiasi dan mendukung program KPEL ini karena secara konsep program ini cukup baik. Namun kami perlu untuk mengetahui lebih lanjut berapa anggaran yang dianggarkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk program ini."

Setelah mengkonfirmasi jumlah alokasi anggaran untuk program KPEL, selanjutnya mereka mengatakan mensinergikan program tersebut dengan program-program mereka. Namun di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka tidak pernah hadir dan menunjukkan apresiasi atas aprogram KPEL tersebut. Dari hasil konfirmasi dengan KADIN dan KADINDA diperoleh informasi bahwa minimnya apresiasi dan dukungan mereka atas pelaksanaan program KPEL ini karena minimnya keuntungan yang diperoleh. Sehingga antara biaya yang dikeluarkan pihak swasta dengan keuntungan yang diperoleh dari program ini tidak sepadan, seperti hasil wawancara berikut :

" Kami memutuskan untuk tidak terlibat lebih lanjut tentang program KPEL ini baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten, karena keuntungan yang kami peroleh dari program tersebut tidak seimbang dengan biaya yang kami keluarkan. Dari sisi perhitungan bisnisnya, kami lebih merasa rugi daripada mendapatkan untung. Selain itu dari beberapa program yang kami miliki ternyata sulit untuk disinergikan dengan program KPEL ini."

6.4. Hasil Wawancara dengan KSU dan PSU

Sesuai hasil wawancara dengan KSU dan PSU, dengan adanya kevakuman program KPEL ini, KSU sedang mengupayakan adanya dukungan dana dalam rangka penguatan Koperasi Mina Delta. Dukungan perbankan dalam program KPEL ini sangat minim, karena pada saat mereka diundang untuk hadir dalam forum-forum pertemuan KPEL mereka mau hadir. Namun demikian mereka tidak menunjukkan komitmennya sama sekali, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :

" Saat ini kami KSU sedang melakukan upaya-upaya dukungan dana dengan mencari *sponsorship* untuk menguatkan keberadaan koperasi Mina Delta di Desa Segoro Tambak.".

Upaya lain yang dilakukan KSU selama program KPEL tersebut adalah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat setempat. Namun demikian hal tersebut tidak diikuti dengan adanya tindak lanjut yang positif dari pemerintah dan hanya janji-janji saja. Pertemuan tersebut justru memunculkan *gosip* tidak sedap yang membuat hubungan KSU dan pemerintah menjadi tidak harmonis, seperti diungkapkan KSU sebagai berikut :

" Pada saat upaya fasilitasi yang saya lakukan yaitu dengan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan kelompok tani, hasilnya bantuan tidak muncul. Tetapi justru *gosip* yang memicu konfrontasi antara KSU dan pemerintah. Dengan demikian kita selalu ber *negative thinking* satu sama lain."

Dampak program KPEL bagi masyarakat menurut KSU antara lain meningkatnya potensi dan motivasi masyarakat, sebagai berikut :

" Sebenarnya dengan adanya program KPEL ini, masyarakat menjadi lebih termotivasi, sehingga memunculkan kreasi-kreasi baru. Kreasi tersebut antara lain intensifikasi tambak dan munculnya inovasi bandeng tanpa duri. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya *sponsorship* keuangan, karena hingga saat ini belum ada respons dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang sanggup menjadi sponsor di bidang keuangan."

Forum Reboan yang menjadi ajang rutin bagi petani, menurut KSU merupakan forum yang bertujuan untuk menyerap aspirasi para petani dan mengakomodir problem-problem yang dihadapi petani. Namun demikian menurut KSU forum tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga forum tersebut terkesan *mubazir*, seperti diungkapkan berikut ini:

" Forum Reboan lebih merupakan forum aspirasi bagi para petani dan forum yang mengakomodir problem-problem yang dihadapi petani. Tetapi problem-problem tersebut selanjutnya hanya sekedar ditampung dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga forum ini terkesan *mubazir*."

Menurut KSU, respon yang ditunjukkan pemerintah atas program tersebut juga negatif, seperti hasil wawancara berikut :

" Respon pemerintah atas program ini negatif, misalnya pada saat KSU mengajukan diselenggarakannya studi banding ke Gresik yang diikuti para petani. Selain itu pada saat ada pertemuan-pertemuan dengan petani, pemerintah hanya menjanjikan akan memberikan bantuan tapi tidak pernah terealisir. Padahal di setiap perlombaan, Desa Segoro Tambak selalu menang, tetapi tidak pernah dapat bantuan."

BAB VII

POLA KEMITRAAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (KPEL)

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut tentang pola partnership dalam implementasi program KPEL yang diawali dengan latar belakang kemitraan di Desa Segoro Tambak, dilanjutkan dengan inisiatif munculnya kemitraan, pihak yang terlibat dan dilibatkan, waktu pelaksanaan kemitraan, pola kemitraan dalam implementasi KPEL di Desa Segoro Tambak, kemitraan dan perkembangan usahanya serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

7.1. Latar Belakang Pola Kemitraan

Sebagai tahap awal implementasi KPEL di Kabupaten Sidoarjo, dilakukan proses inisiasi yang terdiri dari sosialisasi, pelatihan kader KPEL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Bappenas) dan proses penentuan klaster. Setelah melalui proses sosialisasi program KPEL di tingkat nasional yang diikuti sosialisasi di tingkat propinsi dan kabupaten, dan seleksi serta pelatihan kader KPEL, selanjutnya dilakukan proses penentuan klaster di tingkat Kabupaten Sidoarjo. Proses penetapan klaster tersebut dilakukan agar terdapat fokus pengembangan kegiatan melalui klaster terpilih. Setelah melalui proses identifikasi klaster yang dilakukan oleh para *stakeholders* daerah yang tergabung di dalam Forum Kemitraan Delta Mina, akhirnya terpilih klaster yang akan dikembangkan oleh Kabupaten Sidoarjo yaitu klaster bandeng dan udang.

Walaupun pada saat proses identifikasi melibatkan klaster-klaster unggulan lain di Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat penetapan klaster bandeng dan udang di Desa Segoro Tambak sebagai klaster terpilih program KPEl, klaster yang lain tidak mengajukan *complain*. Selain itu, proses penetapan tersebut dilakukan tanpa meminta tanggapan dan persetujuan dari kelompok tani Desa Segoro Tambak. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak (sesuai hasil wawancara tanggal 4 Desember 2005) yang mengatakan bahwa, "Tahu-tahu kami sudah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan diinformasikan bahwa di Desa Segoro Tambak akan dilaksanakan program KPEL."

Sesuai dengan Panduan Implementasi KPEL (Bappenas, 2003) dan definisi kemitraan itu sendiri (Crawford, 2002) sebagai sebuah kerjasama yang dikarakteristikan dengan adanya kemauan untuk berbagi peran dan tujuan, saling percaya serta keinginan untuk bernegosiasi, maka konsep kemitraan yang terdapat di dalam program KPEL dipersepsikan menguntungkan semua pihak. Karena konsep kemitraan yang di maksud dalam program KPEL ini melibatkan seluruh komponen masyarakat bagi terciptanya pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada peran serta seluruh sumber daya lokal yang ada. Apabila didasarkan pada elemen-elemen keberhasilan kemitraan itu sendiri yang terdiri dari *mutual trust, mutual support, join decision making, resiprocal accountability* serta *transparency* (Crawford, 2002), maka pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan pola kemitraan ini belum mampu memberikan peningkatan peran atas tiga pilar ekonomi yaitu antara pemerintah,

masyarakat dan swasta. Fakta adanya proses penetapan yang tidak banyak melibatkan masyarakat dan banyak didominasi pemerintah memperkuat pendapat tersebut. Kondisi tersebut terlihat pada saat proses penetapan klaster terpilih dan pada saat proses identifikasi klaster-klaster unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Berangkat dari indikator kemitraan itu sendiri, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dan tidak munculnya proses negosiasi dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Sidoarjo.

7.2. Inisiatif Munculnya Kemitraan

Kemitraan dalam implementasi KPEL (Bappenas, 2003) bermula dari inisiatif Pemerintah Pusat (Bappenas) yang didukung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United Nations Centre for Human Settlement* (UNCHS). Beberapa kondisi yang mendasari lahirnya konsep kemitraan yang kemudian disebut dengan kemitraan KPEL (KPEL *Stakeholders Partnership*) antara lain (Bappenas, 2003) karena banyaknya kegagalan yang terjadi dari beberapa pola kemitraan sebelumnya, terutama konsep kemitraan usaha. Padahal kemitraan seyogyanya terjadi secara alamiah yang didasarkan pada prinsip sukarela, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Dengan kata lain, kemitraan dalam wujudnya tidak dapat dianjurkan melalui *moral suasion* atau dipaksakan oleh salah satu pihak. Berdasarkan kondisi tersebut, Bappenas mengintrodusir sebuah pendekatan baru dalam bentuk kemitraan fungsional yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta Untuk mencapai tujuan tersebut kemitraan KPEL memiliki 3 (tiga) atribut yaitu

pertama, *economic of scale,* di mana kemitraan ditempuh sebagai upaya untuk mendapatkan nilai tambah dan menciptakan kemanfaatan ekonomi maupun sosial (*social and economic benefit).* Kedua, *economic of speed* artinya kemitraan yang ditempuh akan memperpendek suatu proses penciptaan dan pengembangan nilai dan ketiga, *network effect* yaitu kemitraan yang dijalankan pada akhirnya dapat membentuk suatu jaringan kerja yang dapat menciptakan sebuah kombinasi teknologi, kapasitas atau kompetensi dan budaya yang memungkinkan adanya aplikasi baru yang *multipurpose.* Selain itu, motif lain yang mendasari kemitraan tersebut yaitu adanya upaya pendekatan yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam memperkuat keterkaitan (*linkages)* desa dan kota untuk meningkatkan keterpaduan wilayah pedesaan dengan salah satu pendekatan yang ditawarkan yaitu *Poverty Alleviation Through Rural Urban Linkages* (PARUL). Karena melalui pendekatan PARUL inilah kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pengembangan kemitraan (antara pemerintah, masyarakat dan swasta), permintaan pasar dan pengembangan klaster aktivitas ekonomi dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo pada tanggal 17 Nopember 2005, proses penetapan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi *pilot project* dilakukan oleh Bappenas dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Penetapan tersebut didasarkan pada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam program KPEL yang salah satunya

memusatkan perhatian pada klaster aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan komoditas ekspor serta berorientasi pada permintaan pasar (*market demand)* terhadap perencanaan dan pengembangan ekonomi lokal. Pada akhirnya setelah melalui proses identifikasi dan informasi, klaster bandeng dan udang disepakati menjadi klaster perikanan laut dan tambak yang berlokasi di Desa Segoro Tambak ditetapkan sebagai klaster terpilih.

Pada proses identifikasi klaster tersebut dilakukan sejumlah pemilihan komoditas/sektor usaha unggulan lokal yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo yang berdasarkan atas informasi dan pertimbangan daerah serta masukan dari forum *stakeholders.* Sementara dalam proses informasi dilakukan pengumpulan informasi klaster mengenai tinjauan wilayah (informasi geografis dan fisik, kebijakan pembangunan dan ekonomi, situasi infrastuktur, kondisi sosial ekonomi serta sumber daya manusia dan kapasitas manajemen), tinjauan ekonomi (aktivitas ekonomi dan kecenderungannya, komoditas utama dan ekspor, pekerjaan utama dan penggunaan lahan), data klaster (kontribusi pada PDRB, produk turunan yang dapat diproduksi secara lokal, profil ekspor, investasi, kebijakan, *stakeholders* serta institusi yang mendukung), evaluasi klaster (potensi pasar, potensi sukses, dampak bagi kemiskinan, pelipatgandaan ekonomi) dan rekomendasi.

7.3. Pihak yang Terlibat dan Dilibatkan Dalam Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Pada implementasi kemitraan program KPEL di Kabupaten Sidoarjo, pihak yang dilibatkan yaitu para *stakeholders* yang tergabung dalam Forum Kemitraan Delta Mina. Forum tersebut beranggotakan dinas/instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Bappeda Kabupaten Sidoarjo, swasta (KADIN Kabupaten Sidoarjo) dan perbankan. Dengan demikian pihak yang terlibat dalam kemitraan pengembangan ekonomi lokal di Desa Segoro Tambak yaitu pemerintah (yang terdiri dari dinas/instansi di Kabupaten Sidoarjo), swasta (pihak pengusaha) dan masyarakat (petani tambak). Beberapa institusi lain yang dilibatkan dalam program ini yaitu lembaga keuangan bank, non bank dan perguruan tinggi.

Sementara itu fungsi mediasi dan fasilitasi dilakukan oleh fasilitator KPEL. Proses perekrutan fasilitator atau kader PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal) ini dilakukan dan diseleksi langsung oleh Bappenas yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2003. Penyeleksian fasilitator (PSU dan KSU) atau biasa disebut juga dengan kader Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ini merupakan bagian dari 13 (tiga belas) langkah metodologi KPEL. Ketiga belas langkah tersebut merupakan pendekatan dari program KPEL ini. Tujuan dari proses penyeleksian dan pemilihan ini yaitu untuk memilih perintis untuk dijadikan kader PEL yang memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk memfasilitasi pengenalan KPEL di daerah.

Namun demikian Forum Kemitraan yang ada di tingkat kabupaten maupun propinsi tersebut sama-sama tidak berjalan dan hanya aktif mengadakan pertemuan di awal pelaksanaan program KPEL saja. Permasalahan yang mendasar yaitu tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan tersebut. Sehingga dalam prakteknya pihak yang terlibat pada kemitraan tersebut hanya pemerintah (Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Bappekab Sidoarjo) dan masyarakat (petani tambak) saja. Sementara minimnya keterlibatan swasta lebih disebabkan pada tidak seimbangnya antara *cost* dan keuntungan yang diterima. Untuk institusi pendukung lainnya (salah satunya perbankan) dukungan hanya sebatas pada saat pemberian materi permodalan dan tidak menunjukkan komitmen apapun dengan kebijakan kemudahan memperoleh kredit bagi masyarakat petani tambak. Sementara yang timbul di tingkat fasilitator justru hubungan yang tidak harmonis antara KSU sebagai fasilitator, pemerintah (karena minimnya dana) dan masyarakat.

7.4. Waktu Pelaksanaan Kemitraan

Kemitraan yang ada di Desa Segoro Tambak merupakan bagian dari implementasi program KPEL yang dilaksanakan sejak bulan April 2003. Pertemuan Forum Kemitraan Mina Delta ini dilaksanakan sejak April 2003 dan secara rutin melaksanakan pertemuan minimal setiap dua bulan sekali. Sementara Forum Reboan yang merupakan forum bentukan para petani tambak itu sendiri telah rutin mengadakan pertemuan jauh sebelum program KPEL dilaksanakan di Desa Segoro Tambak.

Pada saat program KPEL masih berjalan di Desa Segoro Tambak, forum ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan mengundang para *stakeholders* yang terkait. Tetapi kehadiran seluruh *stakeholders* baik dalam Forum Kemitraan maupun Forum Reboan tersebut tidak bertahan lama dan hanya *intens* hadir di awal pelaksanaan KPEL saja. Pada pihak swasta ketidakhadiran mereka di forum-forum KPEL selanjutnya lebih disebabkan minimnya keuntungan yang mereka peroleh dari program tersebut. Sementara di tingkat pemerintah permasalahan mendasar terletak pada minimnya alokasi dana pendukung kegiatan KPEL. Seperti disampaikan oleh salah seorang staf di Bidang Ekonomi Bappekab Sidoarjo, tidak adanya alokasi dana tersebut selain disebabkan kendala teknis seperti tidak adanya mitra usaha yang bersedia dijadikan *partner* usaha dan kendala politis seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Sidoarjo yang membutuhkan banyak dana. Dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang ditunda pelaksanaannya atau bahkan dihilangkan.

Setelah program ini mulai vakum pada akhir 2004, baik Forum Kemitraan Mina Delta maupun Forum Reboan tidak dilaksanakan lagi. Namun demikian, walaupun kedua forum tersebut vakum, hingga saat ini pada saat-saat *urgent* dan diperlukan, masyarakat petani masih meneruskan tradisi "ngumpul" yang sudah membudaya dan berlangsung jauh sebelum program KPEL dilaksanakan di Desa Segoro Tambak. tersebut. Tradisi ini bertujuan untuk membicarakan, mengakomodir dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi para petani.

7.5. Pola Kemitraan Dalam Implementasi Program KPEL di Desa Segoro Tambak

Dalam kemitraan KPEL (Bappenas, 2003), dikembangkan prinsip-prinsip yang akan mendasari ruang geraknya yaitu pertama, kesetaraan pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan yang memiliki karakteristik (peranan, nilai, pengetahuan, ketrampilan dan sumberdaya) yang berbeda. Di awal perkembangan forum kemitraan KPEL proses penyetaraan yang mengedepankan ukuran nilai pengetahuan, ketrampilan dan proporsional keterwakilan dari masing-masing unsur yang terlibat dalam kemitraan merupakan sesuatu yang seyogyanya harus dilakukan. Dengan demikian, kesetaraan tersebut menyangkut kehormatan bukan kekuasaan. Kedua, transparansi yaitu prinsip keterbukaan dalam kerjasama untuk menghasilkan fondasi yang kuat bagi tumbuhnya saling percaya (*trust*). Hal ini bertujuan agar jangan sampai timbul adanya *hidden agenda* yang mampu memicu munculnya kecurigaan pada semua pihak. Ketiga, saling menguntungkan (*symbiose mutualism*) yaitu bahwa kemitraan yang dilakukan hendaknya mampu memberikan ruang bagi perolehan manfaat ekonomi maupun sosial bagi setiap mitra. Jika salah satu pihak yang bermitra tidak memperoleh manfaat dalam porsi yang tidak seimbang, maka di kemudian hari salah satu mitra akan mengundurkan diri (*exit*). Kemitraan KPEL diharapkan mampu merekonstruksi ulang peran pemerintah, masyarakat dan swasta dan merajut kembali tali kebersamaan dalam pembangunan ekonomi lokal. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam membangun forum kemitraan KPEL yaitu tahap pengenalan

(*initiation*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelembagaan (*institutionalized*).

Sebagai bagian dari strategi KPEL, forum kemitraan yang terbentuk harus melibatkan seluruh *stakeholders* untuk berdialog mengenai pembangunan ekonomi. Melalui forum ini seluruh *stakeholders* berpartisipasi dalam perencanaan pemerintah, formulasi kebijakan, penyampaian dan pembuatan keputusan. Selain itu munculnya klaster komoditas yang telah disepakati diharapkan pula mampu mendorong forum kemitraan tersebut untuk menstimulasikan kegiatan ekonomi sebagai suatu alat untuk menciptakan kesempatan peningkatan pendapatan.

Sebagai wujud dan dorongan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi lokal (PSU, 2004), di tingkat Propinsi Jawa Timur dibentuk Forum Kemitraan dengan nama POKJA KPEL (Kelompok Kerja KPEL). Forum ini beranggotakan dinas/instansi di lingkungan pemerintah Propinsi, dunia usaha (KADIN), LSM (*Regional Economic Development Institute*/REDI), akademisi (Unair dan ITS) serta KSU. Keberadaan forum ini telah dilegal formalkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/173/KPTS/013/2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Kelompok Kerja (Pokja) KPEL Propinsi Jawa Timur. Dukungan lain yang diberikan yaitu dukungan dana yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 serta dukungan lain seperti fasilitasi atas berbagai kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh POKJA KPEL.

Kegiatan tersebut antara lain seminar dan lokakarya (semiloka) mengenai implementasi program KPEL di Jawa Timur, diskusi panel mengenai peran

partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengadakan pertemuan antara masyarakat petani tambak dengan Dinas Koperasi tingkat propinsi untuk mendorong penggalian sumber dana guna membantu permodalan di Desa Segoro Tambak serta studi banding ke Manado untuk melihat dan mempelajari pelaksanaan Forum Kemitraan Nyiur Melambai. Apabila alokasi dana pendamping yang pada awal pelaksanaan KPEL dianggarkan di instansi Bappeprop, maka mulai tahun 2006 alokasi dana pendamping kegiatan KPEL dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur.

Masalah yang menghambat pelaksanaan KPEL di tingkat Propinsi yaitu tidak adanya mitra usaha yang bersedia diajak bekerjasama dalam penyediaan modal. Sementara pihak swasta yang pada awalnya tampak mengapresiasi program tersebut, pada akhirnya tidak menunjukkan komitmennya sama sekali. Problem ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari program KPEL ini tidak sesuai dengan harapan kalangan pengusaha. Apalagi dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi untuk kegiatan KPEL ini minim, sehingga membuat pihak swasta mengurungkan kemitraan tersebut.

Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo (Laporan Program KPEL Kabupaten Sidoarjo, 2004) telah dibentuk Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo yang beranggotakan berbagai *stakeholders* seperti dinas instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan perbankan yang berfungsi memberikan alternatif solusi terhadap semua persoalan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan klaster. Namun demikian Forum Kemitraan yang ada di tingkat kabupaten maupun propinsi tersebut sama-sama tidak berjalan dan hanya aktif

mengadakan pertemuan di awal pelaksanaan program KPEL saja. Permasalahan yang mendasari hal tersebut yaitu tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan tersebut. Tidak adanya alokasi dana tersebut selain disebabkan kendala teknis seperti tidak adanya mitra usaha yang bersedia dijadikan *partner* usaha, juga karena adanya kendala politis.

Namun demikian, kegiatan tersebut hanya terjadi di awal implementasi KPEL di Desa Segoro Tambak. Karena sejak awal tahun 2005, kegiatan KPEL yang ada di Desa Segoro Tambak mulai vakum dan tidak berpengaruh banyak terhadap kelangsungan usaha mereka. Aktivitas kemitraan di Desa Segoro Tambak yang pada awalnya mampu memicu potensi dan menumbuhkan inovasi selanjutnya tidak memberikan kontribusi lebih bagi usaha mereka. Yang menjadikan klaster tersebut masih eksis dan mandiri yaitu sebelum Desa Segoro Tambak dijadikan klaster terpilih implementasi KPEL di Kabupaten Sidoarjo, desa tersebut sudah cukup produktif dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan pertambakan. Sehingga tanpa adanya kegiatan KPEL pun aktivitas pertambakan tetap eksis. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak yang mengatakan bahwa program KPEL tersebut merupakan program *bottom up* yang merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang bagi para petani "hanya cukup" berfungsi sebagai motivator yang mampu meningkatkan usaha dan inovasi petani.

Padahal sesuai hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak pada tanggal 27 Nopember 2005, masyarakat sebetulnya membutuhkan sebuah program yang komprehensif. Program tersebut terdiri dari

dorongan potensi dan inovasi bagi masyarakat, yang diikuti dengan pembinaan bagi petani baik dari sisi proses produksi maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani, penguatan modal dan kemudahan akses pasar. Bagi masyarakat petani, program KPEL hingga saat ini baru mampu membangkitkan potensi dan inovasi di kalangan masyarakat. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi penyuluhan, penguatan modal dan kemudahan akses pasar. Fungsi penyuluhan kepada petani yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo sendiri juga mengalami permasalahan yang dilematis. Hal ini disebabkan (sesuai hasil wawancara tanggal 4 Desember 2005 dengan Ketua Kelompok Tani) sejak otonomi daerah dana penyuluhan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa Intensifikasi Budidaya Ikan (INBUDKAN) tidak lagi dilaksanakan. Padahal masyarakat membutuhkan fungsi penyuluhan tersebut, sementara di sisi lain Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa menganggarkan kegiatan penyuluhan tersebut karena di pos kan di APBN. Dengan demikian munculnya inovasi dan potensi yang didapatkan masyarakat dari program KPEL tidak mampu diikuti dengan yang pembinaan yang aplikatif dari pemerintah.

Sebagaimana Forum Reboan yang selama ini menjadi ajang para petani untuk menyerap aspirasi, harapan dan menentukan langkah ke depan pembangunan ekonomi klaster, pada dasarnya sudah membudaya jauh sebelum program KPEL tersebut dilaksanakan. Dengan demikian tanpa adanya forum tersebut pun permasalahan, aspirasi serta harapan para petani bisa ditampung

dan dicarikan solusinya bersama-sama. Sesuai dengan konsep KPEL, berbagai masalah dan aspirasi para petani tambak di dalam Forum Reboan ini selanjutnya akan dibawa ke Forum Kemitraan Mina Delta yang merupakan pertemuan berbagai *stakeholders,* untuk selanjutnya diberikan solusi dan ditindaklanjuti oleh para *stakeholders.* Namun demikian realisasi yang terjadi di lapangan tidak demikian, karena kedua forum tersebut telah vakum. Baik pemerintah, swasta maupun institusi pendukung lainnya (salah satunya perbankan) tidak mendukung dan memberikan solusi atas kevakuman tersebut. Justru yang timbul kemudian yaitu hubungan yang tidak harmonis antara KSU sebagai fasilitator, pemerintah (karena minimnya dana) dan perbankan yang hanya mau hadir di awal program KPEL tersebut dirintis tapi tidak menunjukkan komitmen apapun. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Bappekab Sidoarjo) seolah-olah terkesan cuci tangan atas kevakuman tersebut dengan pernyataannya seperti, "Ini bukan program saya kok.."

Sementara itu dengan adanya kevakuman program KPEL di Desa Segoro Tambak saat ini, masyarakat lebih memilih untuk bersikap *wait and see* (hasil wawancara tanggal 4 Desember 2005 dengan Ketua Kelompok Tani). Namun demikian apabila program ini kembali diaplikasikan di Desa Segoro Tambak, masyarakat yang diwakili Ketua Kelompok Tani tersebut menyatakan *welcome* dengan program tersebut. Di kalangan masyarakat petani tambak seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Desa Segoro Tambak, Forum Kemitraan Mina Delta lebih merupakan forum bentukan Pemerintah Pusat

sebagaimana format yang terdapat di dalam program KPEL. Sementara untuk Forum Reboan merupakan forum rutin bentukan petani tambak sendiri yang sudah berjalan jauh sebelum program KPEL diimplementasikan di Desa Segoro Tambak. Dengan demikian versi yang berkembang di masyarakat, Forum Kemitraan Delta Mina Sidoarjo adalah forum bentukan pemerintah sedangkan forum yang dilaksanakan setiap hari Rabu yang selanjutnya disebut Forum Reboan adalah forum milik petani tambak.

Sebetulnya dalam rangka pengembangan klaster bandeng dan udang tersebut sangat dimungkinkan bagi pihak swasta untuk bekerjasama. Pihak-pihak tersebut di antaranya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), PT Sekar Laut, PT Kelola Mina Laut dan sebagainya. Namun demikian walaupun mereka berpeluang, namun pihak swasta tersebut tidak menunjukkan apresiasi terhadap hal tersebut. Selain itu, klaster bandeng dan udang di dalam melaksanakan aktivitas pemasaran produk-produk mereka tidak mengalami permasalahan yang berarti. Dengan demikian tanpa dukungan dari pihak swasta pun usaha mereka masih tetap eksis.

Ditinjau dari indikator-indikator kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta unsur-unsur *trust, negotiate,* maupun pembagian peran yang ada masih sangat kecil, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut :

TABEL 7.1.
INDIKATOR KEMITRAAN DALAM IMPLEMENTASI KPEL

No	Indikator Kemitraan	Pemerintah	Masyarakat	Swasta
1	*Trust*	1 Kehadiran dalam forum-forum kemitraan 2 Fasilitasi pertemuan-pertemuan 3 Mengakomodasi permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan masyarakat	1 Keaktifan dalam forum-forum kemitraan	1 Komitmen untuk membantu petani
2	*Negotiate*	1 Upaya tindak lanjut dari forum-forum kemitraan dan hasil pertemuan	1 Partisipasi pada forum-forum kemitraan dengan aktif memberikan kontribusi dan masukan	1 Partisipasi pada forum-forum kemitraan dengan aktif memberikan kontribusi dan masukan
3	Keseimbangan peran	1 Menempatkan diri sesuai fungsinya sebagai failitator dan mediator 2 Tidak bersifat *directive* dan superior	1 Adanya kesempatan dan ruang yang sama, setara dan adil untuk mengemukakan pendapat	1 Adanya kesempatan dan ruang yang sama, setara dan adil untuk mengemukakan pendapat

Unsur *trust* ini antara lain bisa dilihat dari partisipasi swasta dalam kemitraan tersebut. Walaupun mereka masuk dalam Forum Kemitraan yang terdapat di tingkat Propinsi (POKJA KPEL) maupun Kabupaten (Forum Kemitraan Mina Delta), tetapi dalam kenyataannya mereka tidak mengapresiasi kemitraan tersebut. Minimnya apresiasi mereka ini disebabkan keuntungan yang diperoleh dari kemitraan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak swasta. Bahkan bisa dikatakan bahwa swasta hampir tidak menyentuh

masyarakat petani tambak. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pihak swasta tidak mau bermitra dengan masyarakat dan pemerintah di samping tidak adanya keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari kemitraan tersebut, juga karena tidak adanya *trust* baik kepada masyarakat petani tambak maupun kepada pemerintah.

Sementara itu proses *negotiate* yang seharusnya dilakukan antara pemerintah, masyarakat maupun swasta tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik. Proses ini tercermin pada saat proses penentuan lokasi KPEL di Kabupaten Sidoarjo yang tidak melalui proses negosiasi. Walaupun pada saat penentuan lokasi disertai pertimbangan bahwa Kabupaten Sidoarjo dianggap mempunyai potensi besar di bidang pertambakan, namun pada saat Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai *pilot project* lokasi KPEL di Propinsi Jawa Timur, proses penentuan tersebut dilakukan secara langsung dan sepihak oleh Pemerintah Pusat (Bappenas). Dengan demikian tidak ada ruang bagi kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Timur untuk menunjukkan apresiasinya tershadap program tersebut. Selain itu, walaupun dengan disertai alasan politis bagi Kabupaten Sidoarjo pada saat menerima penunjukan tersebut, namun Kabupaten Sidoarjo tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan penolakan maupun penerimaan atas tawaran tersebut.

Dalam hal pembagian peran juga terjadi hal yang sama, yaitu baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat terdapat pembagian yang tidak proporsional. Hal tersebut bisa dilihat pada saat forum kemitraan vakum, pemerintah tidak memiliki inisiatif untuk mengaktifkannya. Padahal dalam hal

ini pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang seharusnya memfasilitasi forum tersebut agar bisa berfungsi kembali. Namun yang terjadi justru pemerintah tidak berbuat apa-apa karena berbagai alasan politis maupun teknis. Ditambah lagi peran KSU yang seharusnya memediasi forum dan kegiatan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian kemitraan sebagai sebuah *engine* belum dapat berfungsi secara maksimal, karena indikator-indikator yang ada tidak berjalan dan dipergunakan secara optimal. Selengkapnya hasil kemitraan sesuai dengan indikator kemitraan dalam program KPEL di Desa Segoro Tambak diilustrasikan dalam tabel berikut :

TABEL 7.2
HASIL PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM IMPLEMENTASI KPEL BERDASARKAN INDIKATOR KEMITRAAN DI DESA SEGORO TAMBAK

No	ELEMEN KEMITRAAN	INDIKATOR KEMITRAAN								
		TRUST			NEGOTIATE			KESEIMBANGAN PERAN		
		P	M	S	P	M	S	P	M	S
1	PEMERINTAH (P)		Sedang	Kecil		Kecil	Kecil		Kecil	Kecil
2	MASYARAKAT (M)	Kecil		Sedang	Kecil		Sedang	Kecil		Kecil
3	SWASTA (S)	Kecil	Kecil		Kecil	Kecil		Kecil	Kecil	

Berangkat dari keinginan masyarakat, sebetulnya program KPEL tidak berpengaruh banyak bagi masyarakat. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi atas permasalahan-permasalahan yang lebih teknis seperti permodalan, penanganan penyakit udang dan pendangkalan sungai. Kalaupun

pemerintah berinisiatif untuk mengimplementasikan sebuah program di Desa Segoro Tambak, maka masyarakat lebih memilih sebuah program yang komprehensif yaitu sebuah program yang mampu membangkitkan inovasi masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atas permodalan dan akses pasar. Sementara program KPEL yang telah dilaksanakan tidak mampu menjawab permasalahan tersebut, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut :

TABEL 7.3.
KONDISI MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN KPEL DI DESA SEGORO TAMBAK

SEBELUM KPEL			SESUDAH KPEL		
Pemerintah	Masyarakat	Swasta	Pemerintah	Masyarakat	Swasta
Kurangnya komitmen pendanaan untuk program KPEL	Perlu program yang komprehensif	-	Belum teratasi karena ada kendala politis dan kendala teknis	Hanya mampu menigkatkan motivasi masyarakat saja	Minimnya dukungan kepada program KPEL
	Kesulitan permodalan			Solusinya yaitu dengan mengadakan pelatihan, tapi baru sebatas pembuatan proposal kredit. Bukan kemudahan memperoleh kredit.	
	Adanya pendangkalan sungai			Belum teratasi	
	Penyakit udang			Mempertahankan kekebalan udang	
	Minimnya teknologi			Fasilitasi inovasi bandeng tanpa duri	

7.6. Kemitraan dan Perkembangan Usaha

Seperti tercantum dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2002 – 2007 (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002), angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1995 dan tahun 1996 berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur dan nasional. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun yakni sebesar 5,02% berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang secara umum mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional per kapita, daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas usaha pada masing-masing sektor perekonomian.

Pengaruh tersebut semakin signifikan sehingga mengakibatkan kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar –15,92%. Namun demikian melalui tahap penyelamatan dan tahap pemulihan perekonomian daerah, secara bertahap laju perekonomian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,72%. Kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan yang positif pada masing-masing sektor perekonomian sehingga memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Dari data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002) dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2001 secara agregat terjadi peningkatan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 1997 dari Rp 4.106.216,45 juta menjadi Rp 7.856.828,34 juta pada tahun 2001, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 7.4
AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)
DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) 1993
TAHUN 1997 – 2001

Sektor/Sub Sektor	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
Atas Dasar Harga Berlaku					
Produk Domestik Regional Bruto	5.781.614,36	8.348.791,44	9.548.538,28	10.707.549,52	12.462.697,53
Penyusutan Barang Modal	446.960,66	501.412,91	498.790,46	591.089,20	652.312,08
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (ADHP)	5.334.653,70	7.847.378,51	9.049.747,82	10.116.460,32	11.810.385,45
Pajak Tak Langsung	181.540,32	214.036,04	208.094,51	280.132,94	331.266,94
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Pendapatan Regional	5.153113,38	7.633.342,49	8.841.653,31	9.836.327,38	11.479.118,51
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp)	**4.106.216,45**	**5.775.016,66**	**6.347.578,48**	**6.920.821,85**	**7.856.828,34**
Pendapatan Regional Per Kapita (Rp)	3.659.842,67	5.280.127,12	5.961.000,04	8.357.707,64	7.236.752,100
Atas Dasar Harga Konstan 1993					
Produk Domestik Regional Bruto	4.357.400,38	3.663.825,74	3.726.746,35	3.840.989,26	3.981.570,81
Penyusutan Barang Modal	446.960,66	501.412,91	498.790,46	349.134,11	357.644,51
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (ADHP)	3.910.439,72	3.162.412,83	3.227.955,89	3.491.855,15	3.623.926,30
Pajak Tak Langsung	181.540,32	214.036,04	208.094,51	153.136,66	160.325,55
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor/ Pendapatan Regional	3.728.899,40	2.948.376,79	3.019.861,38	3.338.718,49	3.463.600,75
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp)	**3.094.711,62**	**2.534.337,44**	**2.512.554,42**	**2.482.622,41**	**2.510.029,08**
Pendapatan Regional Per Kapita (Rp)	2.648.337,84	2.039.447,89	2.035.975,99	2.157.979,83	2.183549,46
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	1.408.015	1.445.674	1.483.250	1.547.150	1.586.226

Sumber : Rencana Strategik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2005, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2002

Sedangkan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) terjadi kenaikan pada tahun 1997 dari Rp 3.094.711,62 juta menurun menjadi Rp 2.512.554,42 pada tahun

1999. Adanya penurunan tingkat produktivitas dari masing-masing sektor pembangunan dan dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo baik secara sektoral maupun keseluruhan.

Sementara itu dari data potensi desa yang dimiliki Desa Segoro Tambak, sebetulnya pihak swasta sangat berpotensi untuk bermitra dengan masyarakat terutama di bidang pemasaran produk-produk perikanan dan pertambakan. Namun demikian seperti telah diuraikan sebelumnya, kemitraan yang terdapat di Desa Segro Tambak tidak berpengaruh banyak bagi kelangsungan usaha mereka. Kemitraan yang awalnya mampu meningkatkan pendapatan dan potensi masyarakat setempat, pada akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dampak kemitraan bagi perkembangan usaha para petani tidak berlangsung lama. Padahal apabila materi pelatihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya ditambah dukungan penuh dari Forum Kemitraan Delta Mina yang merupakan representasi berbagai *stakeholders*, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan bisa lebih tinggi dan lebih berkelanjutan. Walaupun begitu, karena klaster udang dan bandeng tersebut telah lama eksis, proses pemasaran dan produksi yang selama ini sudah terpola dengan baik tetap bisa berjalan tanpa terpengaruh oleh kevakuman dari Forum Reboan maupun Forum Kemitraan Mina Delta tersebut.

Hal tersebut ditambah lagi dengan peran swasta yang hampir tidak menyentuh para petani tambak tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo (tanggal 28 Nopember 2005), swasta yang

diwakili oleh KADIN saat itu hanya mengungkapkan bahwa, "KADIN akan mendukung pelaksanaan program KPEL di Sidoarjo ini." Namun dalam pelaksanaannya dukungan tersebut tidak pernah direalisasikan. Tidak adanya pihak swasta yang bersedia untuk menjalin kerjasama di dalam kemitraan tersebut. disebabkan keuntungan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan *cost* yang mereka keluarkan. Dengan demikian mereka memilih untuk mencari peluang yang lebih menguntungkan dibandingkan menjalin kemitraan dengan para petani tambak tersebut.

7.7. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep KPEL pada awalnya bertumpu pada pengembangan kemitraan (antara pemerintah, masyarakat dan swasta), permintaan pasar dan pengembangan klaster aktivitas ekonomi. Namun demikian kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh konsep tersebut. Dalam kasus yang terjadi di Desa Segoro Tambak, kemitraan yang terjadi hanya antara pemerintah dan masyarakat petani saja dengan didukung oleh KSU dan LSM. Sedangkan swasta dalam hal ini tidak berpengaruh dan mempengaruhi proses produksi masyarakat petani tambak, karena pola pemasaran dan produksi yang ada di Desa Segoro Tambak telah terpola dengan baik jauh sebelum program KPEL ini diimplementasikan.

2. Walaupun pada tahap awal implementasi kemitraan banyak hal positif yang dirasakan petani seperti penambahan pengetahuan melalui materi pelatihan yang diselenggarakan atas inisiatif Forum Kemitraan serta peningkatan produksi dengan adanya inovasi teknologi bandeng tanpa duri, namun hal tersebut hanya terjadi di awal saja. Untuk proses selanjutnya baik Forum Kemitraan maupun Forum Reboan yang ada tidak berjalan bahkan vakum. Dengan demikian proses kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang seharusnya memiliki derajat kepentingan yang sama tidak berjalan sebagaimana konsep awal yang diharapkan oleh KPEL.
3. Adanya dominasi kepentingan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Propinsi yang terlihat pada saat proses penentuan lokasi *pilot project*. Walaupun disertai alasan politis seperti alokasi dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan alasan teknis yaitu potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo cukup besar, tetapi Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi *pilot project* tidak diberi kesempatan untuk menerima ataupun menolak alasan penetapan tersebut. Padahal tidak menutup kemungkinan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur juga memiliki potensi yang sama.
4. Berdasarkan indikator-indikator *partnership,* dari sisi *trust,* negosiasi maupun pembagian peran yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan swasta sangat kecil dan tidak berjalan secara proporsional.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

1. Bahwa pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta di dalam implementasi program KPEL di Desa Segoro Tambak tidak melibatkan semua pihak, namun hanya antara pemerintah dan masyarakat saja. Pihak swasta yang hanya hadir di awal sosialisasi program KPEL baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten, selanjutnya tidak memberikan dukungan apapun..
2. Konsep kemitraan KPEL yang diharapkan mampu merekonstruksi ulang peran pemerintah, masyarakat dan swasta serta merajut kembali tali kebersamaan dalam pembangunan ekonomi lokal di Desa Segoro Tambak khususnya dan Kabupaten Sidoarjo serta Propinsi Jawa Timur umumnya, belum dilaksanakan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kemitraan itu sendiri, walaupun ada sedikit unsur *trust pada* pelaksanaannya, namun dalam proses *negotiate* dan pembagian peran tidak berjalan secaraoptimal. Indikasi tersebut terlihat pada saat proses penentuan lokasi KPEL dan kevakuman forum kemitraan. Dengan demikian yang lebih berkepentingan dari pola kemitraan tersebut sebetulnya pemerintah. Pendapat ini didasari pada alasan bahwa inisiatif munculnya kemitraan serta motif yang mendasari kemitraan tersebut yang semuanya berasal dari pemerintah.

3. Kemitraan dalam pelaksanaan program KPEL di Desa Segoro Tambak tidak sepenuhnya mampu memicu pertumbuhan usaha di Desa Segoro Tambak. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut di samping tidak optimalnya pola kemitraan yang ada di Desa Segoro Tambak karena minimnya dukungan pihak swasta, juga karena tidak berkelanjutan nya program KPEL tersebut. Walaupun saat ini kemitraan tersebut vakum, namun sebenanya terdapat dampak positif yang dirasakan masyarakat yaitu meningkatnya potensi, inovasi dan motivasi masyarakat.

8.2.. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebetulnya konsep KPEL yang merupakan inisiatif pemerintah Pusat bekerjasama dengan UNDP cukup ideal sebagai sebuah konsep dalam mengembangkan potensi lokal. Namun demikian dari studi kasus di Desa Segoro Tambak ini perlu dilakukan rekonstruksi ulang dari konsep KPEL ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam proses penyusunan sebuah program, hendaknya pemerintah menggunakan kriteria berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Banyak kebijakan yang dipandang para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat. Sementara sebaliknya ada juga kebijakan yang sebenarnya tidak begitu bermutu apabila dilihat dari substansinya, namun dapat diterima oleh masyarakat karena dianggap mampu menampung aspirasi masyarakatnya. Dalam konteks KPEL, walaupun

secara konsep program tersebut sangat ideal namun di tingkat implementasi kebijakan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya diakibatkan pada saat pelaksanaan kebijakan tidak dilaksanakan dalam waktu yang tepat. Mendesaknya waktu pelaksanaan program yang ditentukan pemerintah atas program tersebut, lebih didasari atas faktor kepentingan kepada program KPEL. Karena berkepentingan, pemerintah berupaya untuk segera melaksanakan program tersebut tanpa ada upaya integrasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan *stakeholders* yang terkait. Potensi terjadinya *overlapping* dengan program pemerintah lain pun menjadi terbuka lebar yang mengakibatkan tidak efektifnya program tersebut. Dengan demikian sebelum program tersebut dilaksanakan perlu adanya upaya koordinasi, integrasi dan evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

2. Walaupun inisiatif atas KPEL berasal dari pemerintah, namun sebelum program tersebut diimplementasikan, seluruh *stakeholders* yang terlibat harus diberikan kesempatan yang sama melalui saran dan masukan atas program tersebut. Rekomendasi tersebut selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan program tersebut, apakah layak diteruskan, perlu diperbaiki dari sisi konsep atau sudah cukup ideal untuk dilaksanakan.
3. Peran Pemerintah tidak lagi bersifat *directive* dan *superior*. Konsep kemitraan yang menseyogyakan adanya *trust, negotiate* dan keseimbangan peran (kesetaraan), perlu dipertegas lagi dengan adanya unsur implementasi

keterwakilan, transparansi dan saling menguntungkan antara ketiga elemen tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, hendaknya pada saat menyusun sebuah kebijakan pemerintah benar-benar bersifat transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Keberadaan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja. Pada saat proses penetapan lokasi bagi program tersebut, juga tetap memperhatikan prinsip tersebut. Seperti pada saat proses penetapan Kabupaten Sidoarjo dan Desa Segoro Tambak sebagai lokasi KPEL. Adanya unsur-unsur kemitraan tersebut justru tidak dijumpai pada proses implementasi KPEL tersebut. Kecilnya unsur kepercayaan, negosiasi dan pembagian peran antara masyarakat pemerintah dan swasta adalah fakta yang menunjukkan bahwa hingga saat ini kemitraan yang dimaksud baru sebatas *discourse*. Fakta ini tidak jauh berbeda dari beberapa pola kemitraan yang pernah ada sebelumnya. Dari pola-pola tersebut, peran pemerintah masih terlihat superior dan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai *enzyme of growth*. Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi ulang peran ketiga peran tersebut, agar kemitraan yang menseyogyakan adanya kepercayaan, kesetaraan dan negosiasi benar-benar terwujud.

8.3. REKOMENDASI

1. Dengan melihat dari kevakuman forum kemitraan tersebut, sebaiknya perlu dipertimbangkan adanya rekonstruksi dari program KPEL tersebut. Salah

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

satunya yaitu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya aspirasi kelompok penguasa saja pada proses perumusan kebijakan. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan akan lebih transparan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Dengan vakumnya forum kemitraan tersebut, bisa diartikan sebagai kemitraan di dalam KPEL masih sebatas *discourse*. Sehingga dalam merancang program yang bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus benar-benar menempatkan diri sebagai *enzyme of growth* dan masyarakat serta swasta sebagai *engine of growth*.
3. Agar kemitraan mampu meningkatkan pertumbuhan usaha bagi masyarakat, maka kemitraan yang terjalin di antara pemerintah daerah, swasta dan perbankan perlu ditinjau ulang dan dievaluasi kembali. Dengan demikian adanya sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat salah satunya permodalan yang menghambat pelaksanaan program KPEL bisa diatasi.
4. Perlu adanya lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan implementasi program KPEL baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Daftar Pustaka

Abidin, Said Zainal, Ph. D, *Kebijakan Publik,* Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004

Airlangga, Universitas, *Proposal Penyusunan Model Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal di Jawa Timur,* Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sidoarjo, *Daftar Isian Perkembangan Desa dan Potensi Desa,* Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sidoarjo, 2003.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sidoarjo, *Daftar Isian Perkembangan Desa dan Potensi Desa,* Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sidoarjo, 2004.

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappenas), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Human Settlement Programme (UNHSP), *Panduan Implementasi Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal 2003,* Jakarta, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappenas), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Human Settlement Programme (UNHSP), *Sosialisasi Nasional KPEL,* Jakarta, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappenas), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Human Settlement Programme (UNHSP), *Pelatihan Pendamping PSU/KSU,* Jakarta, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jawa Timur - LPM Universitas Airlangga, *Laporan Akhir Model Implementasi KPEL di Jawa Timur*, Surabaya, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jawa Timur, *Laporan Kegiatan Program Pengembangan Ekonomi Lokal,* Surabaya, 2004.

Berry, Albert, Edgard Rodriguez, Henry Sandee, *Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia,* Small Business Economics, 2002.

Blakely, Edward J. , *Planning Local Economic Development Theory and Practice,* Sage Publications, United States of America, 1989.

Crawford, Gordon and Yulius P. Hermawan, Whose Agenda? "Partnership" and International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, *Contemporary Southeast Asia,* Volume 24, Number 2, August 2002.

Eastern Regional Organization for Public Administration, *From Government to Governance Reflections on the 1999 World Conference on Governance,* Eastern Regional Organization for Public Administration, Philipines, 2000.

Gardjito, Wisnu, *Sulawesi Development Vision 2010 The UNIDO Cluster/Network Development Programme,* UNIDO, 2005.

Grindlle, Merille. S. , *Politics and Policy Implementation in the Third World,* Princenton University Press, United Kingdom, 1980.

Helmsing, A. H. J. (Bert), Externalities, Learning and Governance: New Perspective on Local Economic Development, *Development and Change,* Vol. 32, 277 – 308, Blackwell Publisher, UK, 2001.

Humprey, John, Hubert Schmitz, *Principles for Promoting Clusters and Networks of SMES,* United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO), Small Enterprises Medium Programme, Oktober 1995.

Japan International Cooperation Agency, *Langkah Sukses Pelaku UKM,* Tim Kerja - Kerjasama Ekonomi Indonesia – Jepang bekerjasama dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agustus 2004.

Jawa Pos Institute for Pro Authonomy (JPIP), *Referensi Baru Otonomi,* Surabaya, 2004.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pelatihan Pendamping PSU/KSU Wilayah Replikasi II Program KPEL*, Jakarta, 2003.

Kabupaten Supporting Unit (KSU) Kab. Sidoarjo, *Laporan Pelaksanaan KPEL Kabupaten Sidoarjo,* Oktober 2004.

Kitajima, Seiko, Political Economy of Integrative Apparatus of The State: Partnership and Regional Development Planning in Japan, *SAGE Social Science Collection, Review of Radical Political Economics,* 1998.

Kompas, *Pembiayaan UKM Binaan BUMN Lewat Bank,* Jakarta, 13 Agustus 2004.

Marijan, Kacung, Mengembangkan Klaster Industri di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Penguatan Kendali Rakyat Edisi III, Juni – Juli 2002,* Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta, 2002.

Moleong, Dr., Lexy J, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Nadvi Khalid, *Industrial Clusters and Network : Case Studies of SME Growth and Innovation,* United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO), Small Enterprises Medium Programme, Oktober 1995.

Nasution, Prof. Dr. S., MA, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* PT Bumi Aksara, 2004.

Propinsi, Pemerintah Jawa Timur, *Rencana Strategis Daerah Propinsi Jawa Timur 2001 – 2005,* Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2001.

Provincial Supporting Unit (PSU), *Laporan Kegiatan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Propinsi Jawa Timur,* Surabaya, 2004.

Rabelloti, Roberta, *External Economies and Cooperation in Industrial Districts,* MacMillan Press LTD, London, 1997.

Republik Indonesia, *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004,* Republik Indonesia, 2000.

Sandee, Henry dan Van Hulsen, Sandra C, *Business Development for Small Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring Performance,* Sponsors by German Agency for Technical Cooperation (GTZ), United State Agency for International Development (USAID), Mekong Project Development Facility (MPDF), Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 2000.

Sekretariat KPEL bekerjasama dengan BAPPENAS, UNDP dan UN HABITAT *Praktek Terbaik Penerapan Pendekatan KPEL,* Jagat Media, Maret 2004.

Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten, Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2004,* Bappekab Sidoarjo dan Badan Pusat Statistik Kab Sidoarjo, 2004.

Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten, *Himpunan Dokumen Perencanaan, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 Rencana Strategik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2005,* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2002.

Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai,* LP3ES Jakarta, 1987.

Soehartono, Dr. Irawan, *Metode Penelitian Sosial,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995

Soenarko,H. SD, *Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah,* Airlangga University Press, 1998.

Soetrisno, Noer, *Strategi Penguatan UKM Melalui Pendekatan Klaster Bisnis Konsep, Pengalaman Empiris dan Harapan*, www.smecda.com, 2004.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, Penyadur : Drs. H.M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, PT Bina Ilmu Surabaya, 1997.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Prof. H, MA, *Aktualisasi "Good Governance" Dalam Reformasi Kemitraan Sektor Publik dan Sektor Usaha*, Surabaya, 2001.

www.sidoarjo.go.id, *Produk Unggulan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo*, 2005.

INTERVIEUW GUIDE

1. Pemerintah

a. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas

Pertanyaan :

- Apakah di dalam proses penentuan lokasi *pilot project* implementasi program KPEL melibatkan pemerintah daerah calon lokasi atau hanya merupakan keputusan pemerintah Pusat saja?
- Apakah dasar-dasar penentuan lokasi *pilot project* program KPEL di Indonesia?

b. Kasubbbid Perdagangan dan Koperasi Bappeprop Jawa Timur

Pertanyaan :

- Sampai sejauh mana dukungan Pemerintah Propinsi dalam program KPEL ini?
- Apakah bentuk dukungan yang diberikan pemerintah Propinsi dalam implementasi KPEL ?
- Apabila program KPEL didukung oleh Pemerintah Propinsi apakah hal tersebut dimasukkan di dalam program pembangunan strategis atau program pembangunan prioritas Jawa Timur?

c. Kasubbid Perdagangan dan Koperasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Pertanyaan :

- Sampai sejauh mana dukungan PemKab Sidoarjo di dalam implementasi KPEL?
- Bagaimanakah bentuk partisipasi PemKab di dalam implementasi KPEL di Sidoarjo?

- Apakah PemKab berhasil menempatkan posisinya sebagai *fasilitator* dan tidak sebagai *director* di dalam program tersebut?

2. **Masyarakat**

a. Ketua Kelompok Klaster Tambak

Pertanyaan :

- Apakah manfaat yang diperoleh sebelum dan sesudah adanya program KPEL di Desa Segoro Tambak?
- Apakah dengan adanya partnership di dalam program KPEL berhasil meningkatkan atau justru menurunkan pendapatan usaha mereka?
- Apakah para petani yang tergabung di dalam klaster perikanan laut dan udang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan Forum Reboan sebagai ajang pemecahan solusi dan akomodasi berbagai pendapat serta permasalahan yang dihadapi para petani?
- Apakah bentuk partisipasi aktif para petani tersebut di dalam Forum Reboan ?
- Apakah sebenarnya motivasi mereka pada saat menghadiri Forum Reboan ?
- Apakah mereka hanya hadir sebagai pendengar dan cenderung melegitimasi setiap hasil musyawarah yang diperoleh, atau ikut berpartisipasi aktif di dalam Forum Reboan?

b. Koperasi dan Ketua Kelompok Tani

Pertanyaan :

- Apakah manfaat yang diperoleh sebelum dan sesudah adanya program KPEL di Desa Segoro Tambak?

- Apakah dengan adanya partnership di dalam program KPEL berhasil meningkatkan atau justru menurunkan pendapatan usaha mereka?
- Apakah para petani yang tergabung di dalam klaster perikanan laut dan udang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan Forum Reboan sebagai ajang pemecahan solusi dan akomodasi berbagai pendapat serta permasalahan yang dihadapi para petani?
- Apakah bentuk partisipasi aktif para petani tersebut di dalam Forum Reboan ?
- Apakah sebenarnya motivasi mereka pada saat menghadiri Forum Reboan ?
- Apakah mereka hanya hadir sebagai pendengar dan cenderung melegitimasi setiap hasil musyawarah yang diperoleh, atau ikut berpartisipasi aktif di dalam Forum Reboan?

3. Swasta

Pertanyaan :

- Apakah manfaat yang diperoleh dengan mereka bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah?
- Kenapa mereka mau bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah?
- Faktor apakah yang melatarbelakangi kemauan bekerjasama tersebut? Apakah ada kepentingan di balik motivasi tersebut?

Tesis

Pola kemitraan antara pemerintahan ...

Nurareni Widi Astuti

Unair

DAFTAR ISIAN
PERKEMBANGAN DESA
&
POTENSI DESA

DIPERBANYAK OLEH :

BADAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEREMPUAN
KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2004

ADLN - Perpustakaan Unair

DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN
DESA

Lampiran I C

Desa : SEGOROTAMBAK
Kecamatan : SEDATI
Kabupaten : SIDOARJO
Propinsi : JAWA TIMUR
Bulan : .....
Tahun : .....

SUMBER DATA UNTUK MENGISI PROFIL DESA

1. MONOGRAFI
2. .....
3. .....
4. .....

Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DESA
SEGOROTAMBAK
KECAMATAN SEDATI

Tanda tangan & Cap

.....

Lampiran I C

I. EKONOMI MASYARAKAT

1. Pengangguran

1) Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 tahun)	..... orang
2) Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah	..... orang
3) Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	..... orang
4) Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh	..... orang
5) Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak tentu	..... orang

2. Produk Domestik Desa Bruto

a. Tanaman padi	
1) Luas tanaman padi tahun ini	..... ha
2) Hasil per ha	Rp.....
3) Biaya pemupukan per ha	Rp.....
4) Biaya bibit per ha	Rp.....
5) Biaya obat per ha	Rp.....
b. Tanaman jagung	
1) Luas tanaman jagung tahun ini	..... ha
2) Hasil per ha	Rp.....
3) Biaya pemupukan per ha	Rp.....
4) Biaya bibit per ha	Rp.....
5) Biaya obat per ha	Rp.....
c. Tanaman kedelai	
1) Luas tanaman kedelai tahun ini	..... ha
2) Hasil per ha	Rp.....
3) Biaya pemupukan per ha	Rp.....
4) Biaya bibit per ha	Rp.....
5) Biaya obat per ha	Rp.....
	Rp.....
	Rp.....
d. Tanaman	
1) Luas tanaman ..... tahun ini	..... ha
2) Hasil per ha	Rp.....
3) Biaya pemupukan per ha	Rp.....
4) Biaya bibit per ha	Rp.....
5) Biaya obat per ha	Rp.....
e. Tanaman	
1) Luas tanaman ..... tahun ini	..... ha
2) Hasil per ha	Rp.....
3) Biaya pemupukan per ha	Rp.....
4) Biaya bibit per ha	Rp.....
5) Biaya obat per ha	Rp.....

Lampiran I C

f. Industri pangan	
Total nilai produksi	Rp.....
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.....
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.....
g. Industri Pakaian	
Total nilai produksi	Rp.....
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.....
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.....
h. Industri	
Total nilai produksi	Rp.....
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.....
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.....
i. Industri	
Total nilai produksi	Rp.....
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.....
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.....

3. Pendapatan Perkapita atau PDDB Perkapita

PERTANIAN	..... rumah tangga
1) Jumlah rumah tangga petani	..... rumah tangga
2) Jumlah total anggota rumah tangga petani	.....orang
3) Jumlah rumah tangga buruh tani	..... rumah tangga
4) Jumlah anggota rumah tangga buruh tani	.....orang
INDUSTRI	
1) Jumlah rumah tangga industri	..... rumah tangga
2) Jumlah total anggota rumah tangga industri	..... orang
3) Jumlah rumah tangga buruh	..... rumah tangga
4) Jumlah anggota rumah tangga buruh	..... orang

4. Kemiskinan

Jumlah Kepala Keluarga	484... keluarga
Jumlah keluarga prasejahtera	..... keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	..... keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 2	..... keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	..... keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	..... keluarga

5. Penguasaan asset ekonomi oleh masyarakat

ASET TANAH	
Tidak memiliki Tanah	..... orang
Memiliki Tanah kurang dari 0,1 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,1 – 0,2 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,21– 0,3 ha	..... orang

Lampiran I C

Memiliki Tanah antara 0,31 – 0,4 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,41 – 0,5 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,51 – 0,6 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,61 – 0,7 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,71 – 0,8 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,81 – 0,9 ha	..... orang
Memiliki Tanah antara 0,91 – 1,0 ha	..... orang
Memiliki Tanah lebih dari 1,0 ha	..... orang
ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	.....–..... orang
Memiliki becak	.....2..... orang
Memiliki cidemo/andong/dokar	.....–..... orang
Memiliki kapal motor	.....–..... orang
Memiliki bus	.....–..... orang
Memiliki mini bus	.....–..... orang
ASET INDUSTRI DAN MESIN PERTANIAN	
Memiliki penggilingan padi	.....–..... orang
Memiliki traktor	.....–..... orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	.....–..... orang
Memiliki kapal penangkap ikan	.....–..... orang
Memiliki mesin bubut	.....–..... orang
RUMAH MENURUT DINDING	
Tembok	..397.. keluarga
Kayu	.....39.. keluarga
Bambu	.....26.. keluarga
RUMAH MENURUT LANTAI	
Keramik	297.. keluarga
Semen	....61... keluarga
Kayu	....39... keluarga
Tanah	...26... keluarga

6. **Pemilikan barang berharga**

Jumlah Kepala Keluarga	.484... keluarga
Jumlah keluarga memiliki TV	..... keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	..226.. keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil	.....44.. keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	.....–... keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak	..... keluarga

7. **Mata pencaharian**

Buruh tani	.211..... orang
Petani / Tambak	...166..... orang
Pedagang/wiraswasta/pengusaha	.....32..... orang
Pengrajin	.....–..... orang
PNS	.....6..... orang

Lampiran 1 C

TNI/Polri	.....9..... orang
Penjahit	.....7..... orang
Montir	.....3..... orang
Supir	.....8..... orang
Pramuwisa	.....-..... orang
Karyawan swasta	..... orang
Kontraktor	.....-..... orang
Tukang kayu	.....4..... orang
Tukang batu	.....12..... orang
Guru swasta	.....8..... orang

II. PENDIDIKAN MASYARAKAT

1. Tingkat Pendidikan Penduduk

1) Jumlah penduduk buta huruf	..... orang
2) Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	..... orang
3) Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	....666..... orang
4) Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	....397..... orang
5) Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat	....119..... orang
6) Jumlah penduduk tamat D-1	.....11..... orang
7) Jumlah penduduk tamat D-2	.....3..... orang
8) Jumlah penduduk tamat D-3	.....-..... orang
9) Jumlah penduduk tamat S-1	....28..... orang
10) Jumlah penduduk tamat S-2	.....2..... orang
11) Jumlah penduduk tamat S-3	.....-..... orang

2. Wajib Belajar 9 tahun

1) Jumlah penduduk usia 7 -15 tahun	..... orang
2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	..... orang
3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	..... orang

III. KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kematian Bayi

1) Jumlah bayi lahir pada tahun ini	..... orang
2) Jumlah bayi mati tahun ini	..... orang

2. Kejadian Luar Biasa (KLB)

MUNTABER	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	....2.... kejadian
Jumlah yang meninggal	....-..... kejadian
DEMAM BERDARAH	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	..3..... kejadian
Jumlah yang meninggal	....-..... kejadian
.....	..... kejadian
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	..... kejadian
Jumlah yang meninggal	....-..... kejadian

Lampiran I C

3. Kematian Ibu Melahirkan

1) Jumlah ibu melahirkan pada tahun ini	……–…… orang
2) Jumlah ibu melahirkan mati tahun ini	……–…… orang

4. Cakupan Immunisasi

Cakupan immunisasi polio 3	……%
Cakupan immunisasi DPT-1	……%
Cakupan immunisasi cacar	……%
Cakupan ……	……%

5. Angka harapan hidup

NAMA ORANG YANG MENINGGAL TAHUN INI	
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR
……	…….. UMUR

6. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih

1) Jumlah rumah tangga menggunakan sumur gali	….551… Rumah tangga
2) Jumlah rumah tangga pelanggan PAM	..147… Rumah tangga
3) Jumlah rumah tangga menggunakan air PAM	..1.95… Rumah tangga
4) Jumlah rumah tangga menggunakan sumur pompa	….–…. Rumah tangga
5) Jumlah rumah tangga menggunakan perpipaan air	……–…. Rumah tangga
6) Jumlah rumah tangga menggunakan hidran umum	……–…. Rumah tangga
7) Jumlah rumah tangga menggunakan air sungai	..131…. Rumah tangga
8) Jumlah rumah tangga menggunakan embung	……–…. Rumah tangga
9) Total jumlah rumah tangga	..4.84… Rumah tangga

7. Perilaku hidup bersih dan sehat

Kebiasaan buang air besar	
Jumlah rumah tangga memiliki WC	….79…… orang
Jumlah rumah tangga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun	…3.05…… orang
Pola makan	
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari	~~2 kali~~/ 3 kali
Kebiasaan berobat bila sakit	
Dukun	~~Tidak ada~~/sedikit/~~banyak~~
Dokter/puskesmas	~~Tidak ada~~/~~sedikit~~/banyak
Obat tradisional	~~Tidak ada~~/sedikit/~~banyak~~

ADLN - Perpustakaan Unair

Lampiran I B

DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA

DIPERBANYAK OLEH
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
(BKBPMP)
TAHUN 2004

ADLN - Perpustakaan Unair

Lampiran I B

Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Propinsi : .....
Bulan : .....
Tahun : .....

Nama Pengisi : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Kepala Desa,

Tanda tangan & Cap

.....

Lampiran I B

I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A. POTENSI UMUM

1. Luas Desa

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	= ..... – ..... ha
Sawah irigasi ½ teknis	= ..... – ..... ha
Sawah tadah hujan	= ..... – ..... ha
TANAH KERING	
Tegal/ladang	= ..... – ..... ha
Pemukiman	= ..... 624 ..... ha
TANAH BASAH	
Tanah rawa	= ..... – ..... ha
Pasang surut	= ..... 300 ..... ha
TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	= ..... – ..... ha
Tanah perkebunan negara	= ..... – ..... ha
Tanah perkebunan swasta	= ..... – ..... ha
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas desa	= ..... ha
Lapangan	= ..... – ..... ha
Perkantoran pemerintah	= ..... – ..... ha
Lainnya	= ..... – ..... ha
TANAH HUTAN	
Hutan lindung	= ..... – ..... ha
Hutan produksi	= ..... – ..... ha
Hutan konversi	= ..... ha

2. Tipologi

Desa kepulauan	–
Desa pantai/pesisir	✓
Desa sekitar hutan	–
Desa terisolasi	–
Desa perbatasan dengan negara lain	–
Desa perbatasan dengan Kabupaten lain	✓
Desa perbatasan dengan Propinsi lain	–

Lampiran I B

3. Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	= .....8.....Km	
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	=.....0,5.....Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan terdekat	=.ANGKUTAN DESA	
Berada di ibu kota kecamatan	Ya	Tidak
Jarak ke ibu kota Kabupaten terdekat	= .....22.....Km	
Lama tempuh ke ibu kota Kabupaten terdekat	=.....1.....Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota Kabupaten terdekat	= ANGKUTAN DESA	

4. Iklim

Curah hujan	= .2.080.....Mm
Jumlah bulan hujan	= .....6..... Bulan
Suhu rata-rata harian	= .22 – 34.... ^{0}C
Tinggi tempat	= ....4..... mdl
Bentang wilayah	Datar/~~berbukit/lereng gunung~~

B. PERTANIAN

B.1. TANAMAN PANGAN

1. Luas tanam menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Kacang kedelai	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Kacang Tanah	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Kacang panjang	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Padi ladang	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Ubi kayu	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Ubi jalar	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Cabe	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Bawang putih	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Bawang merah	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Tomat	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Sawi	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Kentang	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Kubis	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Mentimun	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Buncis	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Broccoli	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
Terong	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
.....	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha
.....	.....–..... Ha	.....–..... Ton/ha

2. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian	.....–..... RTP
Tidak memiliki	.....–..... RTP
Memiliki kurang 0,5 ha	.....–..... RTP
Memiliki 0,5 – 1,0 ha	.....–..... RTP
Memiliki lebih dari 1,0 ha	.....–..... RTP
Jumlah total rumah tangga petani	.....–..... RTP

Lampiran I B

3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

Jeruk	..... Ha	..... Ton/ha
Alpokat	..... Ha	..... Ton/ha
Mangga	..... Ha	..... Ton/ha
Rambutan	..... Ha	..... Ton/ha
Manggis	..... Ha	..... Ton/ha
Salak	..... Ha	..... Ton/ha
Apel	..... Ha	..... Ton/ha
Pepaya	..... Ha	..... Ton/ha
Belimbing	..... Ha	..... Ton/ha
Durian	..... Ha	..... Ton/ha
Sawo	..... Ha	..... Ton/ha
Duku	..... Ha	..... Ton/ha
Kokosan	..... Ha	..... Ton/ha
Nenas	..... Ha	..... Ton/ha
Milon	..... Ha	..... Ton/ha
Pisang	..... Ha	..... Ton/ha
Markisah	..... Ha	..... Ton/ha
Lengkeng	..... Ha	..... Ton/ha
Semangka	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha

4. Jenis dan kesuburan Tanah

Warna Tanah (sebagian besar)	~~Merah~~/~~kuning~~/~~hitam~~/abu-abu
Tekstur	Lempungan/~~pasiran~~/debuan
Kedalaman	..... m
Permasalahan	Kandungan:Besi/gambut tinggi/tidak

B.2. TANAMAN OBAT

	Luas (ha)	Hasil panen (Ton/ha)
Jahe	..... Ha	..... Ton/ha
Kunyit	..... Ha	..... Ton/ha
Lengkuas	..... Ha	..... Ton/ha
Mengkudu	..... Ha	..... Ton/ha
Dewa dewi	..... Ha	..... Ton/ha
Kumis kucing	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha

B.3. PERKEBUNAN

1. Luas dan hasil menurut jenis

	Swasta/negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa	.....	.....	.....	.....
Kelapa sawit	.....	.....	.....	.....
Kopi	.....	.....	.....	.....
Cengkeh	.....	.....	.....	.....
Coklat	.....	.....	.....	.....
Pinang	.....	.....	.....	.....
Lada	.....	.....	.....	.....
Karet	.....	.....	.....	.....

Lampiran I B

Mete	.....	.....	.....	.....
Tembakau	.....	.....	.....	.....
Pala	.....	.....	.....	.....
Vanili	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

2. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah rumah tangga memiliki Tanah perkebunan	..... RTP
Tidak memiliki	..... RTP
Memiliki kurang 0,5 ha	..... RTP
Memiliki 0,5 – 1,0 ha	..... RTP
Memiliki lebih dari 1,0 ha	..... RTP

C. KEHUTANAN

1. Luas menurut pemilikan

Milik negara	..... ha
Milik adat/masyarakat adat	..... ha
Perhutani	..... ha
Total	..... ha

2. Hasil hutan

Kayu	..... m^3.th
Madu lebah	..... Liter/th
Rotan	..... Ton/th
Damar	..... Ton/th
Bambu	..... batang/th
.....	
.....	
.....	

3. Kondisi

	Baik	Rusak	Total
Bakau	..... ha	..... ha	..... ha
Produksi	..... ha	..... ha	..... ha
Lindung	..... ha	..... ha	..... ha
Suaka margasatwa	..... ha	..... ha	..... ha
Suaka alam	..... ha	..... ha	..... ha

D. PETERNAKAN

1. Jenis populasi ternak

Sapi	..... Ekor
Kerbau	..... Ekor
Babi	..... Ekor
Ayam	..... Ekor
Bebek	....1.200..... Ekor
Kuda	..... Ekor
Kambing	.....304..... Ekor
.....	..... Ekor
.....	..... Ekor

Lampiran I B

2. Produksi peternakan

Susu	……-…… Ekor/th
Kulit	……-…… M/th
Telur	….1.820…. Kg/th
Daging	……-…… Kg/th
Madu	……-…… LT/Th
……	……

3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak

Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll).	……-…… Ha
Produksi hijauan makanan ternak	……-…… Ton/Ha
Luas lahan gembalaan	……-…… Ha

E. BAHAN GALIAN

1. Jenis dan deposit bahan galian

Batu kapur	……-…… ton
Pasir	……-…… ton
Emas	……-…… ton
Kuningan	……-…… ton
Aluminium	……-…… ton
Perunggu	……-…… ton
Belerang	……-…… ton
Batu marmer	……-…… ton
Batu cadas	……-…… ton
Batu Apung	……-…… ton
Pasir kwarsa	……-…… ton
……	……-…… ton
……	……-…… ton
……	……-…… ton

2. Produksi bahan galian

Batu kapur	……-……Ton/tahun
Pasir	……-……Ton/tahun
Emas	……-……Ton/tahun
Kuningan	……-……Ton/tahun
Aluminium	……-……Ton/tahun
Perunggu	……-……Ton/tahun
Belerang	……-……Ton/tahun
Batu marmer	……-……Ton/tahun
Batu cadas	……-……Ton/tahun
Batu apung	……-……Ton/tahun
Pasir kwarsa	……-……Ton/tahun
……	……-……Ton/tahun
……	……Ton/tahun

Lampiran I B

F. SUMBER DAYA AIR

1. Potensi Air Irigrasi

Ada	
Tidak ada	
Bila ada	
Sungai	Debit..... m^3/dtk
Danau	Volume ..... m^3
Mata air	Debit ..... m^3/dtk
Bendung/waduk	Volume ..... m^3

2. Air Minum

	Jumlah (unit)	Pemanfaat (KK)	Jumlah rusak
Mata air	..... –	..... –	..... – .....
Sumur gali	..... 51	..... 158	..... – .....
Sumur pompa	..... –	..... –	..... – .....
Hidran umum	..... –	..... –	..... – .....
PAM	..... 147	..... 195	..... – .....
Pipa	..... –	..... –	..... – .....
Sungai	..... 1	..... 131	..... – .....
Embung	..... –	..... –	..... – .....

3. Sungai

Jumlah sungai	..... 1 ..... Buah
Tercemar	Ya/~~tidak~~
Pendangkalan	~~Ya~~/tidak
Keruh	Ya/~~tidak~~

4. Rawa

Luas rawa	..... – ..... Buah
Pemanfaatan	
Perikanan	Ya/tidak
Air minum	Ya/tidak
Cuci dan mandi	Ya/tidak
Irigasi	Ya/tidak
Buang air besar	Ya/tidak

5. Pemanfaatan dan kondisi danau

Luas danau	..... – ..... Ha
Pemanfaatan	
Keramba/perikanan	~~Ya~~/tidak
Air minum	~~Ya~~/tidak
Cuci dan mandi	~~Ya~~/tidak
Irigrasi	~~Ya~~/tidak
Buang air besar	~~Ya~~/tidak
Pembangkit listrik	~~Ya~~/tidak
Prasarana transportasi	~~Ya~~/tidak

Lampiran I B

Kondisi	
Tercemar	Ya/tidak
Pendangkalan	Ya/tidak
Keruh	Ya/tidak
.....	Ya/tidak

6. Air Panas

Pemilikan	~~Ada~~/tidak
Jumlah lokasi	..... lokasi
Pemanfaatan	.....
	.....
	.....

G. PERIKANAN

1. Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau

Karamba	..... unit	..... Ton/th
Tambak	.....665,499. ha	..... Ton/th
Jermal	..... unit	..... Ton/th

2. Jenis dan produksi budidaya ikan air tawar

Karamba	..... unit	..... Ton/ha
Empang/kolam	..... ha	..... Ton/ha
	.....	..... Ton/ha

3. Jenis ikan dan produksi

Tuna	..... ton/th
Udang	.....66,5.... ton/th
Kerang	..... ton/th
Kepiting	..... ton/th
Barbara	..... ton/th
Mas	..... ton/th
Mujair	..... ton/th
Lele	..... ton/th
BANDENG.....	....932..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th

H. WISATA

Laut/bahari	~~Ada~~ / ~~tidak~~
Danau	~~Ada~~ / tidak
Gunung	~~Ada~~ / tidak
Sungai	Ada / ~~tidak~~
Agrowisata	~~Ada~~ / tidak
Hutan	Ada / ~~tidak~~
Gua	~~Ada~~ / tidak

Lampiran I B

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. UMUR

0-12 Bulan	..... orang	30 tahun	..... orang
1 tahun	..... orang	31	..... orang
2	..... orang	32	..... orang
3	..... orang	33	..... orang
4	..... orang	35	..... orang
5	..... orang	36	..... orang
6	..... orang	37	..... orang
7	..... orang	38	..... orang
8	..... orang	39	..... orang
9	..... orang	40	..... orang
10	..... orang	41	..... orang
11	..... orang	42	..... orang
12	..... orang	43	..... orang
13	..... orang	44	..... orang
14	..... orang	45	..... orang
15	..... orang	46	..... orang
16	..... orang	47	..... orang
17	..... orang	48	..... orang
18	..... orang	49	..... orang
19	..... orang	50	..... orang
20	..... orang	51	..... orang
21	..... orang	52	..... orang
22	..... orang	53	..... orang
23	..... orang	54	..... orang
24	..... orang	55	..... orang
25	..... orang	56	..... orang
26	..... orang	57	..... orang
27	..... orang	58	..... orang
28	..... orang	Lebih dari 59	..... orang
29	..... orang	Total	1.484 orang

B. JUMLAH

Jumlah total	1.484 orang
Jumlah laki-laki	..... orang
Jumlah perempuan	..... orang
Jumlah kepala keluarga	484 KK

C. PENDIDIKAN

Belum sekolah	..... orang
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	109 orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	112 orang
Tamat SD/sederajat	666 orang
Tamat SLTP/sederajat	322 orang
Tamat SLTA/sederajat	119 orang
D-1	11 orang
D-2	3 orang
D-3	- orang
S-1	28 orang
S-2	2 orang
S-3	- orang

Lampiran I B

E. MATA PENCAHARIAN POKOK

Petani	...-... orang
Buruh tani	...-... orang
Buruh/swasta	...77... orang
Pegawai negeri	...6... orang
Pengrajin	...-... orang
Pedagang	...36... orang
Peternak	...4... orang
Nelayan	...51... orang
Montir	...6... orang
Dokter	...-... orang
TANI TAMPAK	...165... orang
BURUH TANI TAMPAK	...261... orang
.....	... orang
.....	... orang

F. AGAMA

Islam	...1.484... orang
Kristen	...-... orang
Katholik	...-... orang
Hindu	...-... orang
Budha	...-... orang

G. ETNIS

JAWA	...1.391... orang
MADURA	...93... orang
.....	... orang
.....	... orang
.....	... orang

H. CACAT MENTAL DAN FISIK

CACAT FISIK	
Tuna rungu	...2... orang
Tuna wicara	...2... orang
Tuna netra	...1... orang
Lumpuh	...2... orang
Sumbing	...-... orang
Invalid lainnya	...-... orang
CACAT MENTAL	
Idiot	...1... orang
Gila	...-... orang
Stress	...1... orang

I. TENAGA KERJA

1. Penduduk usia 15-55 tahun	... orang
2. Ibu rumah tangga	... orang
3. Penduduk masih sekolah	... orang
Tenaga kerja [(1)-(2)-(3)]	... orang

Lampiran I B

II. POTENSI KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA	.....
Jumlah aparat	..5.....
Pendidikan Kepala Desa	..SARJANA.....
Pendidikan Sekretaris Desa	..SLTA.....
Jumlah RW/dusun/taparu atau sebutan lain	..2.....
Jumlah RT atau sebutan lain	..5.....
BADAN PERWAKILAN DESA	.....
Jumlah anggota	..7.....
Pendidikan ketua BPD	..D1.....

B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

ORGANISASI PEREMPUAN	.....
Jumlah anggota	.....
ORGANISASI PKK	.....
Jumlah anggota	..80.....
ORGANISASI PEMUDA	..KARANG TARUNA.....
Jumlah anggota	.....
ORGANISASI KARANG TARUNA	.....
Jumlah anggota	..60.....
ORGANISASI PROFESI (misalnya: petani)	..KSU "MINA SENTOSA".....
Jumlah anggota	..55.....
ORGANISASI BAPAK	..TAHLIL.....
Jumlah anggota	..184.....
LKMD atau sebutan lain	..LKMD.....
Jumlah pengurus	..10.....
KELOMPOK GOTONG ROYONG	.....
Jumlah anggota	.....

C. KELEMBAGAAN POLITIK

Nama partai politik	..DEMOKRAT....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	..P.K.B.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	..P.D.I.P.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	..GOLKAR.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	..P.P.P.K.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	..P.K.S.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....
Nama partai politik	.....	Nama partai politik	.....

D. KELEMBAGAAN EKONOMI

KOPERASI	..1..... unit
Jumlah anggota	..55..... orang
INDUSTRI KERAJINAN	..-..... unit
Jumlah tenaga kerja	..-..... orang

Lampiran I B

INDUSTRI PAKAIAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI MAKANAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI ALAT RUMAH TANGGA	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI ALAT PERTANIAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
RESTORAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
TOKO/SWALAYAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
WARUNG KELONTONG	..20..... unit
Jumlah tenaga kerja	20..... orang
ANGKUTAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
PASAR	..... unit
RENTENIR	..... orang
PENGIJON	..... orang
PEDAGANG PENGUMPUL/TENGKULAK	..8..... orang
USAHA PETERNAKAN	..4..... unit
Jumlah tenaga kerja	..4..... orang
USAHA PERIKANAN	..166..... unit
Jumlah tenaga kerja	261..... orang
USAHA PERKEBUNAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
KELOMPOK SIMPAN PINJAM	..... unit
Jumlah Anggota	..... orang
.....	..... unit
.....	..... orang
.....	..... unit
.....	..... orang

Lampiran 1 B

E. LEMBAGA PENDIDIKAN

Tk	....1..... unit
Jumlah guru	...3..... orang
Jumlah murid	..43..... orang
SD/SEDERAJAD	5 SDN 2 MI..... unit
Jumlah murid	161..... orang
Jumlah guru	..17..... orang
SLTP	.....–..... unit
Jumlah murid	.....–..... orang
Jumlah guru	.....–..... orang
SLTA	.....–..... unit
Jumlah murid	.....–..... orang
Jumlah guru	.....–..... orang
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan	..... unit
Jumlah peserta didik	..... orang
Jumlah pengajar	..... orang

F. LEMBAGA ADAT

.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit
.....–.....	.....–..... unit

G. KELEMBAGAAN KEAMANAN

Jumlah pos kamling	....2..... unit
Jumlah Hansip/sejenisnya	....35..... orang
Bentuk partisipasi masyarakat dalam kamling	.....

IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI

1. Prasarana Transportasi darat

	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan desa		
Panjang jalan aspal	....2,5.....	....baik.....
Panjang jalan makadam	.....–.....	.....–.....
Panjang jalan tanah	.....	.....
1.2. Jalan antar desa/kecamatan		
Panjang jalan aspal	....2,5.....	....baik.....
Panjang jalan makadam	.....–.....	.....–.....
Panjang jalan tanah	.....–.....	.....–.....

DAFTAR ISIAN PERKEMBANGAN DESA & POTENSI DESA

DIPERBANYAK OLEH:

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR ISIAN POTENSI DESA

DIPERBANYAK OLEH :
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2003

DESA : SEGOROTAMBAK
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROPINSI : JAWA TIMUR
TAHUN : 2003

DAFTAR ISIAN POTENSI DESA

I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A. LUAS KELURAHAN

1. Luas desa

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	=.....-..... ha
Sawah irigrasi ½ teknis	=.....-..... ha
Sawah tanah hujan	=.....-..... ha
TANAH TAMBAK	=....209,999.... ha
TANAH KERING	
Tegal/ladang	=.....-..... ha
Pemukiman	=.....6,4..... ha
TANAH BASAH	
Tanah Rawa	=.....-..... ha
Pasang surut	=.....3,9..... ha
TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	=.....-..... ha
Tanah perkebunan negara	=.....-..... ha
Tanah perkebunan swasta	=.....-..... ha
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas desa	=.....8..... ha
Lapangan	=.....-..... ha
Perkantoran pemerintah	=.....-..... ha
Lainnya	=..... ha
TANAH HUTAN	
Hutan lindung	=.....-..... ha
Hutan produksi	=.....-..... ha
Hutan konversi	=.....-..... ha

2. Tipologi

Desa kepulauan	TIDAK
Desa pantai/pesisir	YA
Desa sekitar hutan	TIDAK
Desa terisolasi	TIDAK
Desa perbatasan dengan negara lain	TIDAK
Desa perbatasan dengan kabupaten lain	YA
Desa perbatasan dengan propinsi lain	TIDAK

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

3. Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	=.....8..... Km
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	=.....0,5..... Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan terdekat	=..ANGKUTAN DESA
Jarak ke ibu kota kabupaten terdekat	=.....22..... Km
Lama tempuh ke ibu kota kabupaten terdekat	=.....1..... Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten terdekat	=...ANKDES & ANKOT

4. Iklim

Curah hujan	=..2.080.... Mm
Jumlah bulan hujan	=..... Bulan
Suhu rata-rata harian	=.22.–34... ^{0} C
Tinggi tempat	=....2..... mdl
Bentang wilayah	Datar/~~berbukit~~/~~lereng gunung~~

B. PERTANIAN

B.1. TANAMAN PANGAN

1. Luas tanaman menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Kacang kedelai	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Kacang tanah	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Kacang panjang	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Padi ladang	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Ubi kayu	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Ubi jalar	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Cabe	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Bawang putih	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Bawang merah	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Tomat	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Sawi	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Kentang	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Kubis	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Mentimun	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Buncis	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Brocoli	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
Terong	....–..... Ha	....–..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha

2. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian	..... RTP
Tidak memiliki	..... RTP
Memiliki kurang 0,5 ha	..... RTP
Memiliki 0,5 – 1,0 ha	..... RTP
Memiliki lebih dari 1,0 ha	..... RTP
Memiliki lebuih dari 1,0 ha	..... RTP
Jumlah total rumah tangga petani	..... RTP

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

Jeruk	..... Ha	..... Ton/ha
Alpokat	..... Ha	..... Ton/ha
Mangga	..... Ha	..... Ton/ha
Rambutan	..... Ha	..... Ton/ha
Manggis	..... Ha	..... Ton/ha
Salak	..... Ha	..... Ton/ha
Apel	..... Ha	..... Ton/ha
Pepaya	..... Ha	..... Ton/ha
Belimbing	..... Ha	..... Ton/ha
Durian	..... Ha	..... Ton/ha
Sawo	..... Ha	..... Ton/ha
Duku	..... Ha	..... Ton/ha
Kokosan	..... Ha	..... Ton/ha
Nenas	..... Ha	..... Ton/ha
Milon	..... Ha	..... Ton/ha
Pisang	..... Ha	..... Ton/ha
Markisah	..... Ha	..... Ton/ha
Lengkeng	..... Ha	..... Ton/ha
Semangka	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha
.....	..... Ha	..... Ton/ha

4. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/kuning/hitam/abu-abu
Tekstur	Lempungan/pasiran/debuan
Kedalaman	..... m
Permasalahan	Kandungan : Besi/gambut tinggi/tidak ada

B.2. TANAMAN OBAT

	Luas (ha)	Hasil panen (Ton/ha)
Jahe	..... ha	..... ton/ha
Kunyit	..... ha	..... ton/ha
Lengkuas	..... ha	..... ton/ha
Mengkudu	..... ha	..... ton/ha
Dewa dewi	..... ha	..... ton/ha
Kumis kucing	..... ha	..... ton/ha
.....	..... ha	..... ton/ha
.....	..... ha	..... ton/ha

B.3. PERKEBUNAN

1. Luas dan hasil menurut jenis

	Swasta/negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa	.....	.....	.....	.....
Kelapa sawit	.....	.....	.....	.....
Kopi	.....	.....	.....	.....

Cengkeh	.....	.....	.....	.....
Coklat	.....	.....	.....	.....
Pinang	.....	.....	.....	.....
Lada	.....	.....	.....	.....
Karet	.....	.....	.....	.....
Mete	.....	.....	.....	.....
Tembakau	.....	.....	.....	.....
Pala	.....	.....	.....	.....
Vanili	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

2. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah rumah tangga memiliki tanah perkebunan	..... RTP
Tidak memiliki	..... RTP
Memiliki kurang dari 0,5 ha	..... RTP
Memiliki 0,5 – 1,0 ha	..... RTP
Memiliki lebih dari 1,0 ha	..... RTP

C. KEHUTANAN

1. Luas menurut pemilikan

Milik Negara	..... Ha
Milik adat / masyarakat adat	..... Ha
Perhutani	..... Ha
Total	..... Ha

2. Hasil hutan

Kayu	..... M^3.th
Madu lebah	..... Liter/th
Rotan	..... Ton/th
Damar	..... Ton/th
Bambu	..... batang/th
.....	
.....	

3. Kondisi

	Baik	Rusak	Total
Bakau	...300....ha	.....ha	300....ha
Produksi	.....ha	.....ha	.....ha
Lindung	.....ha	.....ha	.....ha
Suaka margasatwa	.....ha	.....ha	.....ha
Suaka alam	.....ha	.....ha	.....ha

D. PETERNAKAN

1. Jenis populasi ternak

Sapi	..... ekor
Kerbau	..... ekor
Babi	..... ekor
Ayam	..... ekor

ADLN - Perpustakaan Unair

Bebek ....1.208..... ekor
Kuda .....-..... ekor
Kambing .....394..... ekor
.... ekor
.... ekor

2. Produksi peternakan

Susu .....-.....
Ekor/th
Kulit .....-..... M/th
Telur ....1.8.20... Kg/th
Daging .....-..... Kg/th
Madu .....-..... LT/th
....

3. Ketersediaan Hijauan pakan ternak

Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) .....-..... Ha
Produksi hijauan makanan ternak .....-..... Ton/Ha
Luas lahan gembalaan .....-..... Ha

E. BAHAN GALIAN

1. Jenis dan deposit bahan galian

Batu kapur .....-..... ton
Pasir .....-..... ton
Emas .....-..... ton
Kuningan .....-..... ton
Aluminium .....-..... ton
Perunggu .....-..... ton
Belerang .....-..... ton
Batu marmer .....-..... ton
Batu cadas .....-..... ton
Batu apung .....-..... ton
Pasir kwarsa .....-..... ton
.... ton
.... ton
.... ton
.... ton

2. Produksi bahan galian

Batu kapur .....-.....ton/tahun
Pasir .....-.....ton/tahun
Emas .....-.....ton/tahun
Kuningan .....-.....ton/tahun
Aluminium .....-.....ton/tahun
Perunggu .....-.....ton/tahun
Belerang .....-.....ton/tahun
Batu marmer .....-.....ton/tahun
Batu cadas .....-.....ton/tahun
Batu apung .....-.....ton/tahun
Pasir kwarsa .....-.....ton/tahun
....ton/tahun
....ton/tahun

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

F. SUMBER DAYA AIR

1. Potensi Air Irigasi

Ada	
Tidak ada	

Bila ada	
Sungai	Debit ..... m^3/dtk
Danau	Volume.. .. m^3
Mata air	Debit ..... m^3/dtk
Bendung/waduk	Volume.. .. m^3

2. Air Minum

	Jumlah (unit)	Pemanfaat (KK)	Jumlah rusak
Mata air	..-.....	..-.....	..-.....
Sumur gali	....51.....	....0.....	....5....
Sumur pompa	....-.....	....-.....	....-....
Hidran umum	....-.....	.....	.....
PAM	..136....	..136....	..-.....
Pipa	....-.....	....-.....	....-....
Sungai	....1.....	..86.....	..-.....
Embung	....-.....	....-.....	....-....

3. Sungai

Jumlah sungai	....1..... buah
Tercemar	Ya/~~tidak~~
Pendangkalan	Ya/tidak
Keruh	Ya/~~tidak~~

4. Rawa

Luas rawa	....-..... Ha
Pemanfaatan	
Perikanan	Ya/tidak
Air minum	Ya/tidak
Cuci dan mandi	Ya/tidak
Irigrasi	Ya/tidak
Buang air besar	Ya/tidak

5. Pemanfaatan dan kondisi Danau

Luas danau	....-..... Ha
Pemanfaatan	
Karamba/perikanan	~~Ya~~/tidak
Air minum	~~Ya~~/tidak
Cuci dan mandi	~~Ya~~/tidak
Irigasi	~~Ya~~/tidak
Buang air besar	~~Ya~~/tidak
Pembangkit listrik	~~Ya~~/tidak
Prasarana transportasi	~~Ya~~/tidak

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

Kondisi	
Tercemar	~~Ya~~/tidak
Pendangkalan	~~Ya~~/tidak
Keruh	~~Ya~~/tidak
.....	~~Ya~~/tidak

6. Air Panas

Pemilikan	~~Ada~~/tidak
Jumlah lokasi	..... Lokasi
Pemanfaatan	.....
	.....
	.....
	.....

G. PERIKANAN

1. Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau

Karamba	..... unit	..... ton/th
Tambak	..... unit	..... ton/th
Jermal	..... unit	..... ton/th
	..... unit	..... ton/th

2. Jenis dan produksi budidaya Ikan air tawar

Karamba	..... unit	..... ton/th
Empang/kolam	..... ha	..... ton/th

3. Jenis ikan dan produksi

Tuna	..... ton/th
Udang	..... ton/th
Kerang	..... ton/th
Kepiting	..... ton/th
Barbara	..... ton/th
Mas	..... ton/th
Mujair	..... ton/th
Lele	..... ton/th
BANDENG	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th
.....	..... ton/th

H. WISATA

Laut/bahari	~~Ada~~/tidak
Danau	~~Ada~~/tidak
Gunung	~~Ada~~/tidak
Sungai	~~Ada~~/tidak
Agrowisata	~~Ada~~/tidak
Hutan	~~Ada~~/tidak
Gua	~~Ada~~/tidak

DAFTAR ISIAN

Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. PENDUDUK

1. Jumlah kepadatan penduduk
   a. Jumlah penduduk seluruhnya tahun ini : 1.454 orang
   b. Jumlah penduduk seluruhnya tahun lalu : 1.448 orang
   c. Jumlah kepala keluarga : 459 KK
   d. Luas wilayah : ..... Km^2
   e. Kepadatan penduduk (luas wilayah: Jlh. penduduk : orang/Km2

2. Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 bulan -12 bulan	26	22	48
2	13 bulan- 4 bulan	40	47	87
3	5 bulan - 6 bulan	36	56	92
4	7 bulan -12 bulan	47	75	122
5	13 bulan-15 bulan	22	45	67
6	16 bulan-18 bulan	46	47	93
7	19 bulan-25 bulan	54	73	127
8	26 bulan-35 bulan	92	101	193
9	36 bulan-45 bulan	90	93	183
10	46 bulan-50 bulan	92	95	187
11	51 bulan-60 bulan	53	64	117
12	61 bulan-75 bulan	40	47	87
13	Diatas -75 bulan	18	23	41
	Jumlah	666	788	1.454

B. PENDIDIKAN

Belum sekolah : 70 orang
Usia 7 – 45 tahun tidak pernah sekolah : 109 orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat : 117 orang
Tamat SD / sederajat : 629 orang
SLTP / sederajat : 372 orang
SLTA / sederajat : 192 orang
D - 1 : 9 orang
D - 2 : ..... orang
D - 3 : ..... orang
S - 1 : 23 orang
S - 3 : ..... orang

ADLN - Perpustakaan Unair

E. MATA PENCAHARIAN POKOK

Petani : ....-....orang
Buruh tani : ....-....orang
Buruh/swasta : ....74....orang
Pengrajin : ....-....orang
Pedagang : ....31....orang
Peternak : ....4....orang
Nelayan : ....91....orang
Montir : ....5....orang
Dokter : ....-....orang
TANI TAMPAK : ....161....orang
PENGGARAP : ....161....orang
.... : ....orang
.... : ....orang
....orang

F. AGAMA

Islam : ....1.454....orang
Kristen : ....-....orang
Katholik : ....-....orang
Hindu : ....-....orang
Budha : ....-....orang

G. ETNIS

JAWA : ....1.362....orang
MADURA : ....92....orang
.... : ....orang
.... : ....orang
.... : ....orang

H. CACAT MENTAL DAN FISIK

CACAT FISIK
Tuna rungu : ....8....orang
Tuna wicara : ....8....orang
Tuna netra : ....1....orang
Lumpuh : ....2....orang
Sumbing : ....-....orang
Invalid lainnya : ....orang

CACAT MENTAL
Idiot : ....1....orang
Gila : ....-....orang
Stress : ....1....orang

I. TENAGA KERJA

Penduduk usia 15-60 tahun : ....1.728....orang
2. Ibu rumah tangga : ....459....orang
3. Penduduk masih sekolah : ....325....orang
Tenaga kerja (1)-(2)-(3) : ....orang

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

D. KELEMBAGAAN EKONOMI

KOPERASI	..... unit
Jumlah anggota	..... orang
INDUSTRI KERAJINAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI PAKAIAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI MAKANAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI ALAT RUMAH TANGGA	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
INDUSTRI ALAT PERTANIAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
RESTORAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
TOKO/SWALAYAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
WARUNG KELONTONG	20 unit
Jumlah tenaga kerja	20 orang
ANGKUTAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
PASAR	..... unit
RENTENIR	..... orang
PENGIJON	..... orang
PEDAGANG PENGUMPUL/TENGKULAK	8 orang
USAHA PETERNAKAN	3 unit
Jumlah tenaga kerja	5 orang
USAHA PERIKANAN	166 unit
Jumlah tenaga kerja	166 orang
USAHA PERKEBUNAN	..... unit
Jumlah tenaga kerja	..... orang
KELOMPOK SIMPAN PINJAM	1 unit
Jumlah anggota	50 orang
.....	..... unit
.....	..... orang
.....	..... unit
.....	..... orang

ADLN - Perpustakaan Unair

III. POTENSI KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA	
Jumlah aparat	5
Pendidikan Kepala Desa	SLTA
Pendidikan Sekretaris Desa	SLTA
Jumlah RW/dusun/taparu atau sebutan lain	2
Jumlah RT atau sebutan lain	5
BADAN PERWAKILAN DESA	
Jumlah anggota	7
Pendidikan ketua BPD	SARJANA MUDA

B. KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN

ORGANISASI PEREMPUAN	PKK
Jumlah anggota	80
ORGANISASI PEMUDA	KARANG TARUNA
Jumlah Anggota	60
ORGANISASI PROFESI (misalnya: petani)	MUNA SEMPOSA
Jumlah anggota	65
ORGANISASI BAPAK	TAHLIL
Jumlah anggota	155
LKMD atau sebutan lain	LPMD
Jumlah pengurus	10
KELOMPOK GOTONG ROYONG	
Jumlah anggota	

C. KELEMBAGAAN POLITIK

Nama partai politik	PPP	Nama partai politik	
Nama partai politik	PKP	Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	
Nama partai politik		Nama partai politik	

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

D. KELEMBAGAAN EKONOMI

KOPERASI	..-.. unit
Jumlah anggota	..-.. orang
INDUSTRI KERAJINAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
INDUSTRI PAKAIAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
INDUSTRI MAKANAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
INDUSTRI ALAT RUMAH TANGGA	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
INDUSTRI ALAT PERTANIAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
RESTORAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
TOKO/SWALAYAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
WARUNG KELONTONG	..20.. unit
Jumlah tenaga kerja	..20.. orang
ANGKUTAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
PASAR	..-.. unit
RENTENIR	..-.. orang
PENGIJON	..-.. orang
PEDAGANG PENGUMPUL/TENGKULAK	..8.. orang
USAHA PETERNAKAN	..3.. unit
Jumlah tenaga kerja	..5.. orang
USAHA PERIKANAN	..166.. unit
Jumlah tenaga kerja	..166.. orang
USAHA PERKEBUNAN	..-.. unit
Jumlah tenaga kerja	..-.. orang
KELOMPOK SIMPAN PINJAM	..1.. unit
Jumlah anggota	..30.. orang
.....	..... unit
.....	..... orang
.....	..... unit
.....	..... orang

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

ADLN - Perpustakaan Unair

Anggaran untuk BPD	~~Ada~~/tidak
Produk keputusan BPD tahun ini	.....
	.....
	.....

8. Pertanggungjawaban kepala desa/akuntabilitas

Pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD	Ada/~~tidak~~
Status pertanggung jawaban kepala desa	Diterima/ditolak
Alasan bila di tolak	.....
	.....
	.....

V1. KEPRIBADIAN KEBANGSAAN MASYARAKAT

1. Kegotong royongan penduduk

Jumlah kelompok arisan	...1..... buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	..... orang
Ada tidaknya dana sehat	~~Ada~~/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan /sejenisnya dalam Pembangunan rumah	Ada/~~tidak~~
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan /sejenisnya dalam Pengolahan tanah	~~Ada~~/tidak
Ada tidaknya gotong royong menjaga kebersihan desa	Ada~~tidak~~
Ada tidaknya gotong royong membangun jalan/jembatan	Ada/~~tidak~~

2. Adat istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan	~~Ada~~ /~~tidak~~/pernah ada
Adat istiadat dalam kelahiran anak	~~Ada~~ /tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam upacara kematian	~~Ada~~ /tidak/~~pernah~~ ada
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	~~Ada~~ /tidak/~~pernah~~ ada
Adat istiadat dalam pengelolaan tanah pertanian	~~Ada~~ /tidak/~~pernah ada~~
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	~~Ada~~ /~~tidak~~/pernah ada
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	~~Ada~~ /tidak/~~pernah ada~~

3. Etos kerja penduduk

Luas desa	.742,919 Ha
Luas lahan terlantar	..... Ha
Luas lahan pekarangan	..... Ha
Luas lahan pekarangan tidak dimanfaatkan	..... Ha
Kegiatan petani pada musim kemarau	.....
TANI TAMBAK	.....
	.....
Kegiatan nelayan pada musim tidak melaut	.....
	.....

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

DAFTAR ISIAN
Pendataan Profil Desa

BUPATI SIDOARJO
PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA :

KELOMPOK TANI : Mina Santosa

DESA : Segoro Tambak

KECAMATAN : Sedati

KABUPATEN : Sidoarjo

SEBAGAI

Pemenang I (Satu)

Lomba Intensifikasi Tambak (INTAM) Tingkat Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2004

Piagam ini diberikan sebagai penghargaan atas prestasi dan peran sertanya dalam usaha meningkatkan produksi, serta menjadi contoh dan pendorong bagi kelompok tani lainnya,

Sidoarjo, Desember 2004

Bupati Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO

Drs. H. Win Hendrarso, M.Si

ADEN - Perpustakaan Unair

BUPATI SIDOARJO

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA :

KELOMPOK TANI : MINA SANTOSA

D E S A : SEGORO TAMBAK

KECAMATAN : SEDATI

KABUPATEN : SIDOARJO

S E B A G A I

PEMENANG KESATU

TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2000

Piagam ini diberikan sebagai penghargaan atas prestasi dan peran sertanya dalam usaha meningkatkan produksi, serta menjadi contoh dan pendorong bagi kelompok tani lainnya.

Sidoarjo, 29 Januari 2001

BUPATI SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

(Drs. H. WIN HENDRARSO, M. Si)

Perpustakaan Universitas Airlangga

ADLN - Perpustakaan Unair

GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

Na m a	:	Kelompok Tani MINA SENTOSA
Desa	:	Segoro Tambak
Kecamatan	:	Sedati
Kabupaten	:	Sidoarjo

SEBAGAI
PEMENANG KEDUA

Lomba Intensifikasi Tambak Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2001.

Surabaya, Desember 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S